

**PERAN CIVIL SOCIETY DALAM REVITALISASI
HERITAGE**

(Studi: Komunitas AMBO Kota Lama Semarang Tahun 2019-2024)

SKRIPSI

Di susun untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Oleh:

Lisna Anggraeni

2106016024

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM WALISONGO SEMARANG
2025**

NOTA PEMBIMBING

Lam : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Bapak/Ibu Dekan FISIP

UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah mempertimbangkan aspek Akademis dan Administratif dilanjutkan dengan membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya menyatakan bahwa Skripsi dari Mahasiswi :

Nama : Lisna Anggraeni

NIM : 2106016024

Jurusan : Ilmu Politik

Judul : Peran Civil Society Dalam Revitalisasi Heritage (Studi: Komunitas AMBO Kota Lama Semarang Tahun 2019-2024)

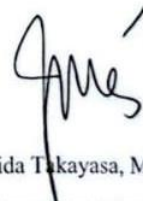
Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diajukan untuk diujikan.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, 26 Mei 2025

Pembimbing



Tika Ifrida Tukayasa, M.A

NIP.198811152019032018

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERAN CIVIL SOCIETY DALAM REVITALISASI HERITAGE

STUDI PENELITIAN: KOMUNITAS AMBO KOTA LAMA SEMARANG

TAHUN 2019- 2024

Disusun Oleh

Lisna Anggraeni

Nim : 2106016024

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 16 Juni 2025 Dan telah dinyatakan Lulus

Susunan Dewan Penguji



Ketua
Tika Ifrida Takayasa, M.A
NIP. 198811152019032018

Sekretaris

M.Nuqlir Bariklana, M.Si
NIP. 19850502201931007

Penguji I

Prof. Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag
NIP. 197701202005011005

Dosen Pembimbing

Tika Ifrida Takayasa, M.A
NIP. 198811152019032018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Lisna Anggraeni menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul *“Peran Civil Society Dalam Revitalisasi Heritage (Studi: Komunitas AMBO Kota Lama Semarang Tahun 2019-2024)”* merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya pihak lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di UIN Walisongo Semarang ataupun di lembaga pendidikan tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 17 Juli 2025



Lisna Anggraeni

NIM : 2106016024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Peran Civil Society Dalam Revitalisasi Heritage (Studi: Komunitas AMBO Kota Lama Semarang Tahun 2019-2024)*”. Sholawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua sehingga dapat menjadi umat yang berakhlakul karimah dan memiliki pengetahuan.

Dengan selesainya skripsi ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa bagi penulis dan hasil akhir selama mengikuti proses perkuliahan di program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam proses pembelajaran selama menjadi mahasiswa, dan dalam proses penyusunan skripsi ini, tidak dapat penulis selesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Nizar, M.Ag yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag yang telah memberikan banyak ilmu, arahan, serta nasehat selama penulis menimba ilmu pada program studi Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo Semarang.
3. Kepala Jurusan Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo Semarang, Bapak M. Nuqlir Bariklana, M.Si dan Ibu Masrohatun, M.Si yang telah memberikan dukungan dan berbagai ilmu kepada penulis dalam perkuliahan.
4. Ibu Tika Ifrida Takayasa, M.A selaku dosen pembimbing penulis yang telah banyak memberikan ilmu, arahan, motivasi, serta dukungan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Semoga keberkahan dan kemudahan selalu mengiringi langkah beliau dalam semua hal.

5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis sehingga penulis mampu mengimplementasikan ilmu yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap jajaran tenaga pendidik dan civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah membantu penulis dalam memenuhi segala kebutuhan administratif dalam penyusunan skripsi ini.
7. Komunitas AMBO selaku informan utama dalam penelitian yang penulis lakukan dan telah mengizinkan dan memberikan berbagai informasi kepada penulis serta bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara dengan penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar.
8. Segenap narasumber yang bersedia dijadikan informan pendukung yang turut memberikan berbagai informasi kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Kedua orang tua penulis, Almarhumah Ibu Munzaenah Kusumawati dan Almarhum Bapak Maftukhin, Kakak-kakak tercinta Adi, Novi dan Hasna yang telah memberikan doa, cinta, kasih sayang, serta dukungan baik dari segi moral maupun material yang tidak terhingga kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Semoga kedua orang tua dan keluarga penulis selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan umur panjang, Aamiin.
10. Rekan-rekan Ilmu Politik A dan seluruh rekan prodi Ilmu Politik 2021 yang telah memberikan canda tawa dan semangat bagi penulis. Semoga Allah meridhoi langkah kita menuju sukses, Aamiin.
11. Untuk Salma Alfaina Azizah, Fiona Nada, Nafsyah Rizka Fitria, Maulidya Fatikhatul Khusna, Syifa Alqisth Yuha, Layalin Zulfatul Ula. terimakasih dukungan, tawa, dan kebersamaan kalian memberikan warna dalam perjalanan hidupku, dan momen-momen tersebut menjadi sumber semangat tak ternilai dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala kebaikan dan persahabatan yang tak pernah pudar. Semoga hal-hal baik selalu menyertaimu, Aamiin.

12. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur penulis ucapkan terima kasih.

Penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat penulis butuhkan agar skripsi ini dapat meningkatkan kualitas dan dapat berguna bagi para pembaca. Akhir kata penulis sampaikan terimakasih atas perhatiannya.

Semarang, 17 Juli 2025



Lisna Anggraeni
2106016024

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan do'a dan rasa syukur atas rahmat dan hidayah kepada Allah
SWT Tuhan Semesta Alam

Saya mempersembahkan karya ini untuk kedua orang tua tercinta saya Almarhumah Ibu Munzaenah Kusumawati dan Almarhum Bapak Maftukhin yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang, yang selalu memberikan dukungan dalam segala hal saat menjalani hidup, yang selalu memanjatkan untaian do'a tulus di setiap langkah kaki saya tanpa henti untuk kesuksesan saya

MOTTO

Q.S Al-Insyiroh ayat 5 ; “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

Book of Atomic Habits by James Clear; “1% better every day”

ABSTRAK

Penelitian ini ingin membahas mengenai peran *civil society* dalam revitalisasi *heritage* (studi: komunitas AMBO Kota Lama Semarang tahun 2019-2024). Hal ini berawal dari tumbuhnya kesadaran kolektif warga yang kemudian membentuk AMBO sebagai bentuk respons atas minimnya keterlibatan publik dalam proses revitalisasi Kota Lama Semarang. Peran AMBO membawa pendekatan baru dalam pengelolaan kawasan *heritage* yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan berorientasi pada masyarakat. Permasalahan ini dikaji untuk menjawab pada dua pertanyaan penelitian mengenai bagaimana peran AMBO sebagai *civil society* dalam revitalisasi Kota Lama tahun 2019-2024 dan apa dampak keterlibatan AMBO dalam revitalisasi Kota Lama Semarang.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas, studi ini menggunakan teori *civil society* karya AS-Hikkam dengan menggambarkan fenomena dari data yang diperoleh di lapangan yang dibantu dengan metode penelitian kualitatif yang mengedepankan prosedur penelitian dengan menyajikan data analisis-deskriptif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi. Pada penelitian ini pemilihan narasumber dipilih secara purposive.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa AMBO Peran AMBO sebagai aktor masyarakat sipil yang signifikan dalam proses revitalisasi kawasan *heritage* Kota Lama Semarang. Berdasarkan temuan penelitian, komunitas AMBO dapat dikategorikan sebagai bagian dari *civil society* karena telah memenuhi sejumlah karakteristik utama sebagaimana dirumuskan oleh AS Hikam (1999). AMBO menunjukkan eksistensinya sebagai entitas sosial yang otonom, dengan mendorong terbentuknya ruang publik yang bebas (*free public sphere*) melalui kegiatan diskusi terbuka dan forum partisipatif seperti Sambung Rasa, konferensi pers, pemanfaatan media. Selain itu, AMBO juga mencerminkan nilai-nilai demokrasi, keterbukaan terhadap perbedaan (toleransi), serta kemajemukan, yang menjadi fondasi penting dalam kehidupan masyarakat sipil yang sehat.

Kata Kunci : Civil Society, Revitalisasi Kawasan *Heritage*, Komunitas AMBO, Kota Lama Semarang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TEORI CIVIL SOCIETY	19
A. Definisi Konsep.....	19
1. Konsep Peran	19
2. Civil Society.....	21
3. Revitalisasi Heritage.....	25
B. Teori Muhammad As-Hikam	29
BAB III GAMBARAN UMUM PROFIL KOTA LAMA SEMARANG	34
A. Gambaran Umum Kota Semarang	34
1. Kondisi Geografis.....	34
2. Demografis Penduduk Kota Semarang.....	35
B. Gambaran Umum Kota Lama Semarang.....	38
1. Revitalisasi Kota Lama	39
2. Isu Revitalisasi	42

3. Profil AMBO.....	45
BAB IV PERAN AMBO DALAM REVITALISASI KOTA LAMA SEMARANG .	49
A. Fasilitator kolaborasi multi-stakeholder	49
1. Sambung rasa	50
2. Kampanye festival kota lama	59
3. Pemanfaatan media sosial oleh media <i>WhatsApp</i>	67
B. Advokasi dalam revitalisasi	70
1. Konferensi Pers Masyarakat	71
C. Refleksi teoritis AMBO dalam konteks <i>civil society</i>.....	79
1. <i>Free Public Sphere</i>	79
BAB V DAMPAK KETERLIBATAN KOMUNITAS AMBO PADA	
REVITALISASI KOTA LAMA SEMARANG TAHUN 2019-2024.....	85
A. Penyediaan Kantong Parkir.....	85
B. Peningkatan Kesadaran Masyarakat	87
C. Penguatan Posisi Komunitas.....	91
BAB VI PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	96
Daftar Pustaka	98
LAMPIRAN	103
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Kota Semarang	34
Gambar 3. 2 Peta Kota Lama Semarang	38
Gambar 3. 3 Bangunan Perusahaan Butterworth& Co dan Konsulat Siam.....	40
Gambar 3. 4 Pembongkaran Kabel	43
Gambar 4. 1 Sambung Rasa	51
Gambar 4. 2 Sambung Rasa	55
Gambar 4. 3 Yayasan Kota Lama Semarang.....	59
Gambar 4. 4 Festival Kota Lama Semarang.....	61
Gambar 4. 5 Diskusi dan Sosialisasi Bersama Prof. Endang Sumiarni.....	72
Gambar 4. 6 Pameran Foto Bangunan Kota Lama	73
Gambar 4. 7 Aksi Bagi-bagi Masker Oleh Komunitas AMBO	75
Gambar 4. 8 Pembukaan Acara “Kampanye Pelestarian Cagar Budaya” Di salah satu Bangunan Oudetrap.....	77
Gambar 4. 9 Masyarakat Melakukan Registrasi Online Untuk Bngunan Cagar Budaya Yang Dimiliki	78
Gambar 5. 1 Kantong Parkir Kota Lama 2015	86
Gambar 5. 2 Kantong Parkir Kota Lama Semarang.....	87
Gambar 5. 3 Media Komunitas Peduli Kota Lama Semarang.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Kota Semarang	36
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok	37
Tabel 3. 3 Struktur Anggota AMBO Kota Lama.....	46
Tabel 4.1 Festival Kota Lama Tahun 2012-2024.....	62
Tabel 5. 1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Semarang	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Kota Lama merupakan salah satu kawasan cagar budaya di Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang, yang memiliki peran penting sebagai pusat kebudayaan pada masa kolonial. Namun seiring berjalannya waktu, banyak bangunan bersejarah di kawasan ini mengalami degradasi fisik, terlihat kurang terawat. Kota Lama Semarang (*Semarang Old City*) telah ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya tingkat Provinsi melalui SK Gubernur Jawa Tengah No. 432/143 Tahun 2019, dan Kawasan Cagar Budaya berperingkat nasional melalui SK Mendikbud No. 682/P/2020 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya Kota Semarang, yang didalamnya termasuk Kawasan Kota Lama Semarang (semarang.kota, 2024). Status cagar budaya ini telah ditetapkan sebagai *tentative list* atau daftar sementara *world heritage* oleh UNESCO tahun 2015 (whc.unesco, 2015). Salah satu persyaratan agar sebuah kawasan bersejarah dapat diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO adalah adanya keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam proses pengembangan kawasan menuju status tersebut.

Pada awal pembentukannya, AMBO menunjukkan pola hubungan yang bersifat kooperatif dengan pemerintah dalam upaya revitalisasi Kota Lama Semarang. AMBO berfungsi sebagai perwakilan masyarakat yang turut serta dalam inisiatif pelestarian dan pengembangan kawasan tersebut. *Asosiasi Masyarakat Mbangun Oudestadt* (AMBO) telah berdiri sejak 2015, yang terdiri dari masyarakat lokal, pengusaha dan penyewa gedung di Kawasan Kota Lama. Istilah *Oudestadt* berasal dari bahasa Belanda yang secara harfiah berarti 'kota tua'. Sejak awal berdirinya, AMBO berfokus pada penggalangan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga warisan budaya, serta mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang lebih serius dalam revitalisasi kawasan cagar budaya dan memperjuangkan hak-hak mereka selaku masyarakat di sekitar kawasan Kota Lama (Jessie, 2024).

Bentuk kerja sama ini mencerminkan semangat kemitraan antara *civil society* dan pemerintah dalam menata ulang kawasan bersejarah, dengan harapan dapat menciptakan tata kelola yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Seiring dengan perkembangan waktu, AMBO mulai menunjukkan sikap yang lebih kritis terhadap pemerintah, terutama dalam aspek implementasi kebijakan revitalisasi. Kritik ini muncul karena terdapat ketidakseimbangan dalam keterlibatan aktor pemerintah, di mana kebijakan yang diambil

dinilai kurang memperhatikan aspirasi masyarakat (Jessie, 2024). Salah satu isu utama yang disoroti adalah minimnya peran aktif pemerintah dalam menangani kebutuhan masyarakat di Kota Lama, baik dalam aspek infrastruktur, pengelolaan ruang publik, maupun dampak sosial dan ekonomi terhadap warga setempat.

Istilah *civil society*, dalam literature disebut masyarakat sipil, masyarakat kewarganegaraan dan masyarakat madani. Merujuk pada pemikiran Muhammad AS Hikam (1999), Civil society sebagai ruang politik dapat dipahami sebagai suatu domain yang memungkinkan individu untuk berperilaku, bertindak, dan merefleksikan diri secara mandiri tanpa terikat oleh kondisi kehidupan material maupun tersubordinasi dalam struktur kelembagaan politik formal. Dalam konsep ini, terdapat esensi dari keberadaan ruang publik yang bebas (*the free public sphere*), di mana masyarakat dapat berinteraksi dan berkomunikasi secara terbuka tanpa adanya tekanan atau pembatasan eksternal. Dalam perspektifnya, civil society terdiri dari berbagai lembaga non-pemerintah yang memiliki kemandirian, berkontribusi dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat, serta berperan dalam mewujudkan keadilan sosial. Kelompok ini mencakup beragam entitas, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi sosial dan keagamaan, paguyuban, dan juga kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*) (Hikam,1999).

Revitalisasi merupakan upaya untuk mengubah atau memperbaiki suatu kawasan agar dapat dimanfaatkan secara lebih optimal sesuai dengan fungsinya, dengan tetap mempertahankan karakteristik utamanya dan melakukan penyesuaian secara terbatas sehingga dampak perubahan yang ditimbulkan tetap minimal (Sonaesti & Purwanto, 2022). Sedangkan menurut Peraturan Daerah No 2 Tahun 2020, revitalisasi kawasan Kota Lama Semarang merupakan sebuah upaya terstruktur yang bertujuan untuk memulihkan sekaligus mengembangkan kembali kawasan tersebut dengan tetap menjaga nilai-nilai sejarah dan budayanya.

Proses revitalisasi mencakup perbaikan infrastruktur, restorasi bangunan cagar budaya, serta penataan ruang publik yang dirancang untuk meningkatkan kualitas lingkungan, memperkuat daya tarik pariwisata, dan mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan. Selain itu, revitalisasi ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pelestarian warisan budaya dengan pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat modern. Dengan demikian, kawasan Kota Lama diharapkan dapat kembali berfungsi sebagai pusat aktivitas sosial, budaya, dan ekonomi yang berkelanjutan dengan mempertahankan karakter historisnya (semarang.kota, 2024).

Wacana tersebut perlu diletakkan kembali dalam ruang lingkup politik, revitalisasi tidak hanya bergantung pada peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sipil atau *civil society* sebagai mitra strategis dalam mewujudkan tujuan revitalisasi. Upaya revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada dimensi fisik dan teknis, tetapi juga melibatkan dinamika politik yang kompleks, di mana berbagai aktor seperti pemerintah dan masyarakat sipil atau *civil society* berperan aktif. Sebagai kawasan bersejarah yang memiliki nilai budaya dan potensi pariwisata yang signifikan, Kota Lama menjadi ruang interaksi politik yang mempertemukan beragam kepentingan dan agenda. Dalam proses ini, komunitas AMBO berperan sebagai bagian dari *civil society*, yaitu aktor masyarakat madani yang mampu memperjuangkan hak-haknya secara mandiri.

Studi tentang revitalisasi kota telah diteliti dan dikaji oleh para sarjana terdahulu. Pada studi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bima Bayu Aji & Ari Subowo (2022), Manar (2023), Putri, Setiyono & Ardianto (2021), Dewi, Setianingsih, & Yuniningsih (2023), dan Dimas Adi Mahindra (2022), Yulianti, Susilowati & Suliyati (2021) menemukan hasil yang memfokuskan kajian tentang revitalisasi kota dari segi sosiologis. Secara garis besarnya hasil kajian ini menunjukkan bahwa upaya revitalisasi yang dilaksanakan pemerintah bertujuan untuk mempertahankan nilai budaya kawasan sambil meningkatkan potensi ekonomi lokal, daya tarik wisata, dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Keterlibatan *civil society* tidak hanya memperkuat partisipasi masyarakat tetapi juga menciptakan ruang dialog yang inklusif antara pemerintah dan masyarakat. Pendekatan ini memperlihatkan pentingnya sinergi antara tata kelola yang deliberatif dan partisipasi *civil society* untuk memastikan keberlanjutan revitalisasi. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator yang menyediakan regulasi dan sumber daya, sedangkan *civil society* berperan langsung dalam kegiatan pelestarian budaya dan promosi kawasan (Yulianti dkk, 2021). Namun demikian tantangan tata kelola tetap menjadi isu yang harus diatasi dalam revitalisasi, meskipun terdapat upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat, aspek akuntabilitas dan responsibilitas dalam kebijakan revitalisasi masih perlu ditingkatkan (Manar, 2023).

Secara garis besar, terdapat kesamaan topik kajian peneliti terdahulu yang telah diulas sebelumnya dengan penulis, yaitu revitalisasi kota. Namun dalam hal ini arah kajian penulis lebih difokuskan pada *civil society* dari sudut pandang ilmu politik. Pendekatan ini dipilih karena penulis ingin mendalami dinamika partisipasi tersebut melalui perspektif yang berbeda, mengingat banyak penelitian sebelumnya mengkaji revitalisasi kota secara

sosiologis. Pada ulasan awal telah dijelaskan bahwa revitalisasi kota menjadi arena interaksi antara pemerintah sebagai pemangku kebijakan dengan komunitas lokal, di mana keduanya memiliki peran yang signifikan dalam menentukan keberhasilan revitalisasi. Fokus kajian ini adalah studi peran AMBO selaku *civil society* dalam revitalisasi kawasan Kota Lama Semarang. Kajian ini dilakukan di Kota Lama Semarang yang merupakan kawasan bersejarah di Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. AMBO sebagai komunitas berkontribusi pada aspek non-fisik, seperti penyelenggaraan festival dan seminar internasional. Meski demikian komunitas ini tidak terlibat secara mendalam dalam proses formulasi kebijakan atau pengelolaan revitalisasi (Jessie, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini akan mendalami bagaimana AMBO memainkan perannya dalam revitalisasi, terutama melalui advokasi dan serta bagaimana interaksi mereka dengan pemerintah.

AMBO mengalihkan fokusnya ke advokasi dan penyampaian keluhan terkait kondisi fisik di kawasan Kota Lama, seperti pemeliharaan bangunan cagar budaya, aksesibilitas infrastruktur, serta pengembangan fasilitas penunjang aktivitas ekonomi warga (Jessie, 2024). Dalam hal ini, AMBO lebih berperan sebagai pengawas kebijakan yang berupaya memastikan bahwa revitalisasi dilakukan secara tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Hasil revitalisasi Kota Lama Semarang lebih terlihat dalam peningkatan sektor pariwisata, hal ini menunjukkan adanya pergeseran prioritas dari tujuan awal revitalisasi. Selain itu, latar belakang anggota AMBO yang sebagian besar berasal dari kalangan pengusaha juga memengaruhi orientasi komunitas yang lebih condong pada aspek ekonomi dibandingkan aspek sosial atau kebijakan publik. Dalam perkembangannya, AMBO juga dilibatkan dalam Badan Pengelola Situs Kota Lama (BPSKL).

Namun demikian, meskipun aktif dalam mengawal isu-isu revitalisasi, keterlibatan AMBO dalam proses perumusan kebijakan strategis masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kebijakan yang masih bersifat top-down, minimnya ruang dialog deliberatif bagi masyarakat sipil, serta dinamika hubungan yang semakin kompleks antara AMBO dan pemerintah. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana ruang partisipasi yang diberikan kepada AMBO benar-benar efektif dalam proses revitalisasi. Fenomena ini mencerminkan adanya kontestasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program revitalisasi. Pemerintah berupaya untuk menciptakan revitalisasi yang berorientasi pada keberhasilan ekonomi dan pariwisata, sementara AMBO lebih fokus pada isu-isu yang terkait langsung dengan kepentingan mereka. Kajian ini menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam konteks ilmu politik, khususnya dianalisis menggunakan teori

civil society oleh Alexis de Tocqueville, guna memahami interaksi dan dinamika yang terjadi dalam upaya revitalisasi Kota Lama Semarang.

Penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang revitalisasi kota, yang termuat dalam "*Peran Civil Society Dalam Revitalisasi Heritage (Studi: Komunitas AMBO Kota Lama Semarang Tahun 2019-2024)*". Kajian ini penting untuk dilakukan karena memiliki signifikansi dalam bidang politik, khususnya terkait peran *civil society* yang selama ini cenderung dianalisis dari perspektif sosiologis. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pendekatan dalam kerangka politik untuk memahami dinamika serta kontribusinya dalam proses revitalisasi kawasan bersejarah, seperti Kota Lama Semarang. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa komunitas tidak hanya berperan sebagai penerima kebijakan atau program, tetapi juga sebagai aktor aktif yang terlibat dalam advokasi, mendorong partisipasi politik dan kesadaran sosial. Dengan demikian, kajian ini menegaskan bahwa *civil society* memiliki peran strategis dalam mendukung keberlangsungan revitalisasi sekaligus memastikan program tetap sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang ada, terciptanya pertanyaan didalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran komunitas AMBO sebagai *civil society* dalam revitalisasi Kota Lama pada tahun 2019-2024?
2. Bagaimana dampak keterlibatan AMBO dalam revitalisasi Kota Lama Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis memiliki harapan dapat membawa manfaat sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran komunitas AMBO sebagai *civil society* dalam revitalisasi Kota Lama pada tahun 2019-2024
2. Untuk mengetahui dampak keterlibatan komunitas AMBO pada revitalisasi Kota Lama Semarang

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat. sebagai berikut:

1. Bagi Teoritis

- a. Bagi penulis, dapat dijadikan acuan lebih lanjut dan diharapkan mampu untuk menambah pengetahuan serta menjadikan referensi bagi para pembaca
- b. Bagi Peneliti, dapat dikembangkan mengenai variabel yang ada untuk penelitian selanjutnya pada kajian Ilmu Politik
- c. Untuk mengetahui peran komunitas AMBO sebagai *civil society* dalam revitalisasi kawasan Kota Lama

2. Bagi Praktisi

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah dan memperkaya literature pada bidang *civil society*
- b. Hasil penelitian dapat digunakan UIN Walisongo sebagai referensi bagi mereka yang ingin membacanya di perpustakaan UIN Walisongo dan sebagai dasar untuk penelitian yang akan datang
- c. Bagi Pemerintah, dapat dijadikan bahan masukan atau arahan kepada pemerintah ataupun masyarakat untuk meningkatkan pembangunan kota

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini, sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan kajian terhadap literatur yang relevan, yang dikenal dengan istilah "*literature review*". Tujuan dari kajian terhadap penelitian terdahulu ini adalah untuk memperoleh perspektif yang beragam, sehingga penulis dapat memposisikan hasil penelitian yang akan dilakukan. Topik tentang revitalisasi kota telah banyak diteliti oleh para akademisi sebelumnya, dan dalam penelitian ini, topik tersebut akan dikaji dalam dua tema utama, yakni *civil society* dan revitalisasi dalam pendekatan *civil society*. berikut merupakan beberapa tinjauan pustaka pada penelitian ini, yaitu :

Yang Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rusfiana dan Kurniasih (2024) dalam artikel "*The Role of Civil Society Organizations in Promoting Social and Political Change in Indonesia*" bertujuan untuk menjelaskan bagaimana organisasi masyarakat sipil (OMS) berperan dalam mendorong perubahan sosial dan politik di Indonesia. Penelitian ini menekankan bahwa *civil society* dapat berfungsi

sebagai agen transformasi sosial yang menjembatani kepentingan warga dengan pembuat kebijakan, melalui advokasi, aksi kolektif, dan pengawasan publik. Temuan ini relevan untuk penelitian yang dilakukan peneliti karena memperkuat argumen bahwa dalam konteks revitalisasi *heritage*, *civil society* memiliki potensi besar untuk mendorong keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan dan menjaga transparansi kebijakan. Referensi ini penting dalam membangun kerangka teoritis mengenai kekuatan sosial *civil society* di luar struktur negara.

Yang Kedua, jurnal Syamsir (2020) berjudul “*The Role of Civil Society in the Public Sector in Indonesia*”, dijelaskan bahwa *civil society* berperan sebagai pelaku utama dalam mengawasi kinerja pemerintah dan mendorong akuntabilitas. Studi ini menyoroti bahwa partisipasi masyarakat sipil tidak hanya berkaitan dengan kebijakan sosial, tetapi juga mencerminkan praktik demokrasi lokal. Meskipun tidak secara spesifik membahas kawasan *heritage*, gagasan dalam artikel ini berguna sebagai fondasi konseptual untuk memahami bagaimana *civil society* dapat menyeimbangkan relasi kuasa dalam proyek revitalisasi yang sering kali didominasi oleh aktor pemerintah dan swasta.

Yang Ketiga, Nasrolahi, Messina, & Gena, (2022) dalam studi berjudul “*A Model and Tool for Community Engagement in Heritage Site Management: The Case of Bisotun World Heritage Site*” mengembangkan model partisipasi berbasis komunitas dalam pengelolaan situs *heritage*. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan warisan budaya sangat bergantung pada seberapa besar pelibatan komunitas sejak tahap awal. Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada pendekatan partisipatoris yang digunakan, serta pentingnya *civil society* dalam mengorganisasi dan menyuarakan kebutuhan warga dalam tata kelola *heritage*.

Yang keempat, Hevearita Gunaryanti Rahayu (2023) dalam disertasinya, “Hepta Helix Collaborative Governance dalam Pengelolaan Situs Kota Lama Semarang”, mengkaji bentuk kolaborasi antara tujuh aktor utama (pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, LSM, media, dan Badan Pengelola Kawasan Kota Lama atau BPK2L) belum berjalan optimal. Ditemukan beberapa kendala utama seperti lemahnya koordinasi, dominasi pemerintah dalam pengambilan keputusan, belum terbentuknya komunitas kolaboratif, dan rendahnya motivasi partisipatif dari berbagai aktor. Namun, penelitian ini juga berhasil merumuskan model tata kelola kolaboratif berbasis nilai-nilai gotong royong dan tahapan kolaborasi yang melibatkan partisipasi

aktif dari seluruh aktor untuk mencapai tujuan bersama, termasuk target masuk dalam daftar *World Heritage* UNESCO.

Penelitian ini sangat relevan dengan penelitian peneliti yang mengkaji peran civil society dalam revitalisasi heritage di Kota Lama Semarang, terutama melalui studi terhadap komunitas AMBO. Disertasi ini memberikan kerangka aktor yang luas dan pendekatan multi-pihak (multi-stakeholder) yang bisa digunakan untuk memetakan posisi dan kontribusi civil society dalam konteks kolaborasi lintas sektor. Di sisi lain, penelitian peneliti dapat memperdalam dimensi partisipasi masyarakat sipil (*civil society*) dari sisi inisiatif akar rumput, termasuk peran komunitas dalam mendorong akuntabilitas, advokasi pelestarian, dan penguatan ruang publik deliberatif. Disertasi Rahayu menyediakan landasan teoretis dan praktis mengenai governance, sementara penelitian ini dapat mengisi celah pada sisi aktor non-negara, khususnya yang tidak memiliki kekuasaan struktural namun memainkan peran penting dalam revitalisasi berbasis nilai sosial dan budaya.

Yang Kelima, Penelitian oleh Surjadi. (2024) berjudul "*Collaborative Governance on Slum Upgrading in Cultural Heritage Area: Pulau Penyengat*" menunjukkan praktik kolaborasi lintas aktor dalam konteks revitalisasi kawasan heritage yang juga merupakan permukiman padat penduduk. Studi ini mengungkapkan bahwa *civil society* menjadi kekuatan penyeimbang dalam menyuarakan kepentingan masyarakat marginal. Artikel ini sangat relevan untuk memahami dinamika kekuasaan dalam proses revitalisasi yang rentan terhadap konflik kepentingan.

Yang keenam, Revitalisasi kawasan heritage menjadi salah satu pendekatan penting dalam menjaga nilai historis suatu wilayah sekaligus meningkatkan daya tarik wisata. Studi yang dilakukan oleh Kristian Buditiawan, Eko Budi Santoso, dan Siti Nurlaela (2024) dalam penelitian mereka yang berjudul "*Revitalisasi Makam Belanda di Peneleh Surabaya untuk Mendukung Urban Tourism Berdasarkan Persepsi Stakeholder*" menegaskan bahwa revitalisasi tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kualitas fisik situs warisan, tetapi juga untuk memberikan dampak positif bagi komunitas lokal dan meningkatkan pengalaman wisatawan. Dengan demikian, revitalisasi heritage dapat menjadi instrumen strategis dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Yang Ketujuh, penelitian Nala Bahari (2023) dalam "*Kebijakan Revitalisasi Cagar Budaya Kota Lama Semarang dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan*"

menyoroti peran pemerintah Kota Semarang dalam pengelolaan kawasan heritage. Salah satu regulasi yang menjadi acuan dalam revitalisasi adalah Peraturan Daerah (PERDA) No. 2 Tahun 2020 yang mengatur pengelolaan kawasan cagar budaya. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan utama, seperti minimnya keterbukaan informasi dan kurangnya forum diskusi yang melibatkan masyarakat secara aktif. Kurangnya transparansi informasi serta dominasi pemerintah dalam proses pengambilan keputusan menghambat penerapan tata kelola yang partisipatif dan demokratis.

Yang Kedelapan, penelitian oleh Audyna Nirwanda (2022) yang berjudul "*Dinamika Revitalisasi Ruang Publik Perkotaan (Studi Kasus: Kawasan Urban Heritage Jalan Tunjungan, Kota Surabaya)*". Studi ini menegaskan bahwa penerapan prinsip demokrasi deliberatif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif melalui interaksi dialogis antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Dengan demikian, kolaborasi antar aktor dalam musyawarah yang demokratis dapat menciptakan kebijakan revitalisasi yang mencerminkan kebutuhan masyarakat secara lebih adil.

Berbagai temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah ditinjau oleh penulis menunjukkan adanya perbedaan dengan topik penelitian yang sedang dianalisis. Hasil kajian menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya lebih banyak membahas revitalisasi kota dalam pelestarian kawasan budaya melalui kebijakan dan partisipasi aktif. Bentuk partisipasi ini meliputi kegiatan non-fisik seperti festival, pameran, dan edukasi budaya, yang mencerminkan kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan. Sementara itu, kegiatan fisik dilakukan pemerintah sebagai pengatur kebijakan dan penyedia dana. Namun, partisipasi masyarakat sering kali terbatas pada tahap implementasi kebijakan, tanpa keterlibatan yang signifikan dalam proses perumusan regulasi, sehingga menciptakan kesenjangan dalam kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Perbedaan ini jelas terlihat apabila dibandingkan dengan kajian yang penulis lakukan mengenai *civil society* pada revitalisasi kota.

Studi penelitian diatas memiliki kesamaan dengan kajian penulis yakni mengenai dinamika politik yang terjadi pada revitalisasi kota. Namun terdapat pembeda dengan kajian penelitian yang dilakukan penulis yang mana penelitian ini mengkaji penerapan prinsip-prinsip *civil society*, dengan menitikberatkan pada pola interaksi dan partisipasi antara AMBO. Fokus ini

bertujuan untuk memahami bagaimana peran *civil society* dapat memengaruhi dinamika dan transformasi hubungan antara kedua pihak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis, yang berarti data yang diperoleh disajikan dalam bentuk narasi atau penjelasan, bukan dalam angka. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk deskriptif, baik berupa kata-kata tertulis, lisan, maupun perilaku yang diamati. Sementara itu, penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu fenomena, baik yang terjadi secara alami maupun yang merupakan hasil intervensi manusia (Sugiyono, 2017). Dengan demikian, penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti tindakan, perilaku, dan persepsi, yang diuraikan secara analitis menggunakan bahasa dalam konteks yang alami dan melalui pendekatan ilmiah (Sugiyono, 2017).

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis pendekatan, yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian yang dilakukan oleh penulis termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Hal ini berarti peneliti terlibat langsung dengan objek yang diteliti, berinteraksi, dan berpartisipasi dalam kelompok masyarakat guna memahami serta menggali fenomena yang sedang dianalisis. Pendekatan penelitian lapangan memungkinkan pengumpulan data yang lebih valid dan mendalam karena diperoleh langsung dari narasumber atau informan yang merupakan objek penelitian.

Pendekatan dalam penelitian ini melalui pendekatan studi kasus. Pendekatan tersebut untuk mempelajari, menerangkan, serta menginterpretasi suatu kasus dalam konteks alamiah tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Penelitian studi kasus adalah suatu pendekatan penelitian yang bersifat terperinci, menyeluruh, intensif, dan mendalam,

yang bertujuan untuk menganalisis suatu kasus atau fenomena tertentu (Rahmad, dkk, 2024). Pendekatan studi kasus fokus pada pengkajian mendalam terhadap satu objek yang diteliti, guna memahami realitas di balik fenomena yang terjadi. Dalam konteks ini, diperlukan analisis yang cermat terhadap berbagai faktor yang berkaitan dengan fenomena tersebut agar hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang akurat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis yang berbasis pada penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan analisis. Penulis mengkaji fenomena revitalisasi Kota Lama Semarang tahun 2019-2024. Alasan objek ini diangkat karena penulis ingin mengetahui tentang peran AMBO sebagai *civil society*, serta untuk mengetahui dampak partisipasi mempengaruhi interaksi dan kontribusi AMBO sebagai *civil society* dalam revitalisasi dari perspektif ilmu politik. Oleh sebab itu, fenomena tersebut ditelaah secara mendalam dan dideskripsikan berupa uraian atau kata-kata.

2. Sumber dan Jenis Data

Didalam penelitian ini mempergunakan data yang bersifat primer serta yang bersifat sekunder, antara lain seperti di bawah ini:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan metode lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang berasal dari wawancara dengan informan atau narasumber yang dilaksanakan di Kota Lama Semarang dengan anggota aktif AMBO Kota Lama yang terlibat langsung dalam advokasi revitalisasi, serta pihak-pihak yang terdampak langsung oleh kebijakan revitalisasi, termasuk pemilik usaha dan pemilik gedung di kawasan Kota Lama.

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh melalui sumber tidak langsung, yang meliputi dokumentasi dan arsip resmi. Data

ini diperoleh dari penelitian pustaka, yang mencakup literatur, dokumen, buku, serta bahan tertulis lain yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai teori yang diharapkan dapat mendukung pengumpulan dan pengolahan data yang lebih lanjut dalam penelitian. Data-data yang dibutuhkan mencakup dokumen resmi, seperti; regulasi, Peraturan Daerah, Laporan Kebijakan, atau berita terkait revitalisasi Kota Lama guna menyediakan kerangka hukum, kebijakan, serta fakta-fakta objektif dari fenomena.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memanfaatkan teknik untuk pengumpulan data seperti dibawah ini:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi komunikasi antara peneliti dan sumber data primer dalam bentuk dialog (tanya jawab) secara lisan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Sugiyono merujuk pada pandangan Esterberg, wawancara merupakan suatu bentuk interaksi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi tertentu, di mana proses ini melibatkan dua pihak utama. Pihak pertama adalah pewawancara (interviewer), yang berperan dalam mengajukan pertanyaan, sementara pihak kedua adalah responden (interviewee), yang bertugas memberikan jawaban berdasarkan pertanyaan yang diajukan (Sugiyono, 2017). Tujuan dari pelaksanaan wawancara adalah untuk memperoleh data yang kaya dari opini, perasaan, dan emosi informan, sehingga peneliti dapat memahami budaya yang dimaksud melalui ekspresi atau bahasa yang disampaikan. Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*), di mana pewawancara dan informan berinteraksi langsung, baik dengan menggunakan pedoman wawancara atau tanpa pedoman, serta melibatkan informan yang memiliki keterlibatan lama dalam kehidupan

sosial yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali informasi secara detail, terperinci, dan mendalam terkait dengan topik penelitian.

Teknik pelaksanaan wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat sistematis dan terstruktur. Peneliti menggunakan pedoman wawancara dengan menyusun serangkaian pertanyaan yang akan diajukan kepada informan atau narasumber. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga fokus percakapan agar tetap terarah, sehingga jika jawaban narasumber menyimpang dari konteks, dapat segera dikembalikan ke jalur yang sesuai. Dalam studi ini, penulis memilih metode wawancara mendalam dengan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan terstruktur untuk diperoleh informasi dari informan. Informan tersebut terdiri dari Anggota aktif AMBO Kota Lama yang terlibat langsung dalam advokasi revitalisasi, serta pihak-pihak yang terdampak langsung oleh kebijakan revitalisasi, termasuk pemilik usaha dan pemilik gedung di kawasan Kota Lama dalam kajian *civil society* melalui revitalisasi Kota Lama Semarang. Para informan atau narasumber akan diajukan pertanyaan terkait dengan proses revitalisasi, pengaruh yang dirasakan oleh masyarakat setempat akibat program tersebut, serta dinamika politik yang terjadi di antara para pemangku kepentingan dalam upaya revitalisasi.

b. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Menurut Denzin & Lincoln, dengan merujuk pada pandangan Gardner, observasi kualitatif berfungsi untuk memahami suatu latar dalam berbagai pendekatan, yaitu objektif, interpretatif interaktif, dan interpretatif berbasis data (*grounded*). Metode ini memungkinkan peneliti untuk secara fleksibel mengeksplorasi konsep serta kategori dalam setiap kejadian yang diamati. Dari kejadian tersebut diinterpretasikan secara teoritis dan rinci sehingga mendapatkan gambaran akan penjelasan dan kesimpulan yang memadai (Denzin & Lincoln, 2005).

Dari berbagai macam observasi, peneliti menggunakan observasi partisipasi yakni teknik pengamatan secara langsung dilapangan dengan melibatkan dirinya dengan kelompok yang diteliti baik sebagai pengamat maupun partisipasi dengan belajar pada kelompok tersebut. Dalam hal ini, peneliti yang sedang melakukan observasi turut andil pada bagian kehidupan masyarakat yang diobservasi (Sugiyono, 2017). Hal ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih jauh dan mendalam tentang topik penelitian yang tengah dikaji. Peneliti menyelidiki perilaku individu dalam kehidupan sosial seperti cara hidup, hubungan dengan masyarakat, dan sebagainya. Pada penelitian ini, penulis terjun langsung di Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah sebagai objek observasi penelitian dimana penulis mengobservasi revitalisasi kawasan Kota Lama Semarang, berpartisipasi maupun pengamat pada kegiatan rapat atau sosialisasi revitalisasi, serta kegiatan *civil society* di Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

c. Studi Dokumen dan Literatur

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen atau arsip yang relevan dengan kebutuhan penelitian, yang selanjutnya akan dianalisis untuk mendukung pemahaman dan temuan dalam penelitian tersebut (Sugiyono, 2017). Dengan demikian, dokumentasi tidak hanya terbatas pada pengambilan foto sebagai bukti, melainkan mencakup juga pengumpulan dan analisis dokumen atau arsip yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan berbagai dokumen dari kawasan Kota Lama Semarang berupa dokumen kebijakan dan regulasi terkait revitalisasi, profil, dan keterlibatan AMBO dalam program revitalisasi, arsip hasil revitalisasi. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui dinamika dan keterlibatan AMBO dalam pembangunan kawasan Kota Lama Semarang sehingga dapat memperkuat hasil penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Penggunaan teknik dalam penelitian ini merujuk pada metode analisis data model dan (dalam) yang digunakan untuk mengolah informasi secara sistematis dan terstruktur. Proses analisis pada data kualitatif akan dilaksanakan berdasarkan tiga tahapan, seperti dibawah ini:

a. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada tahap pengolahan data mentah yang berlangsung selama penelitian di lapangan. Pada tahap ini, informasi yang terkumpul diseleksi, disederhanakan, dan diringkas, dengan mengeliminasi data yang tidak relevan. Proses ini menghasilkan rangkuman dalam bentuk konsep, kategori, dan tema-tema yang relevan.

b. Penyajian Data

Penyajian data yang dilakukan dalam uraian hasil wawancara yang telah diolah disajikan dalam bentuk ringkas untuk mempermudah pemahaman peneliti terhadap situasi yang terjadi. Penjelasan singkat tersebut kemudian diperkuat dengan narasi yang didukung oleh dokumentasi yang relevan, guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti akan melakukan analisis berdasarkan dari data yang telah di kumpulkan sebelumnya. Teori yang digunakan adalah teori *civil society* untuk menemukan bentuk, pola, kategori, fokus atau bentuk tema agar sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Pada analisis data yang dilakukan oleh penulis, metode yang digunakan memiliki kesamaan dengan langkah-langkah analisis data yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan mencatat data atau informasi yang didapat dari sumber data primer maupun sekunder diantaranya wawancara, buku, jurnal, dan sebagainya.
- b. Melakukan penyaringan data dengan mengeliminasi serta memilah informasi yang tidak relevan atau tidak terstruktur dengan baik.

- c. Menyajikan data hasil temuan penulis dalam bentuk teks naratif.
- d. Menganalisis temuan, menyusun kesimpulan, dan memverifikasi data guna memastikan keakuratan serta konsistensi hasil penelitian.
- e. Mendapatkan data yang valid.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembaca dapat memahami isi skripsi dengan baik dan memperoleh gambaran secara menyeluruh, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Penjelasan di atas telah menguraikan latar belakang yang melatarbelakangi pemilihan tema yang diangkat oleh penulis, yaitu peran AMBO dalam revitalisasi kawasan cagar budaya di Kota Lama Semarang tahun 2019-2024. Kemudian, penulis merumuskan dua pertanyaan penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Tujuan serta manfaat penelitian dijelaskan baik dari perspektif teoretis maupun praktis. Penulis juga mengkaji karya-karya penelitian sebelumnya oleh para peneliti lain untuk memperoleh sudut pandang yang berbeda, yang dikenal dengan tinjauan pustaka. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan teknik atau metode tertentu untuk mengumpulkan data yang akan dianalisis.

BAB II TEORI CIVIL SOCIETY

Bab kedua memaparkan uraian teoretis yang relevan dengan objek penelitian yang mana penelitian ini akan mengkaji partisipasi komunitas dalam teori *civil society*. Penulis merujuk teori *civil society* pada buku Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society* serta buku penunjang lainnya yang masih memiliki korelasi dengan teori tersebut.

BAB III GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG

Bab ketiga memuat gambaran secara umum tentang objek yang akan diteliti. Gambaran tersebut meliputi kondisi geografis, demografi, sosial budaya, ekonomi, serta struktur politik lembaga. Pada penelitian ini akan menggambarkan kondisi Kawasan Kota Lama, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah sebagai objeknya. Selain itu, terdapat profil AMBO Kota Lama selaku *stakeholder* yang menjadi informan peneliti.

BAB IV PERAN AMBO SEBAGAI CIVIL SOCIETY DALAM REVITALISASI KOTA LAMA SEMARANG

Bagian ini secara khusus menjelaskan jawaban dari rumusan masalah yang tertera pada bab pertama. Dalam hal ini, akan dijawab pertanyaan mengenai peran AMBO sebagai *civil society* dalam pengambilan keputusan terkait revitalisasi di Kota Lama Semarang. Aktivitas dan inisiatif AMBO yang ikut berpartisipasi aktif dalam proses revitalisasi dianalisa dan dinarasikan secara deskriptif. Selain itu berisi jawaban atas rumusan masalah yang kedua yakni dampak fisik, sosial, dan ekonomi terkait kontribusi AMBO dalam revitalisasi kawasan cagar budaya Kota Lama, Semarang. Dalam hal ini, data wawancara yang telah dikumpulkan dari para informan atau narasumber yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu untuk memastikan relevansi dan validitas data yang diperoleh. Informan tersebut terdiri dari Anggota aktif AMBO Kota Lama yang terlibat langsung dalam advokasi revitalisasi, pihak-pihak lain yang terdampak langsung oleh kebijakan revitalisasi di kawasan Kota Lama diulas dan dipaparkan guna mengetahui kontestasi politik yang terjadi pada revitalisasi Kawasan Kota Lama sebagai program dari pemerintah. Kemudian, hasil pembahasan tersebut akan dikorelasikan dengan teori yang telah diulas diatas yakni teori *civil society*.

BAB V ANALISIS DATA

Analisis data merupakan proses pengolahan, interpretasi, dan evaluasi data yang telah dikumpulkan dengan tujuan menjawab pertanyaan penelitian atau

mencapai sasaran tertentu. Dalam penelitian, analisis data bertujuan untuk mengungkap pola, hubungan, atau tren yang relevan dengan masalah atau hipotesis yang sedang dikaji. Proses ini melibatkan langkah-langkah seperti pengolahan data mentah, pengelompokan informasi, penerapan teknik analisis tertentu, dan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh. Metode analisis yang diterapkan dapat berupa pendekatan kualitatif deskriptif analisis, kualitatif deskriptif analisis merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh yang nantinya dikorelasikan dengan teori *civil society* oleh Muhammad AS Hikam untuk melihat bagaimana dinamika interaksi politik yang terjadi dalam revitalisasi Kota Lama, Semarang.

BAB VI PENUTUP

Bab terakhir dari penelitian ini mencakup bagian kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Kesimpulan merangkum inti temuan penelitian, baik secara teoretis maupun empiris, yang diperoleh berdasarkan analisis data. Sementara itu, saran atau rekomendasi berisi usulan atau pandangan peneliti yang ditujukan kepada berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini melalui penerapan kebijakan atau pelaksanaan penelitian lanjutan. Dalam hal ini, peneliti menarik kesimpulan dari pembahasan tentang peran *civil society*, AMBO dalam revitalisasi Kota Lama Semarang. Sedangkan perihal saran, peneliti memberikan pandangannya pada AMBO untuk memperkuat perannya dalam bidang manajemen komunitas, advokasi kebijakan, serta pemasaran pariwisata berbasis *heritage*. selain itu, untuk rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, untuk mengkaji lebih dalam di bidang revitalisasi *heritage* terkait efektivitas berbagai model partisipasi *civil society* dalam pengelolaan *heritage*.

BAB II

TEORI CIVIL SOCIETY

A. Definisi Konsep

1. Konsep Peran

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan dimensi dinamis dari suatu status atau kedudukan sosial. Apabila seorang individu mampu melaksanakan hak serta kewajiban yang melekat pada posisinya dalam struktur sosial, maka individu tersebut dianggap telah menjalankan perannya. Dengan kata lain, peran mencerminkan sisi aktif dari suatu kedudukan, sedangkan status merujuk pada seperangkat hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang. Pemenuhan hak dan kewajiban secara tepat oleh individu sesuai dengan kedudukannya menunjukkan bahwa ia telah menjalankan fungsi sosialnya (Soekanto, 2002).

Menurut Biddle dan Thomas, dalam bukunya *Role Theory: Concepts and Research*, peran didefinisikan sebagai seperangkat norma yang berkaitan dengan suatu posisi dalam suatu kelompok atau sistem sosial, yang berfungsi untuk membimbing dan mengarahkan perilaku individu. Mereka menekankan bahwa peran bukan sekadar tindakan personal, melainkan konstruk sosial yang merefleksikan harapan kolektif masyarakat terhadap orang yang menduduki posisi tertentu (Biddle dan Thomas, 1966). Biddle dan Thomas mengkategorikan konsep *role* ke dalam empat aspek utama. Pertama, individu yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial. Kedua, sikap atau pola perilaku yang ditunjukkan selama proses interaksi berlangsung. Ketiga, status sosial yang melekat pada individu dalam konteks perilaku tersebut. Dan keempat, hubungan yang terjalin antara individu dan perilakunya dalam struktur sosial yang lebih luas.

Soekanto menguraikan bahwa unsur-unsur peran meliputi sifat dinamis dari suatu jabatan, seperangkat hak dan kewajiban, perilaku sosial yang ditampilkan oleh pemegang jabatan, serta aktivitas nyata yang dilakukan oleh individu. Dalam pengertian simbolik, peran juga dapat dianalogikan seperti aktor yang memainkan perannya di atas panggung drama. Dalam konteks sosial, hal ini berarti bahwa peran mencerminkan fungsi yang dijalankan individu sesuai dengan posisi yang didudukinya dalam suatu tatanan sosial (Soekanto, 2002). Soejono Soekanto menyebutkan peranan mencakup dalam tiga hal, yaitu

1. Peranan yang mencakup norma-norma yang membimbing seseorang untuk bertindak sesuai dengan status sosialnya. Dalam hal ini, peranan berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengarahkan individu dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Norma-norma tersebut dibagi menjadi empat kategori, yakni (Soekanto, 2012):
 - a. *Usage* atau cara, yang lebih menekankan pada hubungan interpersonal antarindividu. Pelanggaran terhadap norma ini umumnya tidak menimbulkan sanksi yang berat, namun dapat memicu reaksi sosial berupa celaan atau teguran dari individu lain yang terlibat dalam interaksi.
 - b. *Folkways* atau kebiasaan, yaitu perilaku yang dilakukan secara berulang dalam konteks aktivitas tertentu sehingga menimbulkan persepsi kolektif bahwa masyarakat menyukai dan menyetujui pola perilaku tersebut
 - c. *Mores* atau Tata, yaitu Kelakuan merupakan cerminan dari karakteristik kelompok sosial tertentu yang berperan sebagai mekanisme pengawasan sosial, yang dijalankan oleh masyarakat terhadap perilaku anggotanya.
 - d. *Custom* atau Adat, yaitu Istiadat merujuk pada perilaku yang telah berlangsung secara turun-temurun dan berkaitan erat dengan pola kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Adat ini memiliki daya ikat yang kuat karena telah menjadi bagian dari sistem nilai sosial.
2. Peran juga berkaitan erat dengan fungsi individu dalam sistem sosial
3. Peran juga berkaitan tentang pentingnya perilaku individu dalam struktur sosial masyarakat.

Beberapa dimensi dari konsep peran dapat dijelaskan sebagai berikut (Horoepoetri & Santosa, 2003):

1. Peran sebagai kebijakan, dipahami sebagai bentuk kebijaksanaan yang dinilai tepat dan layak untuk dilaksanakan dalam konteks sosial tertentu.
2. Peran sebagai strategi, menunjukkan bahwa peranan dapat difungsikan sebagai pendekatan untuk membangun dan memperoleh dukungan dari masyarakat.
3. Peran sebagai alat komunikasi, menggambarkan fungsi peran sebagai sarana untuk memperoleh masukan berupa saran, opini, atau informasi yang mendukung proses pengambilan keputusan. Dimensi ini berasal dari pandangan yang menempatkan pemerintah sebagai pelayan masyarakat, sehingga aspirasi warga menjadi elemen penting dalam menentukan arah kebijakan publik.
4. Peran sebagai sarana penyelesaian sengketa, merujuk pada peran sebagai medium dalam menyelesaikan konflik sosial melalui proses konsensus atas beragam perspektif yang muncul dalam masyarakat. Pandangan ini berpijak pada asumsi bahwa dialog dan pertukaran pandangan antarpihak mampu membangun pemahaman bersama dan memperkuat kohesi sosial.

Berdasarkan penjabaran dimensi-dimensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep peran tidak hanya menyangkut posisi individu dalam struktur sosial, tetapi juga mencakup ekspektasi terhadap perilaku yang sesuai dengan posisi tersebut. Setiap individu pada dasarnya terlibat dalam relasi sosial yang kompleks, sehingga peran menjadi wujud konkret dari kesadaran atas posisi sosialnya. Dalam konteks ini, individu secara aktif berusaha menampilkan kapasitas dan kompetensi agar diakui sebagai aktor yang mampu menjalankan peran sosialnya secara efektif.

2. **Civil Society**

Secara etimologis, istilah civil society berasal dari kata Latin *civitas dei* yang berarti "kota ilahi" dan *society* yang mengacu pada komunitas atau masyarakat. Seiring perkembangan makna, istilah *civil* kemudian melahirkan kata *civilization* yang menunjuk pada konsep peradaban. Oleh karena itu, *civil*

society dapat dipahami sebagai komunitas masyarakat yang telah mencapai tingkat peradaban tertentu, atau sering pula disebut sebagai masyarakat madani yakni masyarakat yang berperadaban dan hidup dalam tatanan yang berlandaskan nilai-nilai kemajuan dan keteraturan sosial.

Secara historis, gagasan tentang *civil society* telah muncul sejak era Yunani kuno, terutama dalam pemikiran politik Cicero (106–43 SM). Pada masa itu, *civil society* disamakan dengan negara sebagai entitas dominan yang mengatur komunitas lainnya. Namun, memasuki abad ke-18, pemaknaannya mengalami transformasi signifikan, yakni menjadi suatu ranah sosial yang berdiri di luar struktur negara dan bersifat mandiri serta demokratis. Dalam pengertian ini, *civil society* dianggap sebagai ruang tempat masyarakat berinteraksi secara egaliter untuk memperjuangkan kepentingan bersama di luar kendali negara.

Suatu masyarakat dapat dikategorikan sebagai *civil society* apabila menunjukkan karakter keterbukaan, kesetaraan, serta terbebas dari dominasi maupun intervensi negara. Dalam perkembangan pemikirannya, konsep masyarakat sipil kerap dikaitkan dengan asal-usul negara atau masyarakat politik yang berangkat dari gagasan kontrak sosial, sebagaimana dirumuskan oleh pemikir-pemikir klasik seperti Thomas Hobbes (1558–1679), John Locke (1632–1704), dan Jean-Jacques Rousseau (1712–1778).

Rousseau dan Locke memandang masyarakat sipil sebagai bentuk kehidupan beradab yang mengedepankan keteraturan hukum demi menjamin keberlangsungan hidup warganya, sejalan dengan pandangan Aristoteles dan Cicero mengenai pentingnya suatu tatanan masyarakat yang mendukung kehidupan bersama dalam kerangka hukum yang adil. Sebaliknya, Hobbes melihat masyarakat sipil sebagai entitas yang identik dengan negara, yang lahir dari kebutuhan akan kekuasaan absolut guna mencegah kekacauan dan konflik antarindividu. Dalam pandangannya, masyarakat sipil dibentuk agar mampu mengendalikan dan mengawasi perilaku politik masyarakat demi menghindari anarki. Sementara itu, Locke memiliki pandangan berbeda dengan menekankan bahwa masyarakat sipil harus berperan dalam melindungi kebebasan individu serta menjamin hak kepemilikan, sehingga keberadaannya tidak boleh bersifat absolut, melainkan demokratis dan partisipatif (Tester, 2014)

Istilah ini kemudian berkembang dalam tradisi pemikiran politik Eropa dan digunakan untuk merujuk pada entitas sosial yang terdiri atas warga negara yang

berinteraksi secara bebas, rasional, dan otonom di luar struktur negara maupun pasar. Konsep *civil society* mengalami perkembangan signifikan di Eropa pada abad ke-17 hingga ke-18. Para pemikir seperti John Locke, Adam Ferguson, dan Immanuel Kant mulai merumuskan ide bahwa manusia bukan sekadar subjek kekuasaan negara, melainkan individu yang memiliki nalar, kebebasan, dan hak-hak sipil yang melekat secara kodrati. Dalam konteks ini, *civil society* dilihat sebagai ruang moral dan politik di mana individu bebas membentuk asosiasi, menyampaikan pendapat, dan terlibat dalam diskursus publik. Pada masa itu pula, berkembang gagasan bahwa negara yang absolut dan represif perlu dibatasi oleh kekuatan sosial dari warga negara yang terorganisasi secara mandiri.

Dalam pengertian umum, *civil society* dipahami sebagai masyarakat sipil yang tidak berada di bawah kendali langsung negara, namun juga bukan bagian dari pasar ekonomi. Keberadaannya ditandai oleh kapasitas kolektif warga negara dalam mengorganisasi diri secara mandiri guna memperjuangkan kepentingan bersama, menyuarakan aspirasi, serta melakukan pengawasan terhadap negara melalui cara-cara non-kekerasan dan demokratis. Karakteristik ini menjadikan masyarakat sipil sebagai salah satu pilar utama dalam kehidupan demokratis yang sehat.

Memasuki abad ke-20, konsep *civil society* kembali menjadi perhatian utama dalam teori politik, terutama sebagai respons terhadap kegagalan negara otoriter dan transisi menuju demokrasi di banyak negara. Dalam konteks inilah, Jorgen Habermas mengembangkan konsep “ruang publik” (*public sphere*) yang sangat berpengaruh, di mana masyarakat sipil menjadi arena rasional dan terbuka untuk membahas masalah publik secara kritis, bebas dari dominasi negara dan pasar.

Lebih lanjut, Muhammad As-Hikam, menjelaskan bahwa *civil society* merupakan ruang publik yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial secara mandiri, tanpa intervensi negara, serta berorientasi pada kepentingan publik. Dalam kerangka ini, masyarakat sipil beroperasi secara independen dari pemerintah maupun sektor bisnis, namun tetap memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan kebijakan publik serta tata kelola sosial (Hikam, 2000).

Sedangkan Antonio Gramsci, mengajukan pandangan yang berbeda terkait *civil society*. Dalam *Selections from the Prison Notebooks*, ia menggambarkan masyarakat sipil sebagai arena hegemonik, di mana ideologi dominan dapat dipertahankan atau ditentang oleh kelompok sosial tertentu. Gramsci menekankan bahwa *civil society* tidak hanya berfungsi sebagai wadah kebebasan berserikat dan berekspresi, tetapi juga sebagai medan pertarungan ideologis antara kelas sosial yang berkuasa dan kelompok yang berupaya melakukan perlawanan. Dalam perspektif ini, *civil society* dapat menjadi instrumen berbagai kelompok sosial yang berada pada lapisan bawah untuk melakukan gerakan perlawanan serta menciptakan hegemoni tandingan (*counter hegemony*)

Civil society secara umum merujuk pada ruang sosial yang berada di luar struktur negara dan pasar, di mana individu maupun kelompok warga berinteraksi secara sukarela untuk mengejar tujuan bersama yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam pemikiran klasik Alexis de Tocqueville (1835), *civil society* dipandang sebagai kekuatan sosial yang mampu menjadi penyeimbang kekuasaan negara dan memperkuat praktik demokrasi. Tocqueville dalam *Democracy in America*, memaknai “*civil society commonly referred to as the 'third' or 'non-profit' sector, civil society in this sense contains all associations and networks between the family and the state in which membership and activities are 'voluntary'*” (Tocqueville, 1835).

Di sisi lain, John Keane merumuskan civil society sebagai organisasi-organisasi non-pemerintah yang memiliki perlindungan hukum, bersifat otonom dalam pengelolaan internal, serta mampu membangun hubungan interaktif dengan negara (Edwards, 2004).

Menurut Cohen dan Arato dalam karya mereka *Civil Society and Political Theory* (1992), masyarakat sipil tidak hanya berperan sebagai aktor sosial, tetapi juga sebagai penghasil ruang publik politis. Ruang publik ini terbentuk melalui keterlibatan aktor-aktor masyarakat sipil dan ditandai oleh adanya “pluralitas” yang mencakup entitas seperti (keluarga, kelompok informal, dan organisasi sukarela; “publisitas” yang diwujudkan melalui peran media massa dan institusi budaya); “privasi” yang berkaitan dengan aspek (moral serta pengembangan diri);

dan “legalitas” yang mencerminkan keberadaan struktur hukum serta perlindungan hak-hak dasar.

Cohen dan Arato mengkritik pendekatan yang terlalu menekankan pemisahan tegas antara ranah masyarakat sipil dan negara, karena hal ini cenderung menyederhanakan dinamika yang lebih kompleks. Mereka menekankan pentingnya mempertimbangkan keberadaan dua ranah lain yang tak kalah signifikan, yakni masyarakat politik dan masyarakat ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan dikotomis antara masyarakat sipil dan negara dinilai mengabaikan interaksi yang terjadi antara masyarakat sipil dengan kedua ranah tersebut. Dalam kerangka ini, masyarakat sipil diposisikan sebagai fondasi kritis yang dapat memberikan koreksi terhadap praktik demokrasi liberal maupun sistem otoriter. Dengan demikian, keberadaan masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam mendorong konsolidasi demokrasi di suatu negara (Cohen & Arato, 1992; Culla, 2006).

3. Revitalisasi Heritage

Merujuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Revitalisasi adalah interaksi, strategi, demoktrasi memulihkan atau mengingatkan. sedangkan menurut Burra Charter, revitalisasi merupakan upaya mengadaptasi suatu kawasan agar dapat dimanfaatkan untuk fungsi yang lebih sesuai dengan kebutuhannya, tanpa melakukan perubahan signifikan atau dengan hanya melakukan modifikasi kecil yang berdampak minimal (Burra Charter, 1981).

Sejalan dengan pemikiran tersebut, revitalisasi merupakan suatu proses transformasi atau pembaruan terhadap suatu kawasan guna mengoptimalkan pemanfaatannya sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan dengan tetap mempertahankan ciri khas kawasan tersebut serta menerapkan penyesuaian secara terbatas agar perubahan yang terjadi tidak menimbulkan dampak yang signifikan (Sonaesti & Purwanto, 2022)

Sementara itu, Tiesdell, Oc, & Heath, mengartikan revitalisasi sebagai proses transformasi yang bertujuan mengembalikan daya tarik suatu tempat melalui strategi perbaikan lingkungan fisik, ekonomi, dan sosial. Definisi ini menekankan bahwa revitalisasi bukan sekadar upaya estetika, tetapi juga harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi kawasan tersebut (Tiesdell, Oc, & Heath, 1996).

Sementara itu, merujuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), warisan budaya atau *Heritage* dalam hasil budaya masa lampau yang memiliki nilai penting bagi suatu bangsa dan menjadi identitas bangsa tersebut. Pengertian ini sejalan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, warisan budaya mencakup semua peninggalan budaya benda (*tangible*) dan tak benda (*Intangible*) yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan. Pemahaman tersebut diperkuat dengan definisi dari UNESCO “*Cultural heritage is the legacy of physical artifact and intangible attributes of a group or society that are inherited from past generations*” (Unesco 2003).

Revitalisasi kawasan warisan budaya harus memperhatikan prinsip keberlanjutan agar manfaat yang dihasilkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga dapat diwariskan kepada generasi mendatang (Timothy & Boyd, 2003). Transformasi kawasan ini memiliki dimensi historis yang berlangsung dalam rentang waktu tertentu, mencerminkan perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern (Hardati, 2011). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, upaya revitalisasi Situs Cagar Budaya maupun Kawasan Cagar Budaya harus memperhitungkan aspek tata ruang, tata letak, fungsi sosial, serta keaslian lanskap budaya berdasarkan hasil evaluasi yang komprehensif.

Revitalisasi mencakup restrukturisasi fungsi ruang, penguatan nilai budaya, serta optimalisasi penyebaran informasi mengenai Cagar Budaya. Selain itu, revitalisasi harus berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus menjaga identitas budaya lokal. Dalam implementasinya, perubahan yang dilakukan hendaknya tidak bersifat drastis, sehingga tetap memungkinkan pemanfaatan yang selaras dengan kebutuhan yang lebih kontekstual (Sonaesti & Purwanto, 2022).

Proses revitalisasi berdampak pada perubahan atau transformasi kawasan, baik aspek fisik maupun non-fisik, tetapi juga membangun kembali dinamika sosial dan ekonomi dalam suatu kawasan. Salah satu aspek fisik yang dipengaruhi oleh revitalisasi yaitu pemanfaatan ruang dimana merupakan persebaran kegiatan budidaya dan kawasan lindung untuk mewujudkan tujuan pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya sesuai potensi sumber daya alam, manusia, dan buatan (Chamdany, 2004). Hal ini sejalan dengan pandangan Shin (2010), Jacobs (1961) dan Chamdany (2004), yang menekankan bahwa revitalisasi kota harus

mempertimbangkan aspek kehidupan sosial masyarakat setempat agar tetap berkelanjutan.

Dalam upaya pelestarian kawasan bersejarah, pendekatan revitalisasi tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik bangunan, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial, budaya dan ekonomi yang melekat didalamnya. revitalisasi *heritage* menurut konsep Asworth, menekankan pentingnya pengelolaan heritage secara holistik melalui integrasi berbagai paradigma pelestarian. merujuk pada pentingnya mengabungkan indikator revitalisasi yang tidak bersifat teknis, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan dan partisipasi. berdasarkan pemikiran tersebut membedakan tiga paradigma utama dalam pengelolaan heritage (Ashworth & Tunbridge, 1990):

a. Pelestarian murni (*Preservation*)

Pendekatan preservation dalam revitalisasi heritage berfokus pada upaya melindungi bentuk asli dan fisik bangunan warisan budaya dari kerusakan maupun perubahan yang dapat mengganggu keasliannya. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah mempertahankan autentisitas bangunan, tanpa mengubah fungsi awalnya. Indikator yang dapat digunakan dalam paradigma ini meliputi: bangunan tidak mengalami modifikasi signifikan, penggunaan material asli seperti batu, kayu, dan genteng kuno tetap dipertahankan, serta adanya dokumentasi dan pemeliharaan yang dilakukan secara berkelanjutan.

b. Pelestarian adaptif (*conservation*)

Paradigma *conservation* atau pelestarian adaptif dalam revitalisasi heritage menekankan pentingnya menjaga nilai historis suatu bangunan sambil tetap membuka ruang bagi penyesuaian fungsi sesuai kebutuhan masa kini, yang sering disebut sebagai *adaptive reuse*. Pendekatan ini memandang warisan budaya sebagai ruang yang hidup dan dinamis, bukan sekadar objek statis yang dibekukan dalam waktu. Indikator revitalisasi dalam paradigma ini mencakup pemanfaatan kembali bangunan heritage untuk fungsi baru seperti kafe, museum, atau ruang galeri; desain baru yang menyatu secara harmonis dengan elemen asli bangunan; peningkatan aksesibilitas melalui penambahan fasilitas seperti jalur kursi roda atau pencahayaan modern; serta adanya keseimbangan antara pelestarian nilai historis dengan produktivitas ekonomi. Misalnya, sebuah gudang tua dapat

diubah menjadi ruang kreatif tanpa menghilangkan ciri khas arsitektur aslinya seperti fasad atau struktur utama bangunan.

c. Perencanaan berbasis warisan (*heritage planning*)

Pendekatan *heritage planning* atau perencanaan berbasis warisan menempatkan pelestarian warisan budaya sebagai bagian integral dalam kebijakan pembangunan kota secara menyeluruh. Pendekatan ini bersifat strategis karena mencakup dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan tata ruang secara holistik. Revitalisasi heritage dalam kerangka ini ditunjukkan melalui keterlibatan aktif warga dan komunitas lokal dalam proses perencanaan, keberadaan kebijakan publik yang berpihak pada pelestarian kawasan, serta integrasi nilai-nilai pelestarian ke dalam arah pembangunan berkelanjutan. Selain itu, dukungan pendanaan maupun insentif dari sektor pemerintah maupun swasta juga menjadi indikator penting dalam mewujudkan keberhasilan model ini.

Lebih lanjut, Ashworth menekankan bahwa revitalisasi heritage harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lokal serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan ini bertujuan agar revitalisasi tidak sekadar berorientasi pada keindahan visual, melainkan juga memperkuat identitas lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ashworth, 2008). Proses ini melibatkan berbagai aspek, seperti infrastruktur, sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga revitalisasi tidak hanya bersifat fisik tetapi juga mencakup pemulihan kehidupan sosial ekonomi (UNESCO, 2015). Pandangan John Ashworth tentang Revitalisasi heritage (Ashworth, 2008):

1) Revitalisasi Berbasis Fungsi

Menurut Ashworth, salah satu tantangan utama dalam revitalisasi adalah menemukan fungsi baru yang sesuai dengan karakter historis suatu kawasan, namun tetap relevan bagi masyarakat saat ini. Ashworth menekankan bahwa tanpa adanya fungsi yang jelas, bangunan dan kawasan bersejarah hanya akan menjadi monumen mati yang tidak berkontribusi pada dinamika perkotaan

2) Pariwisata sebagai Instrumen Revitalisasi

Ashworth melihat bahwa pariwisata budaya dapat menjadi alat untuk mendukung keberlanjutan kawasan bersejarah. Namun, ia juga memperingatkan bahaya komersialisasi berlebihan yang dapat menghilangkan keaslian tempat tersebut. Oleh karena itu, dalam revitalisasi berbasis pariwisata, diperlukan keseimbangan antara eksploitasi ekonomi dan pelestarian nilai budaya

3) Keseimbangan antara Pelestarian dan Pengembangan

Dalam proses revitalisasi, Ashworth menekankan perlunya keseimbangan antara pelestarian bangunan bersejarah dan kebutuhan ekonomi serta sosial masyarakat sekitar. Jika revitalisasi terlalu fokus pada konservasi tanpa mempertimbangkan kebutuhan ekonomi, maka kawasan tersebut bisa kehilangan daya tarik bagi investor dan masyarakat. Sebaliknya, jika revitalisasi hanya berorientasi pada ekonomi, maka risiko kehilangan nilai sejarah dan budaya menjadi sangat besar.

4) Peran Masyarakat dalam Revitalisasi

Ashworth juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan revitalisasi. Revitalisasi yang hanya bergantung pada intervensi pemerintah atau investor cenderung mengabaikan perspektif lokal, yang dapat menyebabkan resistensi atau bahkan kegagalan dalam implementasi kebijakan revitalisasi

B. Teori Muhammad As-Hikam

Penulis menguraikan teori mengenai masyarakat sipil (*civil society*) sebagai landasan dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data yang mendalam, penelitian ini menerapkan metode triangulasi data dengan melakukan wawancara mendalam terhadap sejumlah informan. Pendekatan ini dinilai relevan karena memungkinkan eksplorasi informasi yang lebih kaya, fleksibel, serta kontekstual. Wawancara mendalam berperan dalam memperkaya, mengklarifikasi, dan menguatkan data yang diperoleh melalui metode lain, sehingga meningkatkan validitas serta komprehensivitas temuan penelitian. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran AMBO sebagai *civil society* dalam proses revitalisasi Kota Lama Semarang, dengan fokus pada fasilitator multi-stakeholders, advokasi dan evaluasi.

Dr. Muhammad Atho'illah Shohibul Hikam, yang dikenal luas dengan nama Muhammad AS Hikam. Lahir pada tanggal 26 April 1958 di Tuban, Jawa Timur, menyelesaikan studi jenjang S1 Sastra Arab pada Tahun 1981 dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Menyelesaikan jenjang S2 bidang Ilmu Komunikasi pada tahun 1987 dan berhasil menyandang gelar *Master of Art* di bidang Ilmu Politik pada tahun 1991 dari *University Of Hawaii, Honolulu*. Jenjang doktoral bidang Ilmu Politik diselesaikannya pada tahun 1995 dari universitas yang sama di Honolulu, Amerika Serikat.

Dikenal luas melalui karya monumentalnya *Demokrasi dan Civil Society* (1996). Dalam karya tersebut, AS Hikam memandang *civil society* adalah suatu wilayah yang menjamahnya suatu perilaku, tindakan, dan refleksi yang bersifat otonom, tidak dibatasi oleh kehidupan material, dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan resmi. Konsep *civil society* dalam pemikiran AS Hikam, merupakan sebagai ruang kehidupan sosial yang terorganisasi, yang memiliki ciri-ciri utama berupa, sifat kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*selfgenerating*), dan keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya (AS Hikam, 1996).

Civil society memiliki 3 konsepsi utama, yaitu (AS Hikam, 1996):

- a. Adanya kemandirian yang tinggi antara individu-individu dan kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara
- b. Adanya ruang publik bebas (*the public sphere*) sebagai arena partisipasi politik warga negara secara aktif melalui diskusi dan praktik yang menyangkut kepentingan bersama.
- c. Adanya kapasitas dari masyarakat sipil untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan negara agar tidak bersifat dominatif dan intervensionis

Civil society sebagai ruang politik dapat dipahami sebagai suatu domain yang memungkinkan individu untuk berperilaku, bertindak, dan merefleksikan diri secara mandiri tanpa terikat oleh kondisi kehidupan material maupun ter subordinasi dalam struktur kelembagaan politik formal. Dalam konsep ini, terdapat esensi dari keberadaan ruang publik yang bebas (*the free public sphere*), di mana masyarakat dapat berinteraksi dan berkomunikasi secara terbuka tanpa

adanya tekanan atau pembatasan eksternal. Dalam perspektifnya, *civil society* terdiri dari berbagai lembaga non-pemerintah yang memiliki kemandirian, berkontribusi dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat, serta berperan dalam mewujudkan keadilan sosial. Kelompok ini mencakup beragam entitas, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi sosial dan keagamaan, paguyuban, dan juga kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*) (Hikam,1999)

Dalam membangun *civil society*, terdapat sejumlah unsur sosial yang menjadi prasyarat penting bagi keberadaannya. Unsur-unsur tersebut tidak hanya berperan sebagai penopang, tetapi juga secara praktis memfasilitasi kemunculan dan penguatan *civil society* dalam suatu negara. Lebih dari sekadar mendukung, beberapa di antaranya bahkan mengandung karakteristik mendasar yang merepresentasikan esensi dari *civil society* itu sendiri. Berikut beberapa unsur sosial yang diperlukan guna menghadirkan karakteristik dari *civil society* yang ideal, yaitu (Hikam 1999):

a. *Free Public Sphere*

Civil society akan mencapai kemandirian sejatinya ketika beroperasi dalam ruang publik yang bebas (*Free public sphere*), yakni suatu wadah yang menjamin hak serta kebebasan setiap individu dalam mengekspresikan kepentingan sosial dan politiknya sebagai warga negara yang berdaulat. *Free public sphere*, yaitu suatu arena yang menjamin hak-hak dan kebebasan individu dalam menyampaikan kepentingan sosial dan politiknya sebagai warga negara. Ruang ini berfungsi sebagai pembatas terhadap campur tangan negara dalam ranah politik masyarakat. Dalam sistem tersebut, kebebasan dan hak-hak warga dijamin oleh hukum, menjadikan ruang publik bebas sebagai syarat esensial bagi eksistensi organisasi masyarakat sipil. Tanpa ruang ini, negara berpotensi menjalankan kekuasaan secara represif dan otoriter. Dengan demikian, keberadaan ruang publik yang bebas memungkinkan masyarakat sipil menjalankan fungsi kritisnya dengan aman, serta menjadi tempat berlangsungnya pertukaran gagasan dan perjuangan warga atas hak-haknya

b. Demokratis

Demokrasi merupakan prasyarat utama terbentuknya *civil society* yang autentik. Tanpa prinsip-prinsip demokrasi, masyarakat sipil yang sejati tidak dapat bertumbuh. Iklim demokratis memberikan ruang yang mendukung partisipasi aktif warga dalam menyampaikan pendapat, berdiskusi, dan menjalin interaksi sosial. Dalam sistem ini, terdapat hubungan timbal balik antara negara dan warga negara, di mana hak-hak sipil dilindungi secara menyeluruh. Dalam tatanan ini, hak-hak warga negara dijamin secara menyeluruh dalam suasana kebebasan yang utuh. Ketika prinsip demokrasi diterapkan secara optimal, hal ini akan mendorong terbentuknya masyarakat politik yang cerdas dan berdaya. Dengan demikian, *civil society* memperoleh ruang publik yang aman dan bebas dari ancaman dalam kerangka negara demokratis.

c. Toleran

Sebuah sikap yang ciri *civil society*, sikap toleransi memungkinkan interaksi yang sehat antara setiap individu didalam ruang publik, perlakuan saling menghargai serta saling menghormati ini ditempuh dalam mencapai *civil society* yang beradab. Sikap saling menghargai sesama individu atau kelompok mencakup aspek-aspek dalam berinteraksi, seperti kebebasan beraktivitas dan menyampaikan pendapat. Toleransi dibutuhkan kehadirannya dalam terwujudnya *civil society* yang ideal, ketika *civil society* berdiri tanpa dilandasi nilai-nilai toleran, kepentingan yang dibawa bukan lagi menyoal tentang kepentingan bersama, dengan kata lain warga belum siap untuk menelaah kepentingan bersama dalam kemajemukan warga

d. Kemajemukan

Demi menegakkan karakteristik *civil society* yang sempurna, unsur kemajemukan harus diterapkan serta diterima dengan tulus sebagai rahmat Tuhan. Kemajemukan mendapati pluralisme harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, keaneka ragaman model sosial, agama hingga budaya tidak bisa dipahami hanya untuk diterima dan diakui sebagai kenyataan masyarakat yang majemuk, namun dalam menegakkan *civil society* diperlukan ketulusan bahwa kemajemukan didalam masyarakat merupakan nilai-nilai positif yang hendak di pertemukan

e. Keadilan Sosial

Unsur sosial terakhir yang dibutuhkan *civil society* adalah keadilan sosial, yang mencakup kesetaraan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara. Dalam keadilan sosial terdapat keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab kolektif. Prinsip ini mendorong distribusi yang adil terhadap akses dan kesempatan, serta menjadi alat untuk mencegah terjadinya dominasi atau monopoli oleh pihak tertentu. Dengan adanya keadilan sosial, *civil society* dapat berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang dalam struktur sosial dan politik.

Studi ini menggunakan teori terkait *civil society* oleh Muhammad AS Hikam dalam karya *Demokrasi dan Civil Society* (1996), secara keseluruhan gagasan Muhammad AS Hikam mengenai *civil society* menekankan peran otonomi, partisipasi warga, dan solidaritas dalam memperkuat kehidupan sosial. Dalam penelitian ini, konsep tersebut dijadikan sebagai kerangka analisis untuk memahami peran AMBO sebagai bagian dari *civil society* serta mengevaluasi dampaknya terhadap revitalisasi Kota Lama Semarang. Relevansi pemikiran AS Hikam dalam penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk menjelaskan bagaimana komunitas dapat berperan sebagai aktor independen dalam pembangunan lokal. Dengan menggunakan kerangka pemikiran Muhammad AS Hikam, penelitian ini dapat menganalisis bagaimana AMBO memobilisasi warga, membangun solidaritas, dan mempengaruhi kebijakan dalam revitalisasi Kota Lama. Konsep ini memberikan dasar teoritis yang kuat untuk memahami dinamika *civil society* dalam konteks kebijakan perkotaan dan pelestarian warisan budaya di Indonesia.

BAB III

GAMBARAN UMUM PROFIL KOTA LAMA SEMARANG

A. Gambaran Umum Kota Semarang

1. Kondisi Geografis

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Secara astronomis, kota ini berada pada koordinat $6^{\circ}50'$ – $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan $109^{\circ}35'$ – $110^{\circ}50'$ Bujur Timur. Wilayahnya memiliki luas total 373,70 km², dengan Kecamatan Gunungpati sebagai kecamatan terluas (58,27 km²), sementara Kecamatan Semarang Tengah menjadi yang terkecil (5,17 km²). Ketinggian wilayah berkisar antara 0,75 hingga 348 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Semarang Utara, tempat Kawasan Kota Lama berada, memiliki ketinggian rata-rata 1 meter di atas permukaan laut. Topografi Kota Semarang bervariasi, terbagi menjadi dua wilayah utama: Semarang Bawah (dataran rendah) dengan ketinggian 0-5 meter di atas permukaan laut, dan Semarang Atas (perbukitan) dengan ketinggian hingga 340 meter di atas permukaan laut. Kondisi iklimnya adalah tropis monsunial dengan dua musim utama, yaitu musim hujan (Oktober-Maret) dan musim kemarau (April-September). Suhu udara rata-rata berkisar antara 27-30°C, dengan curah hujan tahunan sekitar 2.000-2.500 mm.

Gambar 3. 1 Peta Kota Semarang



Sumber: Google Earth 2025

Secara administrative batas-batas kawasan Kota Semarang adalah:

Di sebelah Utara : Laut Jawa

Disebelah Selatan : Kabupaten Semarang

Disebelah Barat : Kabupaten Kendal

Disebelah Timur : Kabupaten Demak

Luas Wilayah : 373.670 Ha

2. Demografis Penduduk Kota Semarang

Secara administratif, Kota Semarang terbagi ke dalam 16 kecamatan dan 117 kelurahan. Pembagian wilayah ini mencerminkan kompleksitas tata kelola perkotaan serta perbedaan karakteristik sosial dan ekonomi di setiap kecamatan.

a. Penduduk Kota Semarang

Laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu parameter demografi yang menggambarkan rata-rata peningkatan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dalam periode tertentu. Indikator ini dinyatakan dalam persentase terhadap jumlah populasi awal guna memberikan gambaran mengenai dinamika kependudukan. Variasi tingkat pertumbuhan dan kepadatan penduduk antarwilayah menuntut adanya pemetaan demografi yang tepat, sehingga kebijakan pembangunan dapat dirancang secara optimal untuk memastikan pemerataan layanan publik serta keberlanjutan pembangunan di Kota Semarang.

Kepadatan penduduk merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat konsentrasi populasi dalam suatu wilayah, yang dinyatakan dalam jumlah individu per kilometer persegi. Berdasarkan Proyeksi Penduduk 2020–2050 (pertengahan tahun/Juni), jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 1.694,74 ribu jiwa, dengan jumlah populasi pada pertengahan tahun 2024 yang berkontribusi terhadap peningkatan kepadatan rata-rata menjadi 4.548 jiwa/km². Informasi lebih lanjut mengenai distribusi penduduk ini disajikan dalam bentuk tabel untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Kota Semarang

KECAMATAN	PENDUDUK (ribu)	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK PER TAHUN 2020-2023 ² (%)	KEPADATAN PENDUDUK ² PER KM ²
Mijen	89,95	3,93	1.591,35
Gunungpati	100,75	1	1.729,00
Banyumanik	143,43	0,35	4.822,53
Gajah Mungkur	56,35	0,08	6.030,73
Semarang Selatan	62,18	0,09	10.456,73
Candisari	75,61	0,08	11.820,08
Tembalang	198,86	1,73	5.038,38
Pedurungan	196,53	0,63	9.309,77
Genuk	132,47	2,64	5.099,22
Gayamsari	70,41	0,08	11.319,94
Semarang Timur	66,48	0,1	12.261,64
Semarang Utara	117,89	0,09	10.347,64
Semarang Tengah	55,21	0,1	10.672,11
Semarang Barat	149,33	0,11	6.888,81
Tugu	33,8	1,07	1.201,59
Ngaliyan	145,5	0,96	3.384,54
Kota Semarang	1.694,74	0,9	4.53,407

Sumber: BPS Kota Semarang 2024

Berdasarkan pada tabel diatas, menunjukkan distribusi penduduk di Kota Semarang tidak merata, dengan wilayah Semarang Bawah cenderung lebih padat dibandingkan dengan Semarang Atas yang memiliki kepadatan lebih rendah. Secara umum, kepadatan penduduk menunjukkan tren peningkatan sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, meskipun distribusinya masih bervariasi antar kecamatan. Kecamatan Semarang Timur tercatat sebagai daerah dengan kepadatan tertinggi, yaitu 12.261 jiwa per km², sedangkan Kecamatan Tugu memiliki kepadatan paling rendah, yakni 1.201 jiwa per km²

b. Penduduk Berdasarkan Kelompok

Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok

Kelompok Usia	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Presentase (%)
0 – 14 tahun (Usia Anak)	359,13	21,20%
15 – 64 tahun (Usia Produktif)	1.154,64	68,20%
65 tahun ke atas (Usia Lanjut)	180,92	10,60%
Total	1.694,74	100%

Sumber: BPS Kota Semarang 2024

Berdasarkan pada tabel diatas, komposisi penduduk menunjukkan kelompok usia produktif (15-64 tahun) mendominasi sebesar 68,20%, diikuti usia anak-anak (0-14 tahun) sekitar 21,20%, dan usia lanjut (65 tahun ke atas) sekitar 10,60%.

3. Kondisi sosial, ekonomi dan budaya

Sejak abad ke-17, ketika Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) atau Perusahaan Dagang Hindia Timur Belanda mendirikan pos dagangnya di Semarang, kawasan ini berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan administrasi kolonial Belanda di Pulau Jawa. Pada abad ke-18, kawasan tersebut diperkuat dengan pembangunan benteng de Vijfhoek, yang dirancang untuk melindungi pusat pemerintahan dan perdagangan dari ancaman eksternal. Namun, seiring dengan meluasnya kebutuhan akan ruang pemukiman dan ekspansi ekonomi, benteng ini dihancurkan pada tahun 1824. Transformasi ini menandai pergeseran fungsi kawasan dari benteng militer menjadi pusat urban yang lebih terbuka, yang kemudian berkembang menjadi embrio pusat kota modern.

Kawasan yang tumbuh di sisi timur bekas benteng ini menjadi cikal bakal Kota Lama Semarang, yang kala itu dikenal dengan sebutan *de Europeesche Buurt* karena didominasi oleh komunitas Eropa, khususnya Belanda. Dalam perkembangannya, kawasan ini menampilkan lanskap arsitektur khas kota-kota Eropa abad pertengahan yang diadaptasi dengan konteks tropis Asia Tenggara. Bangunan-bangunan di kawasan ini tidak hanya mencerminkan kekuasaan kolonial, tetapi juga menjadi artefak budaya yang merekam percampuran sosial dan nilai-nilai lintas budaya. Hingga saat ini, Kota Lama Semarang menjadi

representasi nyata dari warisan budaya kolonial dengan lebih dari 50 bangunan bersejarah yang masih mempertahankan gaya arsitektur Eropa abad ke-18 dan ke-19.

Beberapa bangunan ikonik seperti Gereja Blenduk yang dibangun pada 1753 oleh komunitas Kristen Protestan, Gedung Marba yang dulunya berfungsi sebagai pusat perdagangan, serta Gedung Spiegel dan Marabunta yang kini bertransformasi menjadi ruang publik modern, memperlihatkan kesinambungan fungsi dan pelestarian nilai historis. Di samping itu, Jembatan Berok yang dibangun pada abad ke-17 menjadi simbol penting dari infrastruktur kolonial yang masih digunakan hingga kini. Keberadaan bangunan-bangunan tersebut tidak hanya menjadi penanda visual masa lalu, tetapi juga memperkuat identitas Kota Lama sebagai ruang warisan budaya yang menyatukan dimensi sejarah, sosial, budaya, dan ekonomi secara utuh.

B. Gambaran Umum Kota Lama Semarang

Kota Lama Semarang, yang dikenal sebagai "*Little Netherland*" merupakan kawasan bersejarah yang merepresentasikan arsitektur serta tata kota bergaya Eropa pada abad ke-18. Wilayah ini memiliki luas sekitar 31 hektar dan menjadi salah satu bagian integral dalam perkembangan historis Kota Semarang. Secara geografis, Kota Lama Semarang terletak di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, serta Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah.

Gambar 3. 2 Peta Kota Lama Semarang



Sumber: Google Earth 2025

Kawasan ini memiliki batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat: Kali Semarang

Sebelah utara: Jalan Stasiun Tawang

Sebelah timur: Jalan Ronggowarsito

Sebelah selatan: Jalan Agus Salim

1. Revitalisasi Kota Lama

Sebelum dilakukan revitalisasi tahun 2017, Kota Lama Semarang dikenal sebagai kawasan yang sepi dengan citra buruk. Banyak bangunan cagar budaya yang tidak terawat, menimbulkan kesan horor dan mencekam. Beberapa area, seperti Jalan Kepodang, bahkan menjadi lokasi perjudian sabung ayam. Kondisi infrastruktur yang buruk dan citra negatif kawasan menyebabkan menurunnya minat wisatawan untuk berkunjung. Berdasarkan data yang termuat dalam Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2020, menyatakan sekitar 40% dari total 116 bangunan bersejarah di Kota Lama Semarang mengalami kerusakan sedang hingga berat. Faktor utama yang menyebabkan kerusakan tersebut meliputi usia bangunan yang melebihi satu abad, kepemilikan yang tidak jelas sehingga tidak ada pihak yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan, serta dampak dari banjir rob yang menyebabkan pelapukan pada struktur bangunan.

Bangunan yang mengalami kerusakan signifikan cenderung dibiarkan kosong atau terbengkalai. Laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang Tahun 2018, mencatat bahwa lebih dari 50% bangunan di Kota Lama tidak di manfaatkan secara optimal. Akibatnya, aktivitas ekonomi di area tersebut terbatas, dan banyak bangunan bersejarah yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, keberadaan lapak-lapak liar dan aktivitas ilegal menambah kesan tidak aman bagi pengunjung.

Gambar 3. 3 Bangunan Perusahaan Butterworth& Co dan Konsulat Siam.



Sumber: Peneliti, 2025

Di sisi lain, infrastruktur kawasan juga sangat terbatas dan kurang memadai. Salah satu permasalahan utama adalah sistem drainase yang buruk, yang menyebabkan genangan air hingga banjir saat musim hujan. Kota Lama, yang berada di dataran rendah dan dekat dengan garis pantai, rentan mengalami rob (banjir pasang air laut), yang mempercepat kerusakan bangunan akibat kelembaban tinggi dan air yang menggenang. Menurut laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Tahun 2019, kawasan ini mengalami rob sebanyak 15 kali dalam setahun dengan ketinggian air mencapai 30-50 cm di beberapa titik. Kondisi ini tidak hanya merusak struktur jalan, tetapi juga menyebabkan genangan air yang menghambat aktivitas masyarakat dan wisatawan. Selain itu, keterbatasan aksesibilitas menuju Kota Lama juga tergolong terbatas. Minimnya penerangan jalan juga menyebabkan kawasan ini terasa kurang aman, terutama di malam hari, sehingga mengurangi minat masyarakat untuk berkunjung. Kombinasi dari kerusakan bangunan, infrastruktur yang buruk, dan kurangnya fasilitas pendukung wisata menyebabkan daya tarik Kota Lama semakin menurun.

Banyak usaha, seperti toko dan restoran sehingga aktivitas ekonomi di Kota Lama mengalami stagnasi. Akibatnya, kawasan ini semakin sepi dan terkesan mati, memperburuk siklus keterabaian yang berlangsung selama bertahun-tahun sebelum akhirnya dilakukan revitalisasi. Namun melalui upaya revitalisasi yang dimulai pada tahun 2017, kawasan ini berhasil bertransformasi menjadi destinasi wisata yang menarik dan meningkatkan perekonomian lokal.

Pada tahap ini, fokus utama adalah perbaikan infrastruktur dasar untuk meningkatkan aksesibilitas dan fungsi kawasan. Kegiatan yang dilakukan meliputi: Peningkatan kualitas jalan dan trotoar untuk kenyamanan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya, penataan kabel listrik, telepon, dan pipa air di bawah tanah untuk estetika dan keamanan, penataan Kolam Retensi: Pembangunan kolam retensi untuk mengatasi masalah banjir dan genangan air di kawasan tersebut.

Tahap kedua difokuskan pada peningkatan fasilitas pendukung dan estetika kawasan untuk menarik lebih banyak pengunjung. Kegiatan yang direncanakan meliputi; Pemasangan Pompa Air untuk mencegah banjir, terutama saat musim hujan dengan memompa air ke Kali Semarang. Kemudian penambahan Elemen Estetika (*Street Furniture*) Pemasangan lampu jalan dengan desain khusus, kursi taman, dan elemen dekoratif lainnya untuk meningkatkan daya tarik visual kawasan. Dengan selesainya kedua tahap revitalisasi ini, diharapkan Kawasan Kota Lama Semarang dapat menjadi ikon baru yang menarik wisatawan dan mendukung industri kreatif lokal (Semarang.kota, 2022).

Revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang dilakukan dalam dua tahap, masing-masing dengan fokus dan pencapaian yang berbeda. Tahap pertama, yang berlangsung dari Desember 2017 hingga Juni 2019, lebih berorientasi pada perbaikan infrastruktur dasar di kawasan inti Kota Lama. Dalam tahap ini, dilakukan penataan jalan dan pedestrian menggunakan paving block serta pemasangan pembatas untuk menciptakan lingkungan yang lebih rapi dan nyaman. Selain itu, jaringan utilitas seperti kabel listrik, fiber optik, telepon, dan pipa PDAM dipindahkan ke bawah tanah guna meningkatkan estetika serta keamanan kawasan. Upaya pengelolaan drainase juga menjadi prioritas, dengan pembangunan dua kolam retensi di Berok dan Bubakan untuk mengurangi risiko genangan air. Tak hanya itu, berbagai fasilitas pendukung turut disediakan, seperti street furniture berupa tempat duduk, tempat sampah, papan informasi, lampu penerangan jalan, hingga halte yang sekaligus berfungsi sebagai daya tarik wisata dengan desain yang unik (Kementrian PUPR, 2018).

Memasuki tahap kedua, yang berlangsung dari September 2019 hingga April 2020, fokus revitalisasi diperluas ke area luar kawasan inti Kota Lama. Infrastruktur jalan di sekitar kawasan, seperti Jalan Mpu Tantular, turut ditingkatkan guna mendukung aksesibilitas dan konektivitas kota. Salah satu

langkah penting dalam tahap ini adalah pembangunan rumah pompa di Berok untuk memperbaiki sistem drainase dan mengurangi risiko banjir yang kerap terjadi. Selain itu, tahap kedua juga membawa aspek edukatif ke dalam proses revitalisasi dengan pembangunan museum di Bundaran Bubakan. Museum ini diharapkan menjadi pusat informasi sejarah Kota Lama, menampilkan benda-benda cagar budaya, serta mendokumentasikan proses revitalisasi dari waktu ke waktu. Sebagai pelengkap, pemasangan street furniture tambahan dilakukan di beberapa ruas jalan seperti Jalan Nuri, Jalan Garuda, Jalan Cendrawasih, dan Jalan Kepodang, untuk memperindah kawasan serta meningkatkan kenyamanan pengunjung (Subowo 2022).

2. Isu Revitalisasi

Revitalisasi kawasan Kota Lama Semarang yang dimulai pada akhir tahun 2017 merupakan bagian dari agenda besar Pemerintah Kota Semarang dalam rangka menjadikan kawasan tersebut sebagai situs warisan dunia (*World Heritage Site*) setelah berhasil masuk dalam daftar sementara (*Tentative List*) pada tahun 2015 lalu oleh UNESCO. Proyek ini dicanangkan sebagai langkah strategis untuk menghidupkan kembali fungsi ekonomi, sosial, dan budaya kawasan yang telah lama mengalami degradasi fisik dan penurunan aktivitas. Namun, pelaksanaannya tidak terlepas dari sejumlah persoalan, baik pada aspek teknis maupun dalam dimensi sosial-partisipatif.

Pada bulan Desember 2017, Pemerintah Kota Semarang bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan sosialisasi awal mengenai program revitalisasi kepada masyarakat, termasuk para pelaku usaha dan pemilik bangunan di kawasan Kota Lama. Namun demikian, sosialisasi tersebut tidak disertai dengan penyampaian informasi lanjutan secara merata. Kemudian pada bulan Februari 2018, Informasi mengenai pelaksanaan teknis disampaikan secara bertahap melalui surat undangan dari pihak kontraktor kepada pemilik gedung, namun pola komunikasi yang tidak merata menyebabkan ketimpangan informasi. Hal ini menimbulkan kesenjangan informasi antar pihak yang berkepentingan, kondisi ini berimplikasi pada ketidaksiapan masyarakat dalam mengantisipasi dampak dari pelaksanaan proyek (Jessie, 2024).

Revitalisasi fisik kawasan secara resmi dimulai pada bulan 2018. Pada tahap ini, kontraktor mulai menutup jalan, menggali saluran, serta mengerahkan alat berat untuk memperbaiki infrastruktur dasar. Pemerintah memperkirakan

durasi pengerjaan akan memakan waktu tiga bulan. Namun dalam praktiknya proyek ini mengalami perpanjangan waktu hingga lebih dari satu setengah tahun yaitu Juni 2019, karena adanya penyesuaian desain yang dianggap belum merepresentasikan karakteristik historis kawasan secara optimal.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi atau sering di sebut Hendi (Periode 2013-2015 dan 2016-2021), menginisiasi forum diskusi yang mempertemukan perwakilan kontraktor dengan komunitas AMBO pada 25 April 2018. Forum yang berlangsung di bangunan Oudestadt, Tekodeko, membahas estimasi waktu pelaksanaan revitalisasi serta rencana peningkatan infrastruktur kawasan. Dalam diskusi ini, pemerintah menjelaskan secara lebih terbuka bahwa revitalisasi akan mencakup penggalian saluran dan penanaman kabel bawah tanah, serta diperkirakan berlangsung selama beberapa bulan.

Gambar 3. 4 Pembongkaran Kabel



Sumber: TribunNews

Gambar diatas menunjukkan pekerja sedang melakukan pembongkaran pavling jalan, pembuatan gorong-gorong dan penataan jaringan kabel listrik yang berada di sepanjang Jalan Letjend Suprpto Kawasan Kota Lama Semarang, tahapan teknis dimulai pada 23 Mei 2018. Proyek ini membawa konsekuensi besar bagi aksesibilitas dan mobilitas kawasan. Akses menuju bangunan-bangunan utama terganggu, termasuk tempat ibadah, toko bahan bangunan, dan kantor. Banyak pelaku usaha melaporkan penurunan drastis dalam omzet penjualan karena turunnya arus pengunjung. Bahkan terdapat toko yang terpaksa

tutup permanen karena tidak mampu bertahan dalam kondisi tersebut. Seiring berjalannya waktu, ketidakjelasan informasi mengenai progres dan waktu penyelesaian revitalisasi menimbulkan keresahan (Harnansa, 2018).

Pada 20 Desember 2018 yang bertepatan di Sanggar Seni Lentera, Jalan Letjen Suprpto No 46 Kawasan Kota Lama. AMBO menyelenggarakan forum diskusi terbuka, Sambung Rasa. Forum ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain perwakilan pemilik gedung, kontraktor pelaksana, pihak kepolisian, perwakilan PT. Brantas Abipraya, serta instansi pemerintahan terkait. Tujuan forum ini adalah untuk memperjelas arah dan jadwal revitalisasi secara terbuka. Namun, banyak pertanyaan dari masyarakat tidak terjawab dengan tuntas, terutama yang berkaitan dengan waktu penyelesaian proyek dan arah pengelolaan kawasan pascarevitalisasi (Abidin, 2018).

Karena ketidakpuasan terhadap hasil forum tersebut, pada 21 Desember 2018, AMBO secara aktif mendesak pemerintah untuk memberikan kejelasan terkait kapan proyek revitalisasi akan selesai. Desakan ini disampaikan dalam bentuk pernyataan publik yang menegaskan bahwa masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam aspek regulasi dan perencanaan jangka panjang kawasan. AMBO mempertanyakan dengan serius, "Kota Lama akan dibawa ke mana?", menandakan adanya kegelisahan kolektif terhadap masa depan kawasan heritage yang selama ini menjadi bagian dari identitas sosial warga.

Proyek revitalisasi yang berkepanjangan menimbulkan berbagai dampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Akses jalan yang terganggu berdampak langsung pada kelancaran aktivitas bisnis, khususnya bagi pemilik usaha bahan bangunan seperti cat, keramik, dan semen. Beberapa pemilik usaha melaporkan penurunan omzet yang drastis, bahkan hingga terpaksa menutup usaha secara permanen. Tidak hanya itu, kegiatan keagamaan juga turut terdampak. Jemaat gereja di kawasan tersebut menghadapi kesulitan dalam menjalankan ibadah karena akses yang terhalang oleh proyek. Di sisi lain, masalah kesehatan juga mencuat. Debu proyek dan kebisingan alat berat menyebabkan meningkatnya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terutama pada kelompok rentan seperti lansia. Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan warga, yang merasa tidak mendapat ruang partisipasi memadai dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan revitalisasi (Jessie, 2024).

3. Profil AMBO

a. AMBO

Assosiasi Masyarakat mBangun *Oudestad* (AMBO) merupakan sebuah organisasi masyarakat sipil berbasis partisipasi warga yang tumbuh dari kesadaran kolektif akan pentingnya pelestarian dan pengembangan kawasan Kota Lama Semarang. AMBO lahir sebagai respons atas dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang berkembang di kawasan *heritage* ini, terutama setelah Kota Lama Semarang mulai mendapatkan perhatian nasional dan internasional sebagai situs potensial warisan dunia.

Pembentukan resmi AMBO berlangsung pada tahun 2015 dalam momentum *Internasional Conference on Urban Heritage and Sustainable Infrastructur Development* (UHSID). Kegiatan ini menjadi titik tolak inisiasi komunitas berbasis warga, seiring dengan dimasukkannya Kota Lama Semarang ke dalam daftar sementara (*tentative list*) oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia (Dokumen AD/ART AMBO, 2023). Sebelumnya, inisiatif warga telah muncul dalam bentuk gerakan sosial informal, sebagai reaksi atas kondisi Kota Lama yang terabaikan.

Pada tahap awal, AMBO merupakan gerakan sosial informal yang berfokus pada advokasi teknis, seperti pelaporan kerusakan infrastruktur dan pengelolaan ruang publik. AMBO terdiri dari individu-individu dengan latar belakang yang beragam, seperti warga lokal, pemilik dan penghuni bangunan cagar budaya, pelaku usaha (misalnya pemilik kafe, galeri seni, dan restoran), hingga pengelola kawasan Kota Lama. Keberagaman ini menjadikan AMBO sebagai ruang kolaboratif yang inklusif dan representatif terhadap berbagai kepentingan di kawasan *heritage* Kota Lama. Koordinasi internal komunitas dilakukan secara horizontal, memanfaatkan teknologi digital seperti WhatsApp sebagai media komunikasi utama. Model komunikasi ini mencerminkan karakter organisasi yang lentur dan adaptif terhadap dinamika lapangan, serta memungkinkan partisipasi setara dan responsif antaranggota. Dikutip dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Awalnya, komunitas ini terbentuk sebagai sebuah paguyuban dengan basis komunikasi sederhana melalui platform WhatsApp. Namun, seiring berjalannya waktu dan munculnya berbagai kendala, muncul kesadaran bahwa sebagai warga yang tinggal dan besar di lingkungan ini, kami memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi setempat.

Oleh karena itu, ketika kami duduk bersama dan berdiskusi secara langsung, solusi yang dihasilkan cenderung lebih relevan dan aspiratif" (Jessie, 2024).

Pernyataan berikut menunjukkan kesadaran reflektif atas posisi strategis warga sebagai pemilik pengalaman langsung terhadap ruang dan dinamika lokal. Ini adalah bentuk internalisasi identitas komunitas sebagai aktor lokal yang sah dalam proses revitalisasi. Ini menunjukkan munculnya asosiasi sukarela di mana warga mulai menyadari bahwa suara mereka penting dalam diskursus publik. Selain itu, ini juga menandakan pergeseran dari sekadar kelompok sosial menjadi aktor politik, yang berarti komunitas tidak lagi hanya saling berbagi kepedulian, tetapi juga berupaya mengintervensi proses pengambilan keputusan secara kolektif dan sadar.

b. Struktur Keanggotaan

Tabel 3. 3 Struktur Anggota AMBO Kota Lama

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Bharoto
2.	Wakil Ketua	Koko
3.	Sekretaris I	Hari
4.	Sekretaris II	Jessie
5.	Bendahara I	Wuri
6.	Bendahara II	Wiwin
7.	Humas I	Giye
8.	Humas II	Alvian
9.	Humas III	Edo
10.	Humas IV	Dimas
11.	Penasehat I	Isti
12.	Penasehat II	Kriswandono

Sumber: Arsip AMBO Kota Lama Tahun 2023

c. Visi Misi AMBO

1. Visi

Terbangunnya Masyarakat Kota Lama yang komsumtif, aspiratif saling berbagi ilmu, bergotong royong, dan bersinergi dalam mendukung pembangunan Kota Lama yang holistik sebagai cagar budaya.

2. Misi

- 1) Menjadi forum komunikasi warga Kota Lama yang dapat menampung aspirasi
- 2) Saling berbagi ilmu
- 3) Bergotong royong atau bersinergi mengupayakan Kota Lama ke arah yang lebih baik secara menyeluruh sebagai warisan budaya

d. Tujuan, Azas, Dasar, dan Prinsip

AMBO didirikan dengan berlandaskan pada azas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi fondasi normatif dan ideologis dalam seluruh kegiatan dan kebijakannya. Sebagai sebuah komunitas yang berfokus pada pelestarian dan pengembangan kawasan Kota Lama, AMBO memiliki tujuan strategis untuk memfasilitasi berbagai kepentingan masyarakat setempat, baik dari aspek sosial, budaya, ekonomi, maupun lingkungan. Peran ini dijalankan dalam rangka mewujudkan visi bersama menuju revitalisasi Kota Lama yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan sebagai bagian dari warisan budaya nasional yang memiliki nilai sejarah tinggi.

Dalam operasionalisasinya, AMBO menjunjung tinggi prinsip solidaritas, yaitu semangat kebersamaan dan kepedulian antaranggota komunitas serta antara masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, prinsip substansialitas juga menjadi pedoman, yang mengacu pada komitmen terhadap esensi dan nilai-nilai fundamental dalam setiap kegiatan yang dilakukan, bukan semata-mata simbolik atau seremonial. Dengan berlandaskan kedua prinsip ini, AMBO berupaya membangun ruang partisipatif yang aktif, kritis, dan konstruktif dalam mendukung upaya pelestarian serta pengembangan Kota Lama sebagai kawasan bersejarah yang memiliki peran penting dalam identitas budaya dan kehidupan masyarakat urban.

e. Peran AMBO Dalam Revitalisasi

1. Fasilitator *multi-stakeholders*

Sejak awal pembentukannya, AMBO aktif menggalang kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian dan pengembangan Kota Lama. Berbagai kampanye dilakukan untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai nilai historis kawasan ini serta tantangan yang dihadapi sebelum dan selama proses revitalisasi. Dalam proses revitalisasi Kota Lama, AMBO berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai pihak, termasuk warga, akademisi, pemerintah, dan pelaku usaha. Peran ini dilakukan dengan mengadakan diskusi, lokakarya, dan forum konsultatif yang melibatkan berbagai pihak dalam merumuskan solusi bagi permasalahan Kota Lama. Dengan adanya keterlibatan multi-stakeholder, komunitas ini membantu memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mempertimbangkan perspektif yang beragam. Kolaborasi ini juga membuka peluang bagi program revitalisasi berbasis komunitas yang lebih inklusif dan partisipatif.

2. Advokasi dalam revitalisasi

Peran AMBO merujuk pada upaya dalam advokasi kebijakan dengan mendorong pemerintah agar mengambil langkah konkret dalam memperbaiki infrastruktur dan tata kelola kawasan. Melalui dialog dengan pemangku kepentingan, komunitas ini berupaya memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan sosial, dan politik budaya. Salah satu bentuk advokasi yang dilakukan adalah membantu pemilik usaha kecil di kawasan Kota Lama untuk mendapatkan keringanan pajak setelah revitalisasi, berdasarkan data dari komunitas AMBO, sekitar 60% pelaku usaha kecil mengalami peningkatan pajak sebesar 30-50% pasca-revitalisasi, yang mendorong mereka untuk mengajukan permohonan insentif fiskal kepada pemerintah daerah.

BAB IV

PERAN AMBO DALAM REVITALISASI KOTA LAMA SEMARANG

Bab ini menyajikan data dan analisis temuan di lapangan yang berkaitan dengan peran komunitas AMBO sebagai *civil society* dalam proses revitalisasi Kota Lama Semarang. Analisis dilakukan berdasarkan fakta yang diperoleh melalui metode pengumpulan data, termasuk wawancara mendalam serta studi literatur dari berbagai dokumen relevan. Kajian ini mengacu pada teori *civil society* yang dikemukakan oleh Muhammad AS Hikam untuk menggambarkan serta menganalisis kontribusi AMBO dalam upaya revitalisasi kawasan tersebut.

Peran AMBO dalam revitalisasi Kota Lama Semarang dapat dianalisis melalui berbagai aspek utama yang mencerminkan kontribusi mereka dalam mengembangkan kawasan ini. Komunitas ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah komunikasi warga tetapi juga berperan aktif dalam partisipasi, kolaborasi, advokasi, serta pengawasan terhadap kebijakan yang diterapkan dalam proses revitalisasi.

A. Fasilitator kolaborasi multi-stakeholder

Fasilitator dalam kolaborasi multi-pemangku kepentingan merupakan aktor netral yang berperan menjembatani komunikasi dan interaksi antara pihak-pihak yang memiliki latar belakang, kepentingan, serta tingkat kekuasaan yang berbeda, dengan tujuan menciptakan proses kolaboratif yang inklusif dan terkoordinasi dalam penyelesaian isu atau pelaksanaan program bersama (Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012).

Jika dikaitkan dalam konteks peran AMBO merujuk pada partisipasi AMBO sebagai jembatan atau penghubung antar berbagai pemangku kepentingan, AMBO sebagai fasilitator forum tidak hanya menyediakan wadah, tetapi juga melakukan edukasi dan penguatan kapasitas masyarakat agar mereka mampu menyampaikan gagasan secara kritis dan konstruktif (Jessie, 2024). Komunitas AMBO berperan dalam menghadirkan ruang publik semacam ini di kawasan Kota Lama Semarang melalui inisiasi forum diskusi terbuka bernama Sambung Rasa. Dikutip dari wawancara sebagai berikut.

“Sambung Rasa itu forum yang kita (AMBO) selenggarakan sebagai wadah partisipatif untuk menghimpun berbagai masukan dari masyarakat, mulai dari keluhan, aspirasi, hingga usulan, baik yang ditujukan kepada kita (AMBO) maupun kepada pemerintah” (Isti, 2025).

“Selama ini pelaksanaan Sambung Rasa telah berjalan secara dialogis dua arah karena kita juga menghadirkan dinas dinas terkait, AMBO tidak hanya menyampaikan isu-isu berdasarkan kajian teoritis, tetapi juga fakta-fakta empirik yang ditemukan langsung di lapangan” (Isti, 2025).

Pernyataan ini mengindikasikan AMBO, melalui forum ini menepatkan diri sebagai jembatan komunikasi. Fakta bahwa forum ini diinisiasi oleh AMBO sendiri menandakan adanya inisiatif akar rumput dan praktik *free public sphere*, karakteristik *civil society*. Forum ini menunjukkan bahwa AMBO tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara acara, tetapi sebagai fasilitator kebebasan warga untuk bersuara. Ruang ini juga memperlihatkan resistensi terhadap sentralisasi kekuasaan, sebab suara masyarakat dilibatkan langsung dalam praktik pembangunan kota. Dalam setiap sesi, terdapat dialog terbuka antara masyarakat dan instansi pemerintah serta pihak swasta yang terlibat dalam proyek revitalisasi. Berikut adalah strategis yang dilakukan kemudian diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti:

1. Sambung rasa

Forum Sambung Rasa difasilitasi oleh Asosiasi Masyarakat mBangun Oudestadt (AMBO), sebagai *civil society* di Kota Lama Semarang, menyelenggarakan forum komunikasi yang berfungsi sebagai wadah interaksi antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Komunitas dan masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat, keluhan, maupun usulan terkait dinamika di kawasan Kota Lama.

Gambar 4. 1 Sambung Rasa



Sumber: Arsip Komunitas AMBO, 2018

Dokumentasi visual diatas merekam pelaksanaan kegiatan Sambung Rasa yang melibatkan berbagai unsur penting dalam proses revitalisasi Kota Lama Semarang, yakni AMBO, warga lokal, para pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta perwakilan dari instansi pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Kegiatan ini diselenggarakan pada tahun 2018 dan bertempat di Sanggar Seni Lentera, salah satu bangunan yang termasuk dalam daftar cagar budaya di kawasan Kota Lama Semarang. Pemilihan lokasi ini tidak hanya memiliki nilai simbolis sebagai warisan budaya, tetapi juga memperkuat makna forum sebagai ruang dialog yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa Kota Lama.

Sejak awal pembentukannya, AMBO telah menyelenggarakan forum diskusi Sambung Rasa sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 2018, 2020, 2022, dan 2025.

- a. Sambung Rasa 2018, Pada 20 Desember 2018 yang bertepatan di Sanggar Seni Lentera, Jalan Letjen Suprpto No 46 Kawasan Kota Lama. AMBO menyelenggarakan forum diskusi terbuka, Sambung Rasa. Forum ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain perwakilan pemilik gedung, kontraktor pelaksana (PT. Amitas Jakarta), pihak kepolisian, perwakilan PT. Brantas Abipraya (Somy Bowono), serta instansi pemerintahan terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata (Dinbudpar), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Kawasan Kota Lama (BPK2L), dan pihak kepolisian.

Tujuan forum ini adalah mempercepat penyelesaian revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang. Pekerjaan revitalisasi yang belum selesai menimbulkan dampak sosial dan ekonomi, terganggunya akses jalan, aktivitas perdagangan, ibadah, dan lainnya. Forum ini bertujuan membuka komunikasi antara warga, kontraktor, dan pemerintah guna meminimalisir kesalahpahaman dan meningkatkan koordinasi. Dikutip dari notulensi sebagai berikut:

“Kondisi pekerjaan revitalisasi yang sedang berjalan, diharapkan segera selesai karena dampaknya luar biasa. Saat kemarau jalan berdebu, saat hujan jalanan becek, akses parkir sulit, dan berdampak pada aktivitas perdagangan, ibadah, dan lain-lainnya” (Komunitas AMBO, 2018).

“kemudian alat berat yang digunakan menimbulkan getaran sehingga menyebabkan kerusakan pada bangunan cagar budaya. Juga tidak informasi jelas terkait jadwal pekerjaan, sehingga kami tidak bersiap terkait aktifitas usaha” (Komunitas AMBO, 2018).

Dampak revitalisasi menaruh pengaruh langsung terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat, pernyataan tersebut mengandung harapan agar proyek segera selesai, bukan penolakan terhadap revitalisasi. ini menunjukkan dukungan pasif yang bersifat toleran namun tetap kritis menggambarkan model partisipasi tokenism, di mana warga mengetahui proyek berjalan tapi tak sepenuhnya dilibatkan. Kurangnya penerapan prinsip konservasi adaptif yang mengedepankan perlakuan khusus terhadap struktur bersejarah. Ketidakhati-hatian teknis dapat mengancam keaslian material dan nilai historis bangunan. Menurut pendekatan konservasi dalam pengelolaan heritage mengutamakan perlindungan keaslian (*authenticity*) dan integritas fisik situs, sehingga intervensi harus bersifat minimal, terukur, dan berbasis pengetahuan sejarah serta struktur asli bangunan. Ketika alat berat digunakan tanpa kontrol yang ketat dan tidak ada tindakan

mitigasi terhadap dampak getaran, maka nilai-nilai tersebut terancam hilang.

Dari kegiatan tersebut menghasilkan perbaikan infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, turut mendukung proses revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang dengan menyediakan sejumlah fasilitas pendukung seperti bangku panjang, tempat pembuangan sampah, lampu penerangan jalan utama, serta perbaikan trotoar. Penataan infrastruktur lainnya mencakup peningkatan kualitas jalan, sistem drainase, halte transportasi umum, serta pembangunan dua kolam retensi di kawasan Berok dan Bubakan, yang berfungsi untuk menampung dan memompa aliran air menuju Kali Semarang guna mengatasi potensi genangan (Kementrian PUPR, 2018).

- b. Sambung Rasa tahun 2020, Sambung Rasa dilakukan oleh komunitas AMBO dengan dihadiri oleh Warga Kawasan Kota Lama sebagai pemilik, pengelola gedung, serta *stakeholders* kota seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dinbudpar), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Kawasan Kota Lama (BPK2L), dan pihak kepolisian.

Kegiatan ini bertujuan sebagai media diskusi yang berfokus pada permasalahan pasca-revitalisasi Kota Lama, seperti adaptasi masyarakat, tantangan ekonomi, atau dampak sosial. Kegiatan ini dilaksanakan di Jalan Letjen Suprpto No 46 Kawasan Kota Lama. Dijelaskan oleh narasumber sebagai berikut:

“Setelah Kota Lama Semarang masuk dalam tentative list warisan dunia, terjadi pergeseran fungsi kawasan dari sebelumnya sebagai kota niaga menjadi kawasan wisata heritage” (Jessie, 2024).

“Perubahan fungsi ini turut memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat setempat, yang sebelumnya menjalankan berbagai jenis usaha, termasuk yang bergerak di sektor material bangunan seperti keramik dan cat. Selain itu, sejumlah bangunan tua juga telah mengalami alih fungsi menjadi gedung perkantoran” (Jessie, 2024).

“Seiring dengan transformasi ini, pemerintah mulai memberlakukan regulasi baru, misalnya pelarangan truk bermuatan besar melintasi jalanan Kota Lama. Kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap pelaku usaha yang bergantung pada distribusi barang dalam jumlah besar, sehingga memaksa sebagian dari mereka untuk mempertimbangkan relokasi usaha” (Jessie, 2024).

Mengindikasikan adanya pergeseran basis ekonomi lokal. Artinya, revitalisasi heritage bukan hanya berdampak pada aspek fisik bangunan atau identitas kawasan, tetapi juga memengaruhi struktur kehidupan masyarakat, terutama pelaku ekonomi lokal yang tidak selalu memiliki modal adaptif terhadap perubahan fungsi kawasan. Hal ini menunjukkan adanya tensi antara pelestarian dan keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal.

“Di sisi lain, pemerintah juga mengeluarkan aturan pelarangan parkir di depan gedung, namun pada saat itu belum menyediakan fasilitas kantong parkir alternatif yang memadai, sehingga menimbulkan persoalan baru bagi pengguna dan pengelola ruang di kawasan tersebut” (Jessie, 2024).

Meskipun larangan parkir di depan gedung bertujuan mendukung estetika dan pelestarian bangunan, pemerintah belum menyediakan solusi alternatif yang memadai, yaitu kantong parkir. Hal ini menimbulkan masalah baru dalam tata kelola ruang, karena pengguna dan pengelola kesulitan menjalankan aktivitas secara efisien. Ini mencerminkan defisit koordinasi dan perencanaan, serta lemahnya pendekatan *bottom-up* dalam pembuatan kebijakan. Akibatnya, kebijakan yang seharusnya meningkatkan kualitas kawasan justru memunculkan konflik kepentingan antara pemangku kepentingan.

Kebijakan ini tidak hanya menjadi dasar hukum dalam proses revitalisasi, tetapi juga merepresentasikan pergeseran paradigma dalam tata kelola kawasan cagar budaya, dengan menempatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai elemen sentral. Pendekatan kolaboratif ini menegaskan bahwa pelestarian warisan budaya merupakan tanggung jawab kolektif antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku

kepentingan, guna mewujudkan ruang kota yang inklusif, adaptif, serta berlandaskan nilai-nilai sejarah dan kearifan lokal.

Salah satu wujud nyata dari hasil forum diskusi tersebut adalah penetapan dan penyediaan kantong parkir di sejumlah titik strategis, seperti di Jalan Mpu Tantular, Jalan Letjen Suprpto No. 38, Jalan Branjangan No. 3–9, serta Jalan Sendowo. Penyediaan sarana parkir ini bertujuan tidak hanya untuk mengurai kepadatan lalu lintas, tetapi juga untuk memperkuat aksesibilitas pengunjung ke kawasan heritage. Inisiatif ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong pengembangan Kota Lama sebagai destinasi wisata multifungsi yang tidak hanya mengedepankan aspek historis dan arsitektural, tetapi juga mendukung berbagai bentuk aktivitas publik.

- c. Mengacu pada dokumentasi tahun 2022 lalu, forum Sambung Rasa merepresentasikan bentuk diskusi partisipatif yang dihadiri oleh 51 peserta, termasuk warga yang tinggal di Kawasan Kota Lama selaku pemilik dan pengelola bangunan, serta sejumlah pemangku kepentingan seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L), dan aktor-aktor lainnya yang memiliki peran dalam tata kelola kota.

Gambar 4. 2 Sambung Rasa



Sumber: Arsip Komunitas AMBO

Dokumentasi visual diatas merekam pelaksanaan kegiatan Sambung Rasa yang melibatkan berbagai unsur penting dalam proses revitalisasi Kota Lama Semarang, yakni AMBO, warga lokal, para pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta perwakilan dari instansi pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Forum ini menitikberatkan pembahasan pada persoalan-persoalan yang muncul pascarevitalisasi, antara lain terkait keterbatasan aksesibilitas yang dialami masyarakat setempat, serta peninjauan terhadap Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang sedang berlaku.

Berdasarkan catatan notulensi kegiatan AMBO pada 26 Januari 2022 lalu yang bertempat di Sanggar Seni Lentera, Kota Lama Semarang, forum tersebut merupakan salah satu inisiatif dari AMBO sebagai bagian dari masyarakat sipil yang berkomitmen terhadap pelestarian kawasan warisan budaya. Dikutip dari catatan kegiatan oleh Komunitas AMBO sebagai berikut:

“Dalam konteks ini, AMBO menyoroti adanya ketidakterpaduan dalam kerja sama antara komunitas dan Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L), yang terkesan masih berjalan secara parsial dan belum menunjukkan koordinasi yang terintegrasi secara menyeluruh. Hal ini menjadi perhatian penting dalam upaya menciptakan tata kelola kawasan yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya dalam hal penyelenggaraan acara publik dan pengelolaan aksesibilitas ruang” (Komunitas AMBO, 2022).

“Kemudian dalam kerangka pembangunan berbasis pelestarian perlu ada diskusi bersama terkait RTBL yang telah berlaku supaya lebih memahami aturan yang berlaku di area kita, masyarakat lokal tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai stakeholders yang memiliki pengetahuan lokal, kepentingan ekonomi, serta keterikatan historis terhadap kawasan yang direvitalisasi. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan konservasi menjadi syarat mutlak guna menjamin keberlanjutan sosial dan kultural dari kawasan heritage” (Komunitas AMBO, 2022).

Hasil dari diskusi tersebut melahirkan kebijakan sebagai bagian dari strategi pelestarian dan pengelolaan kawasan warisan budaya yang berkelanjutan, Pemerintah Kota menetapkan kebijakan

melalui Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Situs Kota Lama, yang sebelumnya menggantikan PERDA No 8 tahun 2003. Selain itu, berkaitan dengan kebijakan penutupan jalan, pihak pemerintah berkomitmen untuk memberikan informasi terlebih dahulu kepada masyarakat guna menghindari kesan kebijakan yang mendadak.

Dalam hal ini, AMBO menjalankan fungsi sosial dengan memenuhi harapan masyarakat (sebagai penyampai aspirasi dan penjaga nilai lokal) dan sekaligus mengingatkan negara agar tidak mencederai hak-hak partisipatif warga. Peran ini melekat karena posisi mereka sebagai bagian dari komunitas lokal yang memiliki ikatan historis dan identitas terhadap kawasan

Kebijakan yang dihasilkan menunjukkan langkah yang cukup positif dalam mendorong keterlibatan sektor swasta dalam mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pengelolaan parkir, yang dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan seperti ini dapat berjalan efektif apabila disertai komunikasi yang baik, antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.

AMBO berperan sebagai perantara dalam dinamika kebijakan yang melibatkan masyarakat dan Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L). Melalui kritik terhadap kurangnya sinergi dalam kerja sama serta upaya mendorong diskusi mengenai Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), AMBO menunjukkan fungsinya sebagai penghubung komunikasi sekaligus fasilitator dalam membangun kesepahaman antar pemangku kepentingan. Peran tersebut tidak berhenti pada aksi protes semata, melainkan diarahkan untuk mendorong terbentuknya tata kelola baru yang disepakati secara partisipatif.

- d. Sambung Rasa tahun 2025 lalu, difokuskan pada penguatan keterlibatan lintas aktor. Dalam konteks ini, AMBO tidak hanya berperan sebagai entitas kebudayaan, melainkan juga sebagai aktor strategis yang mendorong partisipasi publik dan menjembatani

kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kegiatan ini dilaksanakan pada 15 Februari 2025 lalu, yang bertepatan di Rumah Po Han, Jl. Kepondang No. 64, Semarang, dengan mengusung tema bertajuk “Menuju Kota Lama Berkolaborasi Bermakna”.

Topik yang diangkat mengenai membahas sejumlah isu strategis terkait proses revitalisasi Kota Lama, termasuk legalitas keberadaan komunitas, karakteristik sosial-kultural komunitas lokal, serta posisi AMBO dalam struktur Badan Pengelolaan Situs Kawasan Kota Lama (BPSKL). Dikutip dalam wawancara sebagai berikut:

“Seiring dengan upaya mendukung kelangsungan proses revitalisasi, Pemerintah Kota Semarang juga membentuk lembaga pengelola kawasan, yakni Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L), yang kini telah bertransformasi menjadi Badan Pengelola Situs Kota Lama (BPSKL). Namun demikian, efektivitas kinerja badan pengelola tersebut dinilai belum optimal, terutama karena keanggotaan BPSKL didominasi oleh unsur pemerintah. Hal ini berbeda dengan AMBO yang dianggap lebih representatif karena mengikutsertakan elemen masyarakat dalam struktur dan aktivitasnya” (Barotho, 2025).

“Dari sisi partisipasi, meskipun tergolong sebagai komunitas yang relatif baru, program kerja AMBO dinilai lebih terarah. Selain itu, AMBO bersama masyarakat yang terlibat di dalamnya merasa memiliki ruang yang lebih terbuka untuk menyampaikan aspirasi dan pandangan mereka terkait dinamika pembangunan kawasan Kota Lama” (Barotho, 2025).

Dibandingkan dengan Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L), yang keanggotaannya didominasi oleh unsur pemerintah, Badan Pengelola Situs Kota Lama (BPSKL) tampil sebagai entitas yang lebih representatif karena melibatkan elemen masyarakat secara langsung dalam struktur organisasinya. Partisipasi AMBO menegaskan posisi sebagai aktor *civil society* yang tidak hanya hadir sebagai pengamat, tetapi juga sebagai penggerak yang menjembatani masyarakat dengan kebijakan publik yang diterapkan di kawasan heritage tersebut.

2. Kampanye festival kota lama

Festival kota lama merujuk pada berbagai kegiatan edukatif dan kebudayaan yang inovatif untuk meningkatkan daya tarik serta keberagaman dalam pelestarian heritage. Kegiatan ini diselenggarakan melalui kerja sama dengan berbagai pihak guna memperkuat nilai budaya di Kota Lama. Advokasi kultural juga menjadi bagian penting dari strategi AMBO dalam memperjuangkan hak warga.

Tujuan AMBO mengembangkan kegiatan yang mengangkat identitas lokal Kota Lama, AMBO menyampaikan pesan-pesan politik secara kultural yang lebih halus namun berdampak luas, Ini juga menjadi cara untuk membangun solidaritas komunitas dan mengundang perhatian publik luas terhadap isu-isu yang mereka perjuangkan.

Gambar 4. 3 Yayasan Kota Lama Semarang



Sumber: Yayasan Kota Lama, 2025

Foto dokumentasi Festival Kota Lama 2017 ini merekam momen kebersamaan antara anggota Yayasan Festival Kota Lama, yang terdiri dari warga kawasan Kota Lama Semarang dan para relawan dari berbagai latar belakang.

Oen's Semarang Foundation (OSF) yang kemudian berkembang menjadi Yayasan Festival Kota Lama, merupakan yayasan nirlaba yang didirikan oleh Jenny Kalalo, pewaris restoran legendaris, Toko Oen. Yayasan ini fokus pada pelestarian dan revitalisasi warisan sejarah,

khususnya dikawasan Kota Lama Semarang, dengan tujuan menjaga bangunan bersejarah dan mempromosikan pariwisata budaya, yang kemudian berkembang menjadi Yayasan Kota Lama Semarang (Yayasan Kota Lama, 2025).

Sejak berdirinya, OSF terus berkembang dalam upayanya memfasilitasi kegiatan kebudayaan di kawasan Kota Lama Semarang. Seiring dengan peningkatan cakupan program dan berkembangnya relasi kemitraan, OSF mengalami restrukturisasi kelembagaan yang mengantarkannya pada perubahan bentuk hukum menjadi ***Yayasan Festival Kota Lama Semarang***. Transformasi ini merefleksikan komitmen yayasan untuk memperkuat perannya sebagai penyelenggara festival dan kegiatan kebudayaan yang terintegrasi dengan pelestarian warisan budaya hingga saat ini.

Festival kebudayaan merujuk pada partisipasi AMBO bersama OSF dengan merancang program-program yang tidak hanya bersifat seremonial atau simbolis, tetapi benar-benar membuka ruang partisipasi yang luas bagi warga. Inisiasi ini dirancang oleh OSF sebagai wadah nirlaba yang berfokus pada pengembangan lingkungan Kota Lama Semarang. Di balik keindahan arsitektur bangunan-bangunan bersejarah di kawasan tersebut, terdapat semangat kolektif untuk mempertahankan, merawat, dan melestarikan warisan budaya Kota Semarang. Oleh karena itu, Festival Kota Lama (FKL) di selenggarakan setiap tahun dengan tema beragam guna mendukung pencapaian visi Kota Semarang sebagai kawasan berstandar internasional (Festivalkotalama.com, 2025)

Gambar 4. 4 Festival Kota Lama Semarang



Sumber: Google Fajar.co.id

Gambar diatas merupakan festival Kota Lama tahun 2017 diselenggarakan di Area Retensi Tawang, kawasan Kota Lama Semarang, pada tanggal 23 hingga 24 September 2017. Kegiatan ini menandai pelaksanaan tahun keenam sejak pertama kali digelar. Acara tersebut terselenggara melalui kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, seperti Oen's Semarang Foundation (OSF), AMBO yang aktif dalam pelestarian Kota Lama, jaringan diaspora peduli Kota Lama "*Vrienden van Kota Lama*" yang berbasis di Belanda, serta masyarakat dan komunitas lokal yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian kawasan heritage tersebut. Festival ini mengusung tema kuliner tempo doeloe sebagai bagian dari upaya menghidupkan kembali nilai-nilai budaya dan sejarah Kota Lama.

Forum ini berfungsi sebagai wadah strategis yang mempertemukan berbagai aktor, termasuk para pakar pelestarian warisan budaya serta investor domestik maupun internasional, guna merumuskan langkah-langkah konkret dalam menjaga dan mengembangkan nilai historis kawasan tersebut. Sejak penyelenggaraan perdananya pada tahun 2012, FKL telah berlangsung secara konsisten setiap bulan September hingga tahun 2025. Keberlanjutan forum ini menjadi indikator penting bagi eksistensi dan efektivitasnya sebagai ruang deliberatif yang mendorong sinergi antara

masyarakat sipil, pemerintah, dan sektor swasta dalam revitalisasi kawasan cagar budaya. Melalui FKL, pelestarian Kota Lama Semarang tidak hanya menjadi tanggung jawab institusional, melainkan juga bagian dari gerakan bersama menuju tata kelola kota yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada nilai-nilai sejarah.

Sejak tahun 2012 hingga 2024, rangkaian kegiatan tahunan yang diselenggarakan di kawasan Kota Lama Semarang mengalami perkembangan yang signifikan, baik dari segi tema, format pelaksanaan, maupun tingkat partisipasi masyarakat. Pada tahap awal, kegiatan-kegiatan tersebut berorientasi pada upaya membangun citra kawasan melalui tema “*Towards Semarang World Heritage 2020*”, yang menitikberatkan pada penyelenggaraan pameran budaya dan konferensi berskala internasional.

Tabel 4.1 Festival Kota Lama Tahun 2012-2024

No	Tanggal	Tema Kegiatan	Tempat	Ket
1.	5-7 Oktober 2012	Towards Semarang World Heritage 2020	Kota Lama Semarang	Konferensi internasional, tur (mobil kuno; sepeda tua; vespa), galeri lukisan, musik, dan tarian, seminar fotografi, rally foto, lomba gambar
2.	September 2013	Towards Semarang World Heritage 2020	Kota Lama Semarang	Pasar malam sentiling, gala dinner, bazar jajanan, fashion show, street dance, walking tour, pertunjukan seni tari
3.	September 2014	Towards Semarang World Heritage 2020	Kota Lama Semarang	Konferensi internasional, tur (mobil kuno; sepeda tua; vespa), galeri lukisan, musik, dan tarian, seminar fotografi, rally foto, lomba gambar
4.	19-20 September 2015	Towards Semarang World	Kota Lama Semarang	Grafik historik, pasar malam tempoe dulu, ekspo angkutan kuno, simfoni kota lama, pertunjukan musik oleh Ruth

		Heritage 2020		Sahanaya dan Prof. Hye Won Jo, pameran foto
5.	September 2016	Kuno, Kini, Nanti	Kota Lama Semarang	Pasar malam sentiling, gala dinner, bazar jajanan, fashion show, street dance, walking tour, pertunjukan seni tari
6.	22-26 September 2017	Festival Kota Lama 2017	Area Retensi Tawang Kota Lama Semarang	Pasar malam sentiling, gala dinner, bazar jajanan, fashion show, street dance, walking tour, pertunjukan seni tari
7.	20-23 September 2018	Beda Masa Satu Radar	Kota Lama Semarang	Orchestra in diversity, kompetisi sungai Kota Lama, kuliner nostalgia, pasar sentiling, <i>wayang on the street</i> , kagama kolaborasi, parade milenial berkebaya, pikat wasta nusantara & funky kebaya, festival bunga & nyiur nusantara, internasional fiesta folklore, jazz kota lama
8.	12-22 September 2019	Indische Parade	Kota Lama Semarang	Indiche parade, kuliner legendaris, jelajah kota lama, bedah buku dan film, pameran, seminar, workshop, lomba dansa, lomba lari berjarik dan sarungan, belajar bahasa belanda
9.	17-27 September 2020	Kuno, Kini, Nanti	Daring	Live in concert secara virtual, menyesuaikan dengan situasi pandemi COVID-19
10.	5-15 September 2021	Heritage in Diversity	Kota Lama Semarang	Orchestra, kuliner nostalgia pasar sentiling, pikat wastra, wayang on the street, fiesta foklore nusantara, funky

				kebaya, parade remaja berkebaya, jazz kota lama, kagama kolaborasi, bunga dan nyiur nusantara, koperasi kali semarang lama
11.	15-25 September 2022	Heritage Reborn	Kota Lama Semarang	Orchestra, national conference FKL, soegijazz, wayang orang, flashmob, remaja berkebaya, pasar sentiling, kagama kolaborasi produk unggulan UMKM expo, pagelaran nyiur nusantara, kagama karawitan
12.	7-17 September 2023	Heritage in Harmony	Kota Lama Semarang	Orchestra, wayang kulit, kuliner nostalgia pasar sentiling, kagama kolaborasi produk unggulan UMKM expo, river front semarang lama, funky kebaya, parade remaja berkebaya, nusantara folklore festival, festival janur nusantara, 1000 milenial berkebaya
13.	5-15 September 2024	Heritage in Diversity	Kota Lama Semarang	Orchestra in diversity, kompetisi sungai Kota Lama, kuliner nostalgia, pasar sentiling, <i>wayang on the street</i> , kagama kolaborasi, parade milenial berkebaya, pikat wasta nusantara & funky kebaya, festival bunga & nyiur nusantara, internasional fiesta folklore,

Sumber: Yayasan Festival Kota Lama Tahun 2025

Tabel diatas menunjukkan data, Sejak tahun 2012, Kolaborasi AMBO dan Oen Semarang Foundation (OSF) secara konsisten menginisiasi dan menyelenggarakan berbagai kegiatan bertaraf internasional yang berfokus pada pelestarian dan revitalisasi kawasan heritage Kota Lama Semarang. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya bersifat seremoni, melainkan merepresentasikan strategi jangka panjang dalam menghidupkan kembali kawasan bersejarah melalui pendekatan berbasis budaya, partisipatif, dan adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat.

Pada periode awal, yakni tahun 2012 hingga 2015, kegiatan bertajuk Towards Semarang World Heritage 2020 menandai fase awal advokasi menuju pengakuan Kota Lama sebagai warisan dunia. Dalam kurun ini, berbagai acara seperti konferensi internasional, rally foto, seni pertunjukan, dan pameran seni rupa diselenggarakan sebagai upaya membangun citra kawasan dan meningkatkan kesadaran publik terhadap nilai historis Kota Lama. Selain itu, narasi sejarah diangkat dalam bentuk grafis historik dan pertunjukan musik tematik sebagai bentuk artikulasi identitas lokal dan global kawasan tersebut.

Memasuki tahun 2016 hingga 2017, kegiatan OSF mulai menunjukkan transisi dari sekadar perayaan ke arah refleksi kritis atas transformasi kawasan. Tema “Kuno, Kini, Nanti” dan “Festival Kota Lama 2017” merefleksikan pemaknaan lintas waktu yang menekankan pentingnya kontinuitas nilai budaya dalam arus modernisasi. Aktivitas seperti Pasar Malam Sentiling, *walking tour*, dan *street dance* menggambarkan penyatuan antara tradisi dan ekspresi budaya kontemporer dalam ruang publik heritage.

Periode 2018 hingga 2019 menunjukkan perluasan skala dan substansi kegiatan dengan keterlibatan komunitas yang semakin kuat. Tema seperti “Beda Masa Satu Radar” dan “*Indische Parade*” menjadi wadah ekspresi identitas kolektif melalui pertunjukan lintas budaya, seperti International Fiesta Folklore, Jazz Kota Lama, hingga bedah buku sejarah kolonial. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat dimensi interkultural,

tetapi juga memperluas cakupan edukasi publik terkait sejarah Kota Lama, termasuk aspek kolonialisme yang dikemas dalam format kreatif dan partisipatif.

Tahun 2020 menjadi titik adaptif akibat pandemi COVID-19. OSF bertransformasi dengan menyelenggarakan kegiatan secara virtual melalui konsep *Live in Concert*, tanpa menghilangkan esensi partisipasi publik. Hal ini menandai fleksibilitas organisasi dalam menjaga keberlanjutan program meskipun dalam keterbatasan situasi global.

Sejak tahun 2021, tema kegiatan semakin menekankan pada keberagaman, kolaborasi antar komunitas, serta peran aktif generasi muda dan pelaku UMKM, yang tercermin dalam penyelenggaraan orkestra, parade milenial, hingga pameran produk-produk lokal. Konsistensi pemanfaatan ruang publik di kawasan Kota Lama dan integrasi unsur-unsur budaya lokal menunjukkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi revitalisasi yang berkelanjutan, yang tidak hanya mengaktifkan kembali ruang kota, tetapi juga memperkuat identitas budaya, kohesi sosial, serta mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat setempat (Yayasan Festival Kota Lama, 2025).

Sejak 2021 hingga 2024, kegiatan OSF menunjukkan penguatan dimensi sosial, ekonomi, dan budaya secara simultan. Tema-tema seperti “*Heritage in Diversity*”, “*Heritage Reborn*”, dan “*Heritage in Harmony*” menjadi penanda integrasi nilai inklusivitas dan keberagaman dalam revitalisasi kawasan. Berbagai program seperti Pikat Wastra, Parade Milenial Berkebaya, UMKM Expo, hingga Kompetisi Sungai Kota Lama memperlihatkan bagaimana revitalisasi tidak hanya difokuskan pada elemen fisik dan estetika, melainkan juga diarahkan pada penguatan ekonomi lokal, pelibatan generasi muda, serta pelestarian budaya yang hidup. Aktivitas-aktivitas ini menjadikan kawasan Kota Lama sebagai laboratorium sosial-budaya yang dinamis serta ruang diplomasi budaya melalui keterlibatan internasional.

Dengan demikian, perjalanan kegiatan festival Kota Lama dari tahun ke tahun merepresentasikan evolusi pendekatan revitalisasi heritage yang tidak hanya menekankan pelestarian bangunan tua, tetapi juga membangun kembali kehidupan sosial kawasan secara inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi AMBO dan OSF telah memainkan peran signifikan sebagai fasilitator kolaborasi multi-pihak dalam membentuk Kota Lama sebagai ruang warisan yang hidup, kreatif, dan relevan dengan tantangan zaman. Pendekatan ini selaras dengan prinsip heritage planning dalam konsep ashworth, di mana revitalisasi tidak hanya difokuskan pada pelestarian material, tetapi juga pemberdayaan masyarakat dan transformasi sosial ekonomi kawasan secara komprehensif (Ashworth, Graham, & Tunbridge, 2000).

Fenomena ini juga memperlihatkan bagaimana asosiasi sukarela, seperti AMBO berperan terhadap isu-isu publik tanpa harus menunggu inisiatif dari Pemerintah Kota. Hal ini sejalan dengan pemikiran AS Hikam yang menekankan bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya bertumpu pada relasi vertikal antara warga dan negara, tetapi juga ditopang oleh partisipasi horizontal yang aktif antara warga itu sendiri, melalui organisasi-organisasi masyarakat sipil. Dalam konteks Kota Lama, kehadiran AMBO menjadi cerminan konkret dari kapasitas masyarakat untuk menjadi aktor kolektif dalam pengelolaan ruang kota secara partisipatif.

3. Pemanfaatan media sosial oleh media *WhatsApp*

Pemanfaatan media sosial merujuk pada memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi strategis, dengan fokus utama pada penggunaan aplikasi *WhatsApp*. Media sosial ini bukan hanya digunakan sebagai saluran informasi satu arah, tetapi telah berkembang menjadi platform interaktif yang memfasilitasi partisipasi aktif warga dalam isu-isu revitalisasi kawasan Kota Lama Semarang.

WhatsApp digunakan oleh AMBO sebagai medium koordinasi internal sekaligus wadah penyampaian aspirasi dan keluhan masyarakat terhadap berbagai isu yang muncul di lapangan. Melalui grup percakapan yang dikelola oleh AMBO menjadi ruang diskusi yang inklusif, tempat

masyarakat lokal baik warga, pelaku usaha, maupun relawan budaya dapat menyampaikan aspirasi, berbagi informasi penting, melaporkan permasalahan yang terjadi di lapangan, hingga mengusulkan solusi secara real-time, sehingga bersifat dinamis dan inklusif, setiap anggota komunitas dapat dengan cepat menginformasikan permasalahan, mengusulkan solusi, serta mendiskusikan strategi penanganan secara kolektif (Jessie, 2024). Dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut

“Keberadaan grup WhatsApp ini memfasilitasi proses pencarian solusi secara lebih efektif. Misalnya, ketika muncul suatu permasalahan, solusi dapat segera dirumuskan dan ditindaklanjuti” (Jessie, 2024).

“Seiring berjalannya waktu, grup yang awalnya hanya diikuti oleh warga kini juga diisi oleh berbagai pemangku kepentingan kota, seperti pemerintah kota, kalangan akademisi, serta pihak-pihak lain yang tertarik bergabung” (Jessie, 2024).

“Dengan demikian, apabila terjadi kendala, mereka dapat langsung menyampaikannya melalui grup. Apabila ada pihak yang tidak aktif menyimak percakapan, komunikasi tetap dapat dilakukan melalui pesan pribadi kepada pihak terkait agar permasalahan tersebut segera mendapatkan perhatian” (Jessie, 2024).

Efektivitas media sosial dalam konteks ini terletak pada kemampuannya menjangkau berbagai lapisan masyarakat secara cepat dan efisien, mengurangi hambatan struktural dalam komunikasi tatap muka, serta memperkuat kohesi sosial di antara anggota komunitas. Selain itu, penggunaan media digital juga memperluas kapasitas komunitas dalam membangun jejaring kolaboratif lintas sektor, termasuk dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas lain yang memiliki perhatian terhadap isu pelestarian warisan budaya. Media sosial whatsapp juga memperkuat jejaring antar anggota komunitas dan mitra kolaborator lainnya, termasuk pemerintah daerah dan institusi pendidikan, yang terlibat dalam proyek-proyek revitalisasi.

Melalui pendekatan digital ini, diharapkan AMBO tidak hanya menunjukkan kemampuan adaptif terhadap perkembangan teknologi

informasi, tetapi juga berhasil mengoptimalkan media sosial sebagai sarana demokratisasi informasi, penguatan koordinasi internal, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam merespons persoalan lokal secara mandiri dan partisipatif.

Penggunaan media sosial oleh AMBO, khususnya melalui platform WhatsApp, merepresentasikan strategi komunikasi yang efisien dan fleksibel dalam mendukung agenda revitalisasi kawasan Kota Lama Semarang. Fungsi WhatsApp tidak terbatas pada penyampaian informasi secara searah, tetapi telah berkembang menjadi medium dialogis yang memungkinkan interaksi partisipatif dari berbagai elemen masyarakat. Grup percakapan yang dikelola oleh AMBO berperan sebagai ruang deliberatif yang terbuka dan dinamis, di mana warga, pelaku usaha, pegiat budaya, serta aktor strategis seperti pemerintah daerah dan akademisi dapat berkontribusi melalui penyampaian aspirasi, pelaporan isu, dan perumusan solusi secara langsung (Jessie, 2024). Dikutip dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Jadi, WhatsApp itu bukan sekadar jadi saluran informasi satu arah. Sekarang, kami menggunakannya sebagai media interaktif yang sangat efektif. Di grup WhatsApp ‘Kami Warga Kota Lama’, banyak elemen masyarakat bisa saling terlibat mulai dari warga biasa, pelaku usaha lokal, relawan budaya, sampai pihak pemerintah kota dan akademisi” (Jessie, 2024)

“Mereka semua aktif menyampaikan aspirasi, melaporkan persoalan yang muncul di lapangan, bahkan ikut mengusulkan solusi secara langsung” (Jessie, 2024).

“Grup ini seperti ruang diskusi yang terbuka dan dinamis. Jadi bukan hanya ngobrol, tapi benar-benar jadi tempat untuk berdiskusi dan mengambil langkah bersama. Itu sangat membantu dalam membangun koordinasi dan partisipasi yang lebih inklusif” (Jessie, 2024)

Pendekatan ini memungkinkan terbentuknya mekanisme koordinasi yang cepat serta responsif terhadap dinamika di lapangan, sekaligus memperkuat jejaring kolaborasi antar sektor. Kehadiran grup WhatsApp

turut mendukung proses pengambilan keputusan secara kolektif dan mempererat solidaritas sosial di antara anggota komunitas.

Berdasarkan konsep peran sebagai alat komunikasi (Horoepoetri & Santosa, 2003), menggambarkan fungsi peran sebagai sarana untuk memperoleh masukan berupa saran, opini, atau informasi yang mendukung proses pengambilan keputusan. Dimensi ini berasal dari peran AMBO melalui penggunaan grup WhatsApp, yang tidak hanya menjadi media diskusi warga, tetapi juga mempertemukan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah kota dan akademisi untuk bersama-sama merumuskan solusi atas kendala revitalisasi.

Oleh karena itu, peran AMBO menjadi signifikan dalam menunjukkan bahwa partisipasi warga dapat digerakkan secara organik dari bawah, melalui kanal-kanal informal yang inklusif dan berbasis teknologi. Dengan demikian, AMBO menunjukkan kapasitas adaptif terhadap kemajuan teknologi informasi sekaligus mengoptimalkan media sosial sebagai instrumen demokratisasi informasi, penguatan tata kelola internal, dan peningkatan peran aktif masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan lokal secara inklusif dan partisipatif.

B. Advokasi dalam revitalisasi

Advokasi merujuk pada tindakan ketika individu bergabung dalam suatu kelompok atau asosiasi, mereka dapat menyuarakan aspirasi kolektif, memengaruhi pengambilan kebijakan, serta menekan pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Advokasi AMBO dalam konteks ini tidak terbatas pada keterlibatan formal dalam proses politik, tetapi juga mencakup berbagai bentuk partisipasi seperti diskusi publik, aksi damai, serta kampanye sosial yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu strategis.

Selain berperan sebagai mitra pemerintah dalam revitalisasi, AMBO juga aktif untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar berpihak kepada warga dan pelaku usaha di Kota Lama. Melalui berbagai aksi kritis, komunitas ini berupaya mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

1. Konferensi Pers Masyarakat

Sosialisasi merupakan komponen utama dalam pelaksanaan konferensi pers, yang bertujuan untuk menyampaikan informasi sekaligus meningkatkan kesadaran publik mengenai pelestarian cagar budaya. Konferensi pers yang dilakukan oleh AMBO menjadi titik balik penting dalam artikulasi peran komunitas dalam proses revitalisasi Kota Lama Semarang.

Dalam pernyataan publik tersebut, AMBO menyuarakan kritik terhadap pendekatan revitalisasi yang dinilai minim partisipasi dan cenderung mengabaikan dampak sosial yang dirasakan oleh warga, khususnya mereka yang terdampak secara langsung. Dengan mengusung tema “Kami Tetap Tangguh”, AMBO menginisiasi beberapa kegiatan seperti diskusi sekaligus sosialisasi, pameran foto, dan aksi bagi-bagi masker sebagai bentuk kepedulian AMBO terhadap gangguan debu akibat pembangunan Kota lama. Kegiatan ini berlangsung di seputaran Taman Srigunting, pada tanggal 3-4 Mei 2019 lalu. Di kutip dalam wawancara berikut:

“Pada masa awal revitalisasi Kota Lama Semarang, AMBO sempat menyelenggarakan sejumlah kegiatan berskala besar melalui kolaborasi dengan berbagai komunitas yang beraktivitas di kawasan tersebut”

“Kolaborasi ini melibatkan baik komunitas yang memang berasal dari Kota Lama maupun komunitas eksternal yang tertarik untuk berpartisipasi dalam proses revitalisasi. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pameran fotografi serta sosialisasi kepada warga terkait pengelolaan bangunan cagar budaya yang mereka miliki. Selain itu, AMBO juga menggagas gerakan bertajuk #kamitetaptangguh sebagai bentuk protes terhadap ketidakjelasan arah kebijakan revitalisasi yang terjadi” (Jessie, 2024).

AMBO berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan berbagai komunitas, baik yang berasal dari dalam kawasan Kota Lama maupun komunitas eksternal. Ini mencerminkan karakteristik *civil society* yang mendorong partisipasi inklusif dan membangun jejaring sosial lintas kelompok.

Kegiatan partisipatif yang dilakukan oleh komunitas AMBO dengan menghadirkan akademisi Prof. Dr. MG. Endang Sumiarni dari Fakultas Hukum Universitas Atmaja Yogyakarta sebagai pembicara. Acara ini mengusung tema “Tanggung Jawab Masyarakat di Kawasan Cagar Budaya” dan berhasil menarik perhatian berbagai pihak, termasuk pemilik serta pengelola bangunan, pelaku

usaha lokal, masyarakat umum, serta pemangku kepentingan yang berperan dalam pengelolaan kawasan heritage. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2019 tersebut diselenggarakan di salah satu ikon bersejarah Kota Lama, yaitu Gereja Blenduk (Yulianti, 2019).

Gambar 4. 5 Diskusi dan Sosialisasi Bersama Prof. Endang Sumiarni



Sumber: Arsip Komunitas AMBO, 2019

Dokumentasi diatas merupakan rangkaian kegiatan konferensi pers, berupa sosialisasi yang dibuka secara umum, diikuti oleh masyarakat lokal, stakeholders kota dan juga turis Kota Lama. Fokus utama dari sosialisasi ini adalah membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga dan merawat warisan budaya, dengan menekankan tanggung jawab bersama dalam pelestarian kawasan cagar budaya. Diskusi yang berlangsung menyoroti perlunya kolaborasi lintas aktor dalam memastikan bahwa revitalisasi tidak mengabaikan nilai-nilai sosial, budaya, dan kesejarahan yang melekat dalam kawasan tersebut.

Dalam sesi dialog, AMBO secara terbuka menyampaikan berbagai dampak sosial-ekonomi yang dialami oleh masyarakat setempat akibat intensitas revitalisasi dan komersialisasi kawasan. Isu-isu seperti penggusuran ruang usaha tradisional, kenaikan harga sewa bangunan secara signifikan, serta terjadinya tekanan sosial terhadap warga lokal akibat pergeseran fungsi kawasan menjadi lebih eksklusif menjadi perhatian utama.

Pelaksanaan sosialisasi melalui konferensi pers yang dilakukan oleh AMBO berfungsi sebagai elemen strategis utama dalam penyebaran informasi sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian

warisan budaya di kawasan Kota Lama Semarang. Konferensi pers ini bukan hanya sekadar media penyampaian informasi, melainkan juga menjadi ruang ekspresi kritik dan aspirasi komunitas terkait kebijakan revitalisasi yang dianggap kurang memberikan ruang partisipasi bagi warga serta kurang memperhatikan dampak sosial yang muncul.

Gambar 4. 6 Pameran Foto Bangunan Kota Lama

Sebelum *Revitalisasi*



Sumber: Arsip Komunitas AMBO, 2019

Dokumentasi diatas merupakan pelaksanaan pameran foto sebagai rangkaian acara konferensi pers yang di inisiasi AMBO pada tahun 2019, dilakukan di Jalan Letjen Suprpto No 32, Kota Semarang. Pameran foto merupakan elemen esensial dalam penyelenggaraan konferensi pers, yang berfungsi menyampaikan informasi secara visual terkait proyek revitalisasi. Kegiatan ini disusun untuk memperkuat sesi sosialisasi dengan menyajikan representasi konkret mengenai proses, hasil, maupun dampak program yang dibahas, sekaligus meningkatkan kesadaran publik terhadap isu tersebut.

Foto-foto yang ditampilkan merepresentasikan tahapan revitalisasi seperti renovasi bangunan bersejarah dan hasil akhir revitalisasi berupa ruang publik yang diperbarui. Selain itu, pameran turut menyoroti nilai budaya situs yang menjadi objek pelestarian, guna memperkuat pesan mengenai pentingnya menjaga warisan budaya. Beberapa kegiatan juga digelar diantaranya pameran foto yang berkolaborasi dengan seniman maupun komunitas lokal yang ada di

Kota Lama dan aksi bagi bagi masker. Aksi ini sebagai bentuk memperingati HUT Kota Semarang ke-472. Sekaligus sebagai aksi protes yang disampaikan AMBO dan masyarakat kota Lama Semarang terkait permasalahan revitalisasi yang tak kunjung selesai. Dijelaskan dalam hasil wawancara berikut:

“Dalam gerakan ini, AMBO berkolaborasi dengan komunitas lokal menampilkan dokumentasi visual berupa foto rumah warga yang terdampak debu dari kegiatan revitalisasi, gambar pembongkaran jalan, serta aksi pembagian masker kepada wisatawan dan pekerja di kawasan tersebut. Kegiatan tersebut disampaikan kepada publik melalui konferensi pers terbuka” (Jessie, 2024).

“Kolaborasi ini melibatkan berbagai komunitas, seperti Komunitas Fotografi Semarang (KFIS), Klitikan (komunitas pecinta barang antik), komunitas Vespa, serta individu-individu yang beraktivitas di Kota Lama seperti pemandu wisata, meskipun mereka bukan merupakan penduduk asli kawasan tersebut” (Jessie, 2024).

AMBO merepresentasikan fungsi esensial dari *civil society*, yakni sebagai perantara aspirasi warga sekaligus penjaga kepentingan publik. Peran ini diwujudkan melalui penyampaian kritik sosial dalam bentuk dokumentasi visual yang menggambarkan dampak negatif proses revitalisasi, seperti sebaran debu, pembongkaran infrastruktur jalan, hingga inisiatif distribusi masker kepada pengunjung dan pekerja. Tindakan tersebut mencerminkan peran AMBO sebagai pengawas sosial (*social watchdog*) yang berfungsi membawa persoalan di tingkat akar rumput ke ranah diskursus publik.

Peran ini sejalan mengenai *civil society*, yang menekankan peran penting organisasi masyarakat dalam menopang demokrasi dan membatasi dominasi kekuasaan negara. Dalam menjalankan fungsinya, AMBO tidak bertindak secara eksklusif, melainkan membangun jejaring kolaboratif dengan berbagai komunitas, seperti Komunitas Fotografi Semarang (KFIS), Klitikan, komunitas Vespa, serta pelaku sektor pariwisata di kawasan Kota Lama.

Hal ini mencerminkan upaya AMBO dalam mengintegrasikan fungsi advokasi yang bersifat kritik terhadap kebijakan dengan fungsi edukasi dalam sosialisasi pengelolaan cagar budaya, sehingga aktivitas tersebut tidak hanya simbolis tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kapasitas dan solidaritas komunitas. Kolaborasi yang dilakukan dengan berbagai komunitas, termasuk

yang berasal dari luar kawasan Kota Lama, menunjukkan kemampuan AMBO dalam memperluas jejaring sosial dan menciptakan sinergi antar komunitas guna memperkuat suara kolektif.

Gambar 4. 7 Aksi Bagi-bagi Masker Oleh Komunitas AMBO



Sumber: Arsip Komunitas AMBO, 2019

Dokumentasi diatas menunjukan salah satu anggota AMBO yang sedang membagikan masker kepada pekerja kontruksi, dengan latar pembangunan jalan di Kota Lama Semarang. Aksi bagi-bagi masker merupakan komponen kegiatan komperensi pers, bersama sosialisasi, diskusi dan pameran foto. Kegiatan ini merujuk pada pendistribusian masker secara gratis yang dilakukan oleh AMBO bersama komunitas lokal, kepada masyarakat, wisatawan dan pekerja yang melakukan aktivitas di kawasan Kota Lama, aksi ini bertujuan mendukung kesehatan publik terhadap gangguan debu yang disebabkan dari proyek revitalisasi dari 2017-2019 lalu. Dijelaskan oleh narasumber sebagai berikut:

“Setelah proses revitalisasi, permasalahan terkait debu mengalami peningkatan intensitas, yang bahkan dilaporkan berdampak pada kesehatan pernapasan sejumlah warga. Menanggapi situasi tersebut, selain menginisiasi forum diskusi, AMBO turut mengadakan kegiatan pembagian masker sebagai bentuk respons nyata terhadap permasalahan lingkungan yang timbul” (Jessie, 2024)

Dalam kerangka revitalisasi kawasan heritage, peran AMBO memiliki signifikansi tersendiri karena mereka berperan dalam memastikan bahwa proses revitalisasi tidak mengabaikan dimensi sosial serta prinsip keberlanjutan

lingkungan. Melalui sorotan terhadap dampak negatif yang muncul, AMBO menegaskan urgensi penerapan pendekatan yang partisipatif dan responsif terhadap kondisi kehidupan masyarakat, alih-alih hanya berorientasi pada hasil fisik semata. Sejalan dengan hal tersebut, Tiesdell, Oc, dan Heath, mendefinisikan revitalisasi sebagai suatu proses transformasi yang bertujuan mengembalikan daya tarik suatu kawasan melalui strategi peningkatan kualitas lingkungan fisik, ekonomi, dan sosial. Pandangan ini menunjukkan bahwa revitalisasi tidak hanya berkutat pada aspek visual atau estetika, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan sosial dan peningkatan daya saing ekonomi wilayah yang bersangkutan (Tiesdell, Oc, dan Heath, 1996)

Mengindikasikan upaya AMBO membangun wacana berbasis kajian hukum dan kebijakan, sehingga kritik dan aspirasi komunitas memiliki dasar yang kokoh dalam dialog dengan pemerintah dan publik. Pemilihan lokasi kegiatan di ikon bersejarah seperti Gereja Blenduk secara simbolis memperkuat keterikatan aktivitas komunitas dengan warisan budaya, sekaligus menegaskan bahwa pelestarian cagar budaya merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, bukan semata kewajiban pemerintah. Konferensi pers dan kampanye budaya yang dijalankan AMBO juga mencerminkan fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan negara. AMBO secara aktif melakukan koreksi terhadap kebijakan top-down yang cenderung mengabaikan partisipasi masyarakat.

Jika dikaitkan dengan pendekatan ilmu politik, hal ini berkesinambungan dengan karakteristik *civil society* sebagai Keswadayaan (*Self-supporting*), yaitu *civil society* menjalankan aktivitasnya dengan mengandalkan sumber daya dari dalam komunitas itu sendiri. Sumber daya tersebut dapat berupa dana mandiri, kontribusi anggota, relasi sosial, hingga dukungan moral. AMBO menjalankan fungsi edukasi berbasis inisiatif komunitas, bukan program pemerintah. Ini menunjukkan kemampuan organisasi untuk menyusun programnya sendiri, sesuai kebutuhan lokal.

1. Advokasi Pemerintah

Kegiatan ini merujuk pada upaya AMBO untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, tindakan pemerintah agar memberikan insentif atau

keringanan, dalam hal ini untuk plestarian cagar budaya. Tindakan yang dilakukan melalui dialog dan kampanye. Keterlibatan komunitas AMBO bersama Badan Pelestarian Kawasan Kota Lama (BPK2L) dalam kegiatan bertajuk Kampanye Pelestarian Cagar Budaya yang dilaksanakan pada 31 Oktober hingga 1 November 2018, menunjukkan efektivitas sinergi antara aktor komunitas dan lembaga pemerintah dalam mendorong pelestarian kawasan heritage.

Gambar 4. 8 Pembukaan Acara “Kampanye Pelestarian Cagar Budaya” Di salah satu Bangunan Oudetrap



Sumber: Pemerintah Kota Semarang

Gambar diatas merupakan dokumentasi pembukaan Kampanye Cagar Budaya yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Direktur Pelestarian Cagar Budaya. Didampingi Wakil Walikota Semarang beserta jajarannya dan Surya Helmi selaku tim ahli cagar budaya nasional (Pemerintahan.kota, 2018).

Acara ini merupakan hasil kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud), melalui Direktorat Pelindungan Cagar Budaya dan Museum (PCBM), dan diselenggarakan di Gedung Oudetrap, kawasan Kota Lama Semarang. Kegiatan ini dirancang sebagai upaya strategis untuk mengedukasi dan mendorong partisipasi publik dalam pelestarian warisan budaya, khususnya bangunan bersejarah. Sejumlah agenda turut digelar dalam rangkaian acara tersebut, seperti penyerahan Sertifikat

dan Penanda Cagar Budaya Nasional (CBN), peresmian Penanda CBN di Gereja Blenduk, pemutaran film dokumenter pelestarian, talkshow, heritage trail, pameran cagar budaya, kegiatan mendongeng, lomba penulisan artikel, serta registrasi daring cagar budaya (Pemerintahan.kota, 2018).

Gambar 4. 9 Masyarakat Melakukan Registrasi Online Untuk Bngunan Cagar Budaya Yang Dimiliki



Sumber: Kemendikbud

Gambar diatas menunjukkan partisipan yaitu masyarakat yang sedang melakukan pendaftaran unutm bangunan cagar budaya merka, dibantu dengan staff Kemendikbud. Adapun mekanisme resmi pendaftaran cagar budaya saat ini telah difasilitasi oleh pemerintah melalui platform daring yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, yaitu laman cagarbudaya.kemdikbud.go.id. Melalui laman tersebut, masyarakat dapat mengunggah dokumen pendukung sebagai bagian dari prosedur registrasi. Selain itu, proses pendaftaran juga dapat dilakukan secara langsung dengan mendatangi kantor dinas kebudayaan setempat, dengan membawa sejumlah dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), informasi dan foto objek cagar budaya, bukti kepemilikan (sertifikat atau akta jual beli), serta denah bangunan. Mekanisme ini menunjukkan adanya upaya institusionalisasi pelestarian yang inklusif dan dapat diakses oleh masyarakat luas (Kemendikbud, 2018).

Peningkatan partisipasi warga dalam mendaftarkan bangunan cagar budaya juga dipengaruhi oleh kebijakan insentif berupa pengurangan Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB) *tax off* PBB sebesar 50% bagi bangunan yang telah terdaftar sebagai cagar budaya. Skema insentif ini terbukti menjadi daya tarik utama, sebagaimana diakui oleh sejumlah pemilik bangunan yang turut serta dalam kegiatan.

Hal ini menunjukkan bahwa pemberian stimulus ekonomi dapat menjadi strategi efektif dalam mendorong pelibatan masyarakat dalam pelestarian warisan budaya. Dengan capaian tersebut, kegiatan kampanye ini tidak hanya berhasil dari sisi kuantitatif, tetapi juga memperlihatkan peningkatan kualitas kesadaran kolektif warga terhadap pentingnya pelestarian cagar budaya sebagai bagian integral dari identitas sejarah dan potensi pariwisata Kota Lama Semarang (Isti, 2025). Dikutip dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah adanya kebijakan insentif dari pemerintah, khususnya berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 50%. Kebijakan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemilik bangunan, terutama mereka yang sebelumnya ragu atau belum memiliki motivasi untuk mendaftarkan bangunannya sebagai cagar budaya. Dengan adanya insentif ini, mereka merasa ada keuntungan konkret yang didapat, sekaligus turut berkontribusi dalam pelestarian kawasan heritage di Kota Lama” (Isti, 2025)

Dengan menjadikan peran sebagai strategi, AMBO mampu membangun pendekatan partisipatif yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga fungsional. Kebijakan insentif seperti pengurangan PBB menjadi hasil nyata dari upaya strategis ini, yang pada akhirnya memperkuat dukungan masyarakat terhadap pelestarian kawasan heritage Kota Lama Semarang. Dalam konsep Horoeпоetri dan Santosa, peran sebagai strategi, menunjukkan bahwa peranan dapat difungsikan sebagai pendekatan untuk membangun dan memperoleh dukungan dari masyarakat (Horoeпоetri & Santosa, 2003)

C. Refleksi teoritis AMBO dalam konteks *civil society*

1. *Free Public Sphere*

Menurut Muhammad AS Hikam, salah satu ciri utama dari *civil society* adalah keberadaan *free public sphere*, yaitu ruang interaksi yang terbebas dari dominasi negara maupun pasar. Di dalam ruang ini, warga negara bebas mengekspresikan pendapat, berdiskusi, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang

menyangkut kepentingan bersama. Ruang publik semacam ini menjadi basis terbentuknya opini publik yang rasional dan kritis (AS Hikam, 1999).

Jika dikaitkan dengan konteks penelitian ini, AMBO telah melakukan beberapa kegiatan yang telah mereka inisiasi. Masyarakat tidak semata-mata diperlakukan sebagai objek dari kebijakan, melainkan diakui sebagai subjek aktif yang memiliki hak untuk turut berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan kawasan *heritage* yang mereka huni. Dalam konteks ini, warga lokal tidak bersikap pasif dengan hanya menunggu intervensi negara, melainkan secara kolektif mengaktifkan potensi sosial yang mereka miliki. Hal ini selaras dengan temuan dalam penelitian ini, yang menunjukkan peran komunitas AMBO melalui berbagai kegiatan yang mereka inisiasi. Salah satunya adalah penyelenggaraan diskusi publik dan forum seperti Sambung Rasa, yang menjadi ruang pembelajaran bagi masyarakat dalam menyuarakan aspirasi, membangun kesepahaman bersama, serta merundingkan kepentingan kolektif

Berdasarkan teori civil society yang dikemukakan oleh Muhammad AS Hikam, keberadaan *free public sphere* menjadi elemen esensial dalam membentuk masyarakat sipil yang demokratis. Ruang publik yang bebas dari dominasi negara maupun pasar ini memungkinkan warga negara untuk mengekspresikan pendapat, berdiskusi, serta berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan kolektif. Dalam konteks penelitian ini, AMBO sebagai komunitas yang bergerak di bidang pelestarian *heritage* telah berhasil mengaktualisasikan konsep *free public sphere* melalui berbagai bentuk partisipasi dan ekspresi warga yang bersifat deliberatif dan inklusif.

Manifestasi nyata dari ruang publik tersebut terlihat dalam forum Sambung Rasa, yang menjadi wadah dialog antarwarga dan pemangku kepentingan secara terbuka. Forum ini tidak hanya memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga membangun konsensus bersama dalam menentukan arah pengelolaan kawasan *heritage*. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pasif dari pembangunan, melainkan sebagai subjek aktif yang memiliki kapasitas untuk memengaruhi proses pengambilan kebijakan.

Lebih jauh, praktik *free public sphere* juga terwujud dalam komunikasi digital sehari-hari, seperti penggunaan grup WhatsApp oleh warga, pengelola, dan komunitas. Meskipun bersifat informal, ruang ini berfungsi sebagai *micro-public sphere* yang memfasilitasi artikulasi isu-isu lokal, pertukaran ide, hingga penyampaian kritik

terhadap kebijakan pengelolaan kawasan. Hal ini mencerminkan tumbuhnya kesadaran kolektif dan solidaritas sosial di tingkat akar rumput.

Selain itu, kegiatan advokasi berbasis budaya yang diselenggarakan oleh AMBO, seperti pameran foto dan aksi simbolik dalam rangkaian konferensi pers Festival Kota Lama, juga memperkuat posisi komunitas sebagai penggerak ruang publik kultural. Melalui medium seni dan budaya, AMBO mendorong warga untuk mengemukakan narasi dan identitas mereka secara bebas. Praktik ini memperlihatkan bahwa advokasi tidak selalu hadir dalam bentuk formal, tetapi juga dapat diekspresikan secara reflektif dan halus melalui pendekatan kultural.

Dengan demikian, jika dilihat dari karakteristik civil society AMBO telah menjalankan fungsinya sebagai *free public sphere*

1. Demokratis

Prinsip demokratis dalam *civil society* menurut AS Hikam mencakup keterlibatan aktif warga dalam proses kolektif, kolaborasi lintas sektor, serta pelibatan komunitas dalam perumusan dan pelaksanaan agenda publik (AS Hikam, 1999). Dalam pandangan AS Hikam, *civil society* tidak semata bergerak dalam ruang formal-politik seperti legislasi atau regulasi, melainkan juga melalui tindakan-tindakan kultural yang memperkuat identitas warga, solidaritas komunitas, serta kesadaran kolektif terhadap ruang dan hak publik.

Hal ini tercermin dalam kegiatan Festival Kota Lama yang diselenggarakan oleh AMBO bersama OSF merupakan bentuk nyata dari praktik demokrasi sosial, festival ini mengandung dimensi sosial-politik yang lebih dalam. Kegiatan ini diorganisir secara kolaboratif, melibatkan beragam aktor baik warga lokal, pelaku seni, komunitas sejarah, maupun pelaku usaha dalam proses perencanaan hingga pelaksanaannya. Meskipun tidak secara langsung mempengaruhi kebijakan revitalisasi Kota Lama, kehadiran festival ini mencerminkan watak demokratis dari masyarakat sipil. Demokrasi yang dijalankan tidak dalam bentuk prosedural institusional seperti pemilu atau musrenbang, melainkan melalui partisipasi warga dalam agenda-agenda kolektif berbasis budaya yang inklusif dan deliberatif. Festival Kota Lama yang dikelola oleh AMBO menampilkan nilai-nilai demokratis melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif. Kerja sama dengan berbagai pihak (komunitas, pelaku budaya, masyarakat lokal) mencerminkan prinsip inklusi dan deliberasi yang menjadi ciri khas demokrasi partisipatif.

Masyarakat sebagai civil society menyadari bahwa mereka memiliki hak atas kebebasan dan kewajiban dalam berekspresi sedangkan negara melalui pemerintahan memberikan ruang bagi mereka untuk menartikulasikan kebebasannya. kebebasan tersebut bukanlah kebenaran atas sikap barbar masyarakat (Kharisman, 2023). Dalam konteks ini, inisiatif kampanye kebudayaan yang dilakukan menunjukkan bentuk nyata dari tanggung jawab civil society, yaitu menyuarakan permasalahan yang dialami oleh pemilik bangunan cagar budaya di kawasan Kota Lama, khususnya terkait beban pajak yang meningkat setiap tahun.

Keterlibatan komunitas AMBO dalam menginisiasi kampanye pelestarian cagar budaya yang kemudian menghasilkan insentif berupa pengurangan pajak, mencerminkan peran strategis komunitas ini sebagai aktor kebudayaan sekaligus penggerak advokasi kebijakan publik. Meskipun kebijakan tersebut dirumuskan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kontribusi AMBO pada tahap pra-kebijakan, terutama melalui pelaksanaan survei lapangan dan penghimpunan aspirasi warga, menjadi wujud nyata dari praktik demokrasi partisipatif yang bersifat substantif. Aktivitas survei yang dilaksanakan oleh AMBO merupakan bagian dari proses deliberatif, di mana data empiris, suara masyarakat, serta pengalaman lokal menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan fiskal yang berkaitan dengan pelestarian warisan budaya.

Dengan demikian, AMBO tidak hanya menjalankan fungsi sosial dan kultural, tetapi juga berperan aktif dalam pembentukan kebijakan publik yang berakar pada kebutuhan serta aspirasi masyarakat lokal. Peran ini menunjukkan bahwa AMBO merupakan entitas civil society yang berkontribusi terhadap pembangunan tata kelola publik yang inklusif dan responsif. Di sisi lain, keterbukaan pemerintah dalam menyediakan ruang partisipasi bagi AMBO juga merefleksikan praktik demokrasi yang sehat dan berorientasi pada pelibatan masyarakat.

2. Toleran

Dalam pemikiran Muhammad AS Hikam, toleransi merupakan salah satu karakter kunci dari *civil society* atau masyarakat madani. Toleransi tidak hanya dipahami sebagai sikap menerima keberagaman, tetapi juga sebagai upaya aktif untuk menciptakan ruang publik yang memungkinkan keberagaman itu dapat diekspresikan dan dihargai secara setara. Dalam kerangka ini, toleransi adalah prasyarat

terbentuknya ruang deliberatif, tempat berbagai kelompok dalam masyarakat dapat berinteraksi, berdialog, dan bernegosiasi secara damai serta konstruktif (Hikam, 1999).

Maka, aspek toleransi dalam kerangka masyarakat sipil menurut Muhammad AS Hikam tidak sekadar dimaknai sebagai sikap menerima keberagaman, tetapi lebih jauh menekankan pada pentingnya membangun ruang bersama yang memungkinkan berbagai kelompok sosial untuk menyuarakan pandangan, pengalaman, dan ekspresi budayanya secara setara. Toleransi, dalam hal ini, tidak berhenti pada pengakuan terhadap perbedaan, melainkan mencakup penyediaan arena yang inklusif bagi pertukaran gagasan dan artikulasi identitas kolektif.

Pameran foto yang dilaksanakan dalam serangkaian konferensi pers, sebagai bentuk kolaborasi lintas komunitas yang diselenggarakan AMBO menjadi representasi konkret dari nilai tersebut. Melalui kegiatan ini, berbagai kelompok baik dari kalangan seniman, pegiat sejarah, hingga warga biasa diberi ruang untuk mempresentasikan narasi mereka mengenai Kota Lama tanpa adanya dominasi satu perspektif tertentu. Setiap komunitas memiliki peluang yang sama untuk tampil dan didengar. Hal ini memperlihatkan bagaimana prinsip toleransi dijalankan secara substantif: tidak hanya sebagai sikap pasif menerima, tetapi sebagai prakarsa aktif membangun ruang ekspresi yang saling mengakui dan menghargai perbedaan.

Dengan menciptakan ruang kultural yang terbuka dan partisipatif, AMBO tidak hanya memperkuat ikatan sosial antarkelompok, tetapi juga mendorong terbentuknya solidaritas sosial yang bersumber dari pengakuan atas keberagaman. Praktik ini sangat sejalan dengan karakteristik *civil society* versi AS Hikam, di mana toleransi menjadi fondasi penting dalam membentuk masyarakat yang inklusif, egaliter, dan demokratis

3. Kemajemukan

Menurut AS Hikam, kemajemukan (*pluralism*) merupakan salah satu pilar utama dari *civil society* atau masyarakat madani. Kemajemukan dimaknai sebagai pengakuan dan penerimaan atas keberadaan kelompok-kelompok sosial yang berbeda berdasarkan etnisitas, budaya, agama, dan kepentingan, yang memiliki ruang untuk mengekspresikan diri secara setara dalam tatanan kehidupan publik. Bagi Hikam, masyarakat sipil yang sehat tidak hanya menerima keberagaman secara pasif, tetapi secara aktif menciptakan ruang diskursif yang memungkinkan kelompok-kelompok

berbeda berinteraksi secara inklusif dan demokratis. Dalam kerangka tersebut, toleransi bukan sekadar soal membiarkan perbedaan, tetapi juga menyediakan forum untuk saling mendengar, memahami, dan membangun ekspresi kolektif tanpa dominasi satu pihak terhadap yang lain (Hikam, 1999).

Gagasan tersebut tercermin dalam praktik komunitas AMBO di Kota Lama Semarang, yang memposisikan kemajemukan sebagai kekuatan dalam pengelolaan ruang publik dan pelestarian *heritage*. Salah satu bentuk aktualisasi nilai kemajemukan ditunjukkan melalui penyelenggaraan kampanye budaya seperti festival tahunan yang menampilkan ragam tarian, musik, dan kuliner lokal dari berbagai kelompok masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekreasi atau pertunjukan seni, tetapi juga sebagai medium untuk mengekspresikan identitas budaya yang beragam secara kolektif. Dengan demikian, festival tersebut menjadi ruang publik alternatif yang memungkinkan interaksi lintas komunitas secara egaliter.

Lebih jauh, peran advokatif AMBO dalam mendorong kebijakan pelestarian kawasan *heritage* juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip kemajemukan. Melalui pendekatan deliberatif kepada pemerintah, AMBO memperjuangkan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menguntungkan satu pihak atau kelompok dominan, melainkan memperhatikan kebutuhan, nilai, dan kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat. Hal ini selaras dengan prinsip *public reason* dalam konsep masyarakat sipil menurut Hikam, di mana ruang publik menjadi tempat terjadinya negosiasi kepentingan secara rasional dan terbuka antarpemangku kepentingan.

Penggunaan media digital seperti *WhatsApp* sebagai kanal komunikasi komunitas juga memperkuat inklusivitas dan keberagaman dalam partisipasi. Platform ini memungkinkan individu dari latar belakang berbeda baik usia, profesi, maupun etnis untuk terlibat dalam diskusi, pengambilan keputusan, serta pertukaran informasi secara horizontal. Praktik ini mengafirmasi bahwa AMBO tidak hanya berperan dalam pelestarian fisik kawasan *heritage*, tetapi juga dalam membentuk *civic culture* yang plural dan demokratis sebagaimana diidealkan oleh AS Hikam.

Dengan demikian, praktik yang dilakukan oleh AMBO sejalan dengan gagasan kemajemukan dalam teori *civil society* menurut Hikam, di mana keberagaman bukan dianggap sebagai hambatan, melainkan sebagai potensi sosial yang harus dirawat dan dimanfaatkan dalam membangun kehidupan bersama yang inklusif dan berkeadaban.

BAB V

DAMPAK KETERLIBATAN KOMUNITAS AMBO PADA REVITALISASI KOTA LAMA SEMARANG TAHUN 2019-2024

Bab ini menyajikan informasi serta analisis hasil penelitian yang berfokus pada pengaruh AMBO dalam aspek fisik, sosial dan ekonomi. Analisis ini diperoleh setelah dilakukan pengumpulan data melalui wawancara serta studi literatur yang bersumber dari berbagai dokumen pendukung. Dalam bab ini, temuan lapangan diuraikan secara mendalam untuk mengevaluasi dampak keterlibatan AMBO dalam berbagai sektor, mencakup aspek fisik, sosial dan ekonomi.

A. Penyediaan Kantong Parkir

Lingkup peran komunitas AMBO dalam proses penataan kawasan Kota Lama Semarang tidak mencakup seluruh aspek pengelolaan ruang dan infrastruktur secara menyeluruh. Keterlibatan AMBO lebih terfokus pada isu-isu tertentu yang dinilai memiliki urgensi tinggi terhadap keberlanjutan kawasan cagar budaya. Dalam konteks ini, AMBO memainkan peran strategis sebagai fasilitator komunikasi antara warga, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Salah satu kontribusi konkret yang dapat diidentifikasi ialah advokasi kebijakan kepada pemerintah terkait penyediaan fasilitas pendukung, khususnya kantong parkir. Advokasi ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran atas maraknya praktik parkir liar yang tidak hanya memunculkan tarif yang tidak rasional, tetapi juga berpotensi merusak tatanan estetika dan integritas kawasan heritage. dikutip dari hasil notulensi sebagai berikut:

“Di sisi lain, pemerintah juga mengeluarkan aturan pelarangan parkir di depan gedung, namun pada saat itu belum menyediakan fasilitas kantong parkir alternatif yang memadai, sehingga menimbulkan persoalan baru bagi pengguna dan pengelola ruang di kawasan tersebut” (Jessie, 2024).

Melalui pendekatan dialogis dan partisipatif, sambung rasa. AMBO mendorong pentingnya penyediaan area parkir yang terorganisasi dan terintegrasi dengan baik. Respons positif dari pemerintah terhadap usulan ini diwujudkan melalui penyediaan lahan parkir khusus di sekitar kawasan Kota Lama, yang

mencerminkan adanya pola kemitraan fungsional antara aktor masyarakat sipil dan pemerintah dalam mendukung tata kelola ruang publik yang berkelanjutan.

Secara substantif, Forum Sambung Rasa merupakan bentuk kanal deliberatif yang mencerminkan tingkat partisipasi partisipatif dan kolaboratif, bukan sekadar simbolik. Forum ini memberikan ruang bagi warga untuk mengartikulasikan persoalan langsung yang mereka alami akibat proyek revitalisasi, seperti gangguan terhadap akses, dampak ekonomi akibat perubahan fungsi kawasan, hingga ketidaksiapan dalam menanggapi regulasi baru. Keterlibatan warga dalam forum ini menunjukkan bahwa partisipasi yang difasilitasi oleh AMBO bersifat bottom-up, di mana suara masyarakat menjadi dasar perumusan rekomendasi kebijakan, bukan sekadar pelengkap legitimasi formal proyek revitalisasi.

Gambar 5. 1 Kantong Parkir Kota Lama 2015



Sumber: Google Earth 2015

Gambar di atas menunjukkan kondisi Jalan Kedasih sebelum dilakukan proses revitalisasi pada tahun 2022. Pada saat itu, jalan tersebut belum difungsikan sebagai kantong parkir sepeda motor dan masih berperan sebagai jalur lalu lintas biasa tanpa penataan khusus. Revitalisasi dilakukan sebagai upaya penataan ulang ruang publik untuk mendukung kebutuhan parkir kendaraan roda dua di kawasan tersebut serta meningkatkan efisiensi penggunaan lahan di area perkotaan.

Gambar 5. 2 Kantong Parkir Kota Lama Semarang



Sumber: Peneliti, 2025

Gambar di atas menunjukkan kondisi terbaru Jalan Kedasih setelah selesai direnovasi tahun 2022. Kini, selain tampak lebih tertata dan rapi, jalan tersebut juga difungsikan sebagai kantong parkir. Pemanfaatan ruang ini menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan kendaraan di area sekitar, sekaligus mendukung kelancaran lalu lintas dan kenyamanan pengunjung maupun warga setempat

B. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Partisipasi AMBO dalam revitalisasi Kota Lama tidak hanya membawa perubahan pada aspek fisik kawasan, tetapi juga berdampak signifikan pada kehidupan sosial masyarakat. Melalui berbagai inisiatif dan keterlibatan aktifnya, AMBO berhasil mendorong perubahan dalam dinamika sosial warga Kota Lama, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berbasis partisipasi komunitas. Salah satu dampak sosial yang paling terlihat adalah peningkatan solidaritas sosial di antara warga. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam berbagai kegiatan komunitas, mulai dari kerja bakti, festival budaya, hingga forum diskusi.

Gambar 5. 3 Media Komunitas Peduli Kota Lama Semarang



Sumber: Facebook komunitas

Gambar diatas merupakan bentuk peningkatan partisipasi yang dilakukan masyarakat lokal melalui laman facebook komunitas untuk berbagi informasi, baik mulai dari kendala, informasi kegiatan maupun rekomendasi tempat di Kota Lama.

Partisipasi aktif ini menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap Kota Lama, di mana warga tidak lagi hanya sebagai penghuni atau pelaku usaha, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem sosial yang menjaga dan mengembangkan kawasan tersebut. Selain itu, kesadaran akan nilai historis Kota Lama juga meningkat berkat berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh AMBO. Melalui forum diskusi, seminar, dan aktivitas berbasis budaya, masyarakat mulai memahami bahwa Kota Lama bukan sekadar destinasi wisata, tetapi juga bagian penting dari identitas budaya mereka. Kesadaran ini mendorong warga untuk lebih peduli terhadap pelestarian kawasan dan aktif terlibat dalam upaya menjaga warisan sejarah yang ada.

Dari perspektif politik, keberadaan AMBO tidak hanya mencerminkan keterlibatan masyarakat sipil dalam pembangunan kawasan, tetapi juga merupakan bagian integral dari strategi pemerintah untuk memperkuat legitimasi Kota Lama Semarang sebagai kandidat warisan budaya dunia versi UNESCO. Keterlibatan AMBO dalam berbagai forum kebijakan, penyusunan regulasi, hingga diskusi strategis mengenai perencanaan kawasan menunjukkan adanya sinergi antara

negara dan komunitas dalam tata kelola kawasan bersejarah. dikutip dari hasil wawancara sebagai berikut:

“AMBO memainkan peran signifikan dalam pelestarian serta revitalisasi identitas kultural Kota Lama. Melalui penyelenggaraan kegiatan seperti acara inovatif, pameran, dan berbagai program berbasis komunitas, AMBO berupaya menghidupkan kembali narasi sejarah serta nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini cenderung terpinggirkan” (Jessie, 2024).

Mengacu pada pemikiran Asworth tentang revitalisasi *heritage*, Pelestarian adaptif (*conservation*). Paradigma conservation atau pelestarian adaptif dalam revitalisasi heritage menekankan pentingnya menjaga nilai historis suatu bangunan sambil tetap membuka ruang bagi penyesuaian fungsi sesuai kebutuhan masa kini, yang sering disebut sebagai *adaptive reuse*.

Pendekatan ini memandang warisan budaya sebagai ruang yang hidup dan dinamis, bukan sekadar objek statis yang dibekukan dalam waktu. Indikator revitalisasi dalam paradigma ini mencakup pemanfaatan kembali bangunan heritage untuk fungsi baru seperti kafe, museum, atau ruang galeri; desain baru yang menyatu secara harmonis dengan elemen asli bangunan; peningkatan aksesibilitas melalui penambahan fasilitas seperti jalur kursi roda atau pencahayaan modern; serta adanya keseimbangan antara pelestarian nilai historis dengan produktivitas ekonomi (Ashworth, Graham, & Tunbridge, 2000).

Ashworth menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat memiliki peran krusial dalam menjamin keberlanjutan proses revitalisasi. Ia juga memperingatkan bahwa dominasi intervensi dari pihak pemerintah maupun investor cenderung mengabaikan perspektif lokal, yang dapat melemahkan legitimasi dan efektivitas kebijakan revitalisasi. Dalam konteks ini, AMBO hadir sebagai representasi komunitas lokal yang berperan aktif dalam pelestarian dan revitalisasi kawasan. Bukan sekadar sebagai pengamat pasif, AMBO turut menjadi pelaku utama yang mendorong perubahan melalui berbagai aktivitas seperti penyelenggaraan pameran, acara kreatif, serta program berbasis komunitas. Upaya-upaya tersebut memungkinkan proses revitalisasi tetap terhubung dengan nilai-nilai sosial dan budaya lokal, sehingga menghindarkan kawasan dari bentuk revitalisasi yang terlepas dari konteks identitas historisnya, sebagaimana dikhawatirkan oleh Ashworth

Upaya ini menjadikan AMBO tidak hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah, tetapi juga sebagai mitra kritis yang aktif mengawal proses pembangunan dengan tetap menekankan pentingnya pelestarian identitas historis sebagai bagian tak terpisahkan dari memori kolektif bangsa. Sinergi antara fungsi politik dan kultural AMBO tersebut memberikan dampak yang nyata terhadap dinamika kawasan Kota Lama. Salah satu indikatornya adalah peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dalam beberapa tahun terakhir, yang mencerminkan tumbuhnya minat publik terhadap kawasan heritage sebagai ruang interaksi budaya dan edukasi sejarah.

Tabel 5. 1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Semarang



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang

Berdasarkan data yang tersaji dalam tabel mengenai kunjungan wisatawan ke Kota Semarang, diketahui bahwa pada tahun 2019 jumlah total kunjungan mencapai 7.305.559 orang, yang terdiri atas 7.223.529 wisatawan domestik dan 82.030 wisatawan mancanegara. Namun demikian, pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan yang signifikan dalam jumlah kunjungan, yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 serta penerapan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat guna menekan penyebaran virus. Memasuki tahun 2022, tren kunjungan wisatawan mulai menunjukkan pemulihan, yang kemudian terus meningkat hingga tahun 2023. Pada tahun 2023, total kunjungan tercatat sebanyak 6.492.875 orang, yang terdiri atas 6.478.883 wisatawan domestik dan 13.992

wisatawan mancanegara. Hasil ini menunjukkan total kenaikan wisatawan sebanyak 29,86% Per Tahun (BPS Semarang, 2025).

C. Penguatan Posisi Komunitas

1. Memfasilitasi ruang kritik terhadap arah revitalisasi

Upaya AMBO dalam memfasilitasi ruang kritik dalam revitalisasi dengan diselenggarakannya konferensi pers. pendekatan ini memberikan kontribusi signifikan dalam membangun pemahaman kolektif masyarakat mengenai pentingnya pelestarian kawasan cagar budaya. informasi terkait risiko, manfaat serta urgensi disampaikan langsung ke warga. kehiatan ini juga berhadil membawa isuisu keruang publik, seperti gartifikasi, perubahan fungsi bangunan dan tekanan ekonomi warga lokal.

dampaknya pemerintah dan masyarakat tidak bisa lagi melihat revitalisasi hanya dari sisi fisik atau komersial, tapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial berkelanjutan. dilihat dari pembangunan revitalisasi yan diberi ruang untuk menyuarakan pendapat mereka dalam kegiatan konferensi pers yang memberi dampak pada percepatan proses pembangunan revitalisasi yang molor

2. Mendorong kolaborasi lintas komunitas dan stakehorders

Kolaborasi lintas aktor yang terbangun dalam pengelolaan Kota Lama Semarang telah menghasilkan perubahan mendasar dalam cara para pemangku kepentingan memandang kawasan tersebut. Melalui sinergi antara komunitas, pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil, terbentuk rasa kepemilikan kolektif terhadap Kota Lama. Jika sebelumnya keterlibatan AMBO berperan sebagai pendengar dan pencatat berbagai keresahan warga, Fungsi ini menjadi penting karena tidak semua proses revitalisasi mampu menjangkau aspirasi warga secara langsung, terutama mereka yang terdampak secara sosial, ekonomi, maupun ruang hidupnya.

Hasil dari proses ini kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk masukan dan rekomendasi kebijakan yang dikirimkan secara resmi kepada lembaga pengelola kawasan, seperti (Badan Pengelola Kawasan Kota Lama) BPK2L. Berdasarkan kutipan dari wawancara sebagai berikut:

“Melalui proses dialog yang konstruktif, sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, AMBO menerjemahkan aspirasi warga ke

dalam format rekomendasi kebijakan yang dapat diterima dan dipertimbangkan secara resmi oleh BPK2L“ (Barotho, 2025).

AMBO berperan sebagai mediator atau *bridging actor* antara masyarakat dan pemerintah, khususnya BPK2L (Badan Pengelola Kawasan Kota Lama). Dalam konteks ini, AMBO tidak sekadar menyampaikan aspirasi warga secara pasif, tetapi secara aktif melakukan proses dialog yang konstruktif. Ini menandakan bahwa AMBO tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mengolah dan menginstitutionalisasi suara warga agar dapat diterima dalam logika kebijakan formal.

Transformasi kelembagaan dari BPK2L ke BPSKL menjadi titik penting dalam dinamika peran evaluasi komunitas. BPSKL adalah lembaga Non-Struktural yang keanggotannya melibatkan unsur pemerintah, swasta dan masyarakat, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Pembentukan organisasi didasarkan pada Peraturan Wali Kota Semarang (Perwali) Nomor 11 Tahun 2024 dan Surat Keputusan Wali Kota Semarang 000.07/389 Tahun 2024. Tugas BPSKL adalah (Perwali No 11 Tahun 2024):

1. Melakukan kegiatan administrasi, pembuatan rencana dan basis data dalam mengelola Situs Kota Lama;
2. Dalam mengelola Kota Lama, BPSKL bertugas dalam melakukan kegiatan promosi mengenai program revitalisasi, kerjasama, penanaman modal dan pencarian sumber dana serta advokasi.
3. Dalam pengelolaan Kota Lama, BPSKL bertugas dalam merekomendasikan perizinan, peminjaman dana, dan juga mengawasi konstruksi

Dalam mengelola Kota Lama, BPSKL bertugas dalam pemeliharaan, pengembalian dan peningkatan bentuk dan fungsi Kota Lama berdasarkan nilai sejarah dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Untuk melaksanakan tugasnya, BPSKL mempunyai fungsi:

- a. Menyusun dan melaksanakan program kerja dalam manajemen pengelolaan;
- b. Melaksanakan kegiatan melestarikan yang mencakup melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan;
- c. Kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban untuk mengelola Kota Lama ditingkatkan, dikembangkan dan diwujudkan oleh BPSKL;

- d. Penjaminan perlindungan dan pemanfaatan situs Kota Lama dengan pengembangan dan penerapan kebijakan;
- e. Memberikan informasi dan menyediakan promosi untuk masyarakat;
- f. Melaksanakan kegiatan dalam menanggulangi bencana;
- g. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidangnya.

Jika sebelumnya partisipasi masyarakat cenderung bersifat informal dan berada diluar struktur, AMBO dalam BPSKL dinilai lebih responsif terhadap masukan komunitas dan membuka ruang partisipasi yang luas. meskipun keberadaannya masi tergolong baru, diharapkan transformasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menandai perubahan orientasi kelembagaan yang lebih menekankan pada aspek pelestarian situs sejah dan melibatkan masyarakat. Dikutip dalam wawancara berikut:

“Berbeda dengan lembaga sebelumnya, BPSKL dinilai lebih progresif karena telah membuka ruang keterlibatan masyarakat secara langsung dalam struktur kelembagaannya. Meskipun keberadaannya masi tergolong baru, partisipasi yang mulai diakomodasi membuat arah program kerja BPSKL lebih jelas dan terfokus. Kami (AMBO) merasa memiliki ruang yang lebih luas untuk menyampaikan aspirasi dan masukan mengenai perkembangan Kota Lama” (Bharoto, 2025)

Tindakan yang dilakukan AMBO dalam mengawal proses revitalisasi kawasan Kota Lama Semarang. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan tingkat kepedulian dan tanggung jawab komunitas terhadap keberlangsungan program revitalisasi, tetapi juga menegaskan pentingnya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam praktik tata kelola pembangunan kawasan heritage. AMBO secara aktif melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan proyek, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi hasil, guna memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan sesuai dengan target waktu, kualitas, dan prinsip pelestarian nilai-nilai sejarah. Ketika ditemukan keterlambatan pelaksanaan atau penyimpangan di lapangan, AMBO tidak segan menyuarakan kritik konstruktif melalui berbagai forum publik maupun dialog dengan pemangku kepentingan terkait.

BAB VI

PENUTUP

Bab Penutup ini berisi kesimpulan dari pemaparan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian, juga berisi saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas laporan hasil penelitian yang dilakukan. Kesimpulan ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk memahami makna inti pembahasan rumusan masalah penelitian.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian studi mengenai *civil society* dalam revitalisasi *heritage*: studi pada komunitas AMBO dalam revitalisasi Kota Lama tahun 2019-2024 dapat ditarik 2 poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran AMBO sebagai aktor masyarakat sipil yang signifikan dalam proses revitalisasi kawasan heritage Kota Lama Semarang. Berdasarkan temuan penelitian, komunitas AMBO dapat dikategorikan sebagai bagian dari *civil society* karena telah memenuhi sejumlah karakteristik utama sebagaimana dirumuskan oleh AS Hikam (1999). AMBO menunjukkan eksistensinya sebagai entitas sosial yang otonom, dengan mendorong terbentuknya ruang publik yang bebas (*free public sphere*) melalui kegiatan diskusi terbuka dan forum partisipatif seperti Sambung Rasa, konferensi pers, pemanfaatan media. Selain itu, AMBO juga mencerminkan nilai-nilai demokrasi, keterbukaan terhadap perbedaan (toleransi), serta kemajemukan, yang menjadi fondasi penting dalam kehidupan masyarakat sipil yang sehat.

Meskipun demikian, perlu diakui bahwa keterlibatan AMBO dalam proses demokrasi formal, seperti perumusan kebijakan publik secara langsung, masih relatif terbatas. Namun, hasil wawancara dan pengamatan lapangan menunjukkan adanya potensi perkembangan yang signifikan. Hal ini tercermin dari langkah strategis yang telah diambil AMBO, salah satunya melalui keterlibatannya dalam Badan Pengelola Situs Kawasan Kota Lama (BPSKL) pada tahun 2023. Langkah tersebut menandai penguatan posisi AMBO sebagai aktor yang tidak hanya bergerak dalam lingkup advokasi sosial, tetapi juga mulai masuk ke dalam struktur formal pengelolaan kawasan.

Dengan demikian, meskipun belum sepenuhnya memenuhi semua dimensi ideal *civil society* khususnya dalam aspek keadilan sosial yang masih perlu diperjuangkan lebih lanjut AMBO telah memainkan peran penting sebagai jembatan antara masyarakat dan pemangku kebijakan. Melalui berbagai inisiatifnya, AMBO memperlihatkan kapasitas sebagai komunitas yang mampu membangun kesadaran kolektif, memperkuat partisipasi warga, dan membuka ruang dialog dalam pengelolaan kawasan *heritage*. Oleh karena itu, AMBO layak dikategorikan sebagai *civil society* yang memiliki potensi untuk terus berkembang dan berkontribusi lebih jauh dalam proses demokratisasi dan tata kelola kawasan *heritage* yang inklusif.

2. AMBO sebagai *civil society*, telah memberikan pengaruh peran komunitas AMBO dalam aspek:

a. Penyediaan Kantong Parkir:

Keterlibatan AMBO dalam advokasi penyediaan kantong parkir menjadi contoh konkret partisipasi komunitas dalam menyuarakan kebutuhan warga terkait pengelolaan ruang publik. Melalui forum Sambung Rasa, AMBO memfasilitasi diskusi terbuka antara warga dan pemerintah, sehingga menghasilkan respons kebijakan berupa penyediaan lahan parkir alternatif. Ini menunjukkan adanya hubungan kemitraan fungsional antara masyarakat sipil dan pemerintah yang memungkinkan terciptanya kebijakan berbasis kebutuhan nyata di lapangan.

2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat:

Transformasi sosial yang difasilitasi AMBO membuktikan bahwa revitalisasi *heritage* tidak hanya ditentukan oleh intervensi fisik, tetapi juga oleh penguatan modal sosial dan kolektivitas warga. Kegiatan budaya, diskusi, dan pengelolaan media komunitas menunjukkan bahwa AMBO berhasil membangun kesadaran historis warga sekaligus memperluas makna “keterlibatan” dalam revitalisasi menjadi lebih inklusif, aktif, dan bottom-up. Hal ini selaras dengan paradigma *adaptive reuse* (Ashworth et al., 2000) yang menekankan

pentingnya keberlanjutan nilai budaya melalui fungsi baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat kini.

3. Penguatan Posisi Komunitas:

AMBO juga memainkan peran strategis dalam membuka ruang kritik dan memperluas akses partisipasi warga dalam arah kebijakan revitalisasi. Dengan hadirnya BPSKL sebagai bentuk transformasi kelembagaan yang lebih terbuka terhadap partisipasi komunitas, AMBO memiliki peran baru sebagai bagian dari struktur resmi pengelolaan kawasan. Peran ini tidak hanya meningkatkan legitimasi komunitas, tetapi juga memastikan adanya mekanisme check and balance dalam proses revitalisasi, termasuk dalam hal pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan proyek.

B. Saran

Penelitian ini berfokus pada peran komunitas AMBO sebagai aktor masyarakat sipil dalam proses revitalisasi kawasan *heritage* Kota Lama Semarang, dengan menggunakan pendekatan teori *civil society* dari Alexis de Tocqueville. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan ruang lingkup yang hanya mencakup periode 2019–2024 serta lebih menekankan pada dinamika komunikasi antara komunitas dan pemerintah melalui studi kasus AMBO. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan beberapa arah pengembangan berikut:

1. Studi Komparatif Antar Komunitas Sipil

Penelitian mendatang dapat melakukan studi komparatif antara AMBO dan komunitas sipil lainnya yang juga berperan dalam pelestarian kawasan *heritage* di kota-kota lain di Indonesia, seperti FKKK di Surabaya atau Forum Kota Pusaka di Yogyakarta. Hal ini dapat memperkaya pemahaman tentang pola partisipasi masyarakat dalam konteks tata kelola *heritage*.

2. Analisis Kinerja Kelembagaan Pemerintah

Mengingat BPSKL sebagai lembaga pengelola baru, riset lanjutan dapat berfokus pada evaluasi kinerja kelembagaan BPSKL dalam membangun sistem partisipatif dan responsif terhadap masukan masyarakat sipil.

Pendekatan *governance assessment* atau *policy responsiveness* dapat digunakan sebagai kerangka analisis.

3. Eksplorasi Peran Digital Civil Society

Dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam aktivitas sosial, penelitian ke depan dapat mengeksplorasi bagaimana peran digital *civil society* (komunitas sipil berbasis platform digital) dalam mendorong keterlibatan publik dan mempengaruhi arah kebijakan heritage. Hal ini penting untuk melihat transformasi peran *civil society* di era digital.

Daftar Pustaka

- ARSIP REVITALISASI KOTA LAMA SEMARANG 1983-2022., A. R. (2024)
<https://www.arpusda.semarangkota.go.id/blog/detail/kota-semarang-usulkan-mkb-tahun-2024-dengan-tema-arsip-revitalisasi-kota-lama-semarang-tahun-1983-2>.
- Adiakurnia, M. I. (2018). Revitalisasi Kota Lama Semarang hambat mobilitas warga. Kompas.com. <https://biz.kompas.com/read/2018/04/24/192425128/revitalisasi-kota-lama-semarang-hambat-mobilitas-warga>
- Aji, B. B. (2022). Implementasi Program Revitalisasi di Kawasan Kota Lama Semarang. . *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(1), 80-95.
- Aji, A. (2018, September 24). AMBO harapkan revitalisasi Kota Lama segera selesai. Suara Merdeka. <https://www.suaramerdeka.com/semarang-raya/pr-0480930/ambo-harapkan-revitalisasi-kota-lama-segera-selesai>
- Ajie, M. H. (2019). Kementerian PUPR klaim tuntaskan revitalisasi tahap pertama Kota Lama. Jateng Today. <https://jatengtoday.com/kementerian-pupr-klaim-tuntaskan-revitalisasi-tahap-pertama-kota-lama>
- Amanda, D. F., & Nurjayanti, W. (2024, June). Eksistensi Creative Hub terhadap Minat Pengunjung di Cagar Budaya Lokananta, Surakarta. In Prosiding (SIAR) Seminar Ilmiah Arsitektur (pp. 67-76).
- Andrea Fatubun, (2018). Ambo minta pekerjaan revitalisasi kota lama dikebut. <https://www.ayosemarang.com/semarang-raya/pr-77770263/AMBO-Minta-Pekerjaan-Revitalisasi-Kota-Lama-Dikebu>.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224
- Ashworth, G. J., & Tunbridge, J. E. (2008). *The Tourist-Historic City: Retrospect and Prospect of Managing the Heritage City*. Oxford: Pergamon
- Avianto, B. N. (2023). Pengembangan Model Ethnic Tourism Berbasis Komunitas Adat Di Kampung Sindangbarang Kabupaten Bogor (Kajian Masa Pandemi Covid-19). . *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(10), 1022-1035.
- B. Bharoto, wawancara pribadi, 17 Februari 2025
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (2024). Kota Semarang Dalam Angka 2024. BPS Kota Semarang.
- Baihaqi Annizar, (2019). "Duh, Pemkot Semarang Tak Bisa Pastikan Kapan Revitalisasi Kota Lama Selesai. . (<https://jatengtoday.com/dzxuh-pemkot-semarang-tak-bisa-pastikan-kapan-revitalisasi-kota-lama-selesai-2>),.

- Baihaqi Annizar, (2019). "Prihatin Revitalisasi Kota Lama Terus Molor, Komunitas AMBO Gelar #KamiTetapTangguh. <https://jatengtoday.com/22323-3>.
- Baihiq Annizar, (2019). Revitalisasi Kota Lama Molor, Pengusaha Kuliner Merugi DanTerpaksa Tutup Sementara . (<https://jatengtoday.com/revitalisasi-kota-lama-molor-pengusaha-kuliner-merugi-dan-terpaksa-tutup-sementara>).
- Bromley, R. D. F., Tallon, A. R., & Thomas, C. J. (2005). City centre regeneration through residential development: Contributing to sustainability. *Urban Studies*, 42(13), 2407–2429.
- Buditiawan, K. S. (2024) Revitalisasi Makam Belanda di Peneleh Surabaya untuk Mendukung Urban Tourism Berdasarkan Persepsi Stakeholder. *Inovasi*, 21(1), 27-37.
- Cohen, J. L., & Arato, A. (1992). *Civil Society and Political Theory*. MIT Press.
- Cohen, J. M., & Dan Uphoff, N. T. (1997). *Rural Development Participation*, RD CCIS. Cornell University Press.
- Dewi, A. S. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELESTARIAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA KOTA LAMA SEMARANG. . *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(4), 733-744.
- Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Kemendikbud (2018). Kampanye pelestarian cagar budaya Semarang sukses hadirkan pemilik bangunan kuno. Kemdikbud. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/kampanye-pelestarian-cagar-budaya-semarang-sukses-hadirkan-pemilik-bangunan-kuno/>
- Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, (2024). "Kota Semarang Usulkan MKB Tahun 2024 dengan Tema' Arsip Revitalisasi', . <https://www.arpusda.semarangkota.go.id/blog/detail/kota-semarang-usulkan-mkb-tahun-2024-dengan-tema-arsip-revitalisasi-kota-lama-semarang>.
- Dinda Rahmasari, (2021). Dinilai Abaikan Prinsip Cagar Budaya, Revitalisasi Kota Lama Semarang Disorot. <https://lingkar.co/dinilai-abaikan-prinsip-cagar-budaya-revitalisasi-kota-lama-semarang-disorot/amp/>.
- Disbudpar, (2024). "Wisata Kota Lama Semarang Dan 6 Destinasi Yang Menarik Dikunjungi"). (<https://pariwisata.semarangkota.go.id/frontend/web/index.php?r=site%2Fberita-details&id=5>).
- Edwards, M. (2014). *Civil Society*. Polity Press.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>

- Endang, S. (2021). Peer review-Manajemen Berbasis Komunitas untuk Pengembangan Kota Lama Semarang Berwawasan World Heritage
- Firdausi, H. R. (2024). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Publik Ramah Lingkungan Pada Kawasan Cagar Budaya Banda. . *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 7012-7025.
- Firdausyiah, A. G., & Dewi, S. P. (2021). Pengaruh revitalisasi terhadap pola ruang kota lama Semarang. *Jurnal Riptek*, 15(1), 17-27.
- Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks. International Publishers.
- Hananta, N. N. (2024). ‘‘Revitalisasi Gedung Juang 45 Pati Sebagai Galeri Dengan Pendekatan Eco-Cultural’’. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Handaka, H. (2018). Revitalisasi Kota Lama Semarang. *Tribunnews*.
<https://m.tribunnews.com/images/regional/view/1752872/revitalisasi-kota-lama-semarang>
- Hardi, S. S. (2022). Komunitas Sebagai Media Promosi Wisata Budaya Kota Ternate Studi Pada Komunitas Ternate Heritage Societ . (*Doctoral Dissertation, Universitas Khairun*).
- Hartadji, D. K. (2024). Peran Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Pariwisata. *Jurnal Abdimas Pariwisata*, 5(2), 81-83.
- Hikam, M. A. S. (1996). Demokrasi dan civil society: Politik demokratisasi di Indonesia. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia
- Hikam, M. A. S. (1999). Demokrasi dan civil society: Politik demokratisasi di Indonesia (Cetakan ke-2). Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Hildayanti, A. (2022). Strategi Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Dengan Pendekatan Revitalisasi. *TIMPALAJA: Architecture student Journals*, 2(1), 72-82.
- Hirodias, E. H. (2022). Implementasi Kebijakan Pengembangan Destinasi Pariwisata Budaya di Kabupaten Manggarai Barat. . *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(1), 99-107.
- I. Isti, wawancara pribadi, 18 Februari 2025
- J. Jessie, wawancara pribadi, 14 September 2024
- Jacobs, J. (1961). The Death and Life of Great American Cities. New York: Random House.
- Jurgen Habermas, (1984). *The Theory of Communicative Action*. Beacon Press.
- Jurgen Habermas, (1996). *Between facts and noms: contribution to a discourse theory of law and democracy*
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2018). Kementerian PUPR anggarkan Rp 156 miliar untuk penataan kawasan wisata Kota Lama

Semarang. <https://pu.go.id/berita/kementerian-pupr-anggarkan-rp-156-miliar-untuk-penataan-kawasan-wisata-kota-lama-semarang>

- Kurniawan, K. S. (2022). Konstruksi sketsa wisata heritage dalam menarik minat berkunjung wisatawan (Studi Kasus di Bandung Sketchwalk). *Andharupa: Jurnal Desain Komunikasi Visual & Multimedia*, 9(02), 144-165.
- Mahindra, D. A. (2022). Implementasi Kebijakan Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya (Studi Pada Jalan Panggung Kota Lama, Surabaya). *Publika*, 219-230.
- Manar, D. G. (2023) Kebijakan Revitalisasi Cagar Budaya Kota Lama Semarang dalam Prespektif Tata Kelola Pemerintahan. *Journal of Politic and Government Studies*, 13(1), 369-375.
- Mikhael Gewati, (2023) "Walikota Ita Sebut Revitalisasi Kota Lama Semarang Tak Berhenti pada Perbaikan Bangunan". https://regional.kompas.com/read/2023/02/13/07300071/wali-kota-ita-sebut-revitalisasi-kota-lama-semarang-tak-berhenti-pada?utm_source=Various&u.
- NANDHITA SUCI RAMADHANI, N. A. N. D. H. I. T. A. (2022). REVITALISASI OBJEK WISATA BANUA PANGKA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA BAWALIPU KEC. WOTU KAB. LUWU TIMUR (Doctoral dissertation, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO).
- Paddison, R. (1993). City marketing, image reconstruction and urban regeneration. *Urban Studies*, 30(2), 339–349.
- Pratama, L. S., & Permadi, L. A. (2024). Analisis Strategi Pemasaran Dalam Rangka Revitalisasi Wisata Kerandangan dan Mangsit Kabupaten Lombok Barat. *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA*, 10 (1), 12-20.
- Pratiwi, D. I., Zahra, J. A. A., & Aliyah, I. (2022). KONSERVASI KAWASAN HERITAGE (Studi Kasus: Koridor Jalan Braga, Kota Bandung, Indonesia). *Cakra Wisata*, 23(2), 34-52.
- Priatna, A. E. (2021). Civil society dan pendidikan politik perempuan: Studi atas peran Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiah dalam pendidikan politik perempuan (Tugas akhir, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Purbaya, A. A. (2022). Bangunan cagar budaya Semarang dapat diskon PBB, ini cara mengurusnya. *Detik.com*. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6041372/bangunan-cagar-budaya-semarang-dapat-diskon-pbb-ini-cara-mengurusnya>
- Putri, S. A (2021) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI KOTA LAMA SEMARANG SEBAGAI WORLD HERITAGE SITE VERSI UNESCO. . *Journal of Politic and Government Studies*, 11(1), 182-201.

- Ramadhan, A, Hasbiyah, D, & Fitriah, M. (2024) "Analisis Teori Tindakan Komunikatif Jürgen Habermas terhadap Komunitas Peduli Ciliwung di Kota Bogor"
- Routledge. Tiesdell, S., Oc, T., & Heath, T. (1996). *Revitalizing Historic Urban Quarters*. Oxford: Architectural Press.
- Setiawan, F. X. R. (2024). "Peran Media Sosial sebagai Ruang Publik: Tinjauan Filosofis Gagasan Ruang Publik Jürgen Habermas.
- Shin, H. B. (2010). Economic transition and the expansion of urban redevelopment in China: The case of Shanghai. In Fulong Wu (Ed.), *China's Emerging Cities: The Making of New Urbanism* (pp. 67–88).
- Sonaesti, C., & Purwanto, E. (2022). Revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang: Antara Harapan Dan Kenyataan. *Jurnal Arsitektur ARCADE*, 6(1), 21-29.
- Srywahyunengsi, S. (2021). *Revitalisasi Kawasan Bersejarah Goa Mandu Sebagai Objek Wisata Di Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Timothy, D. J., & Boyd, S. W. (2003). *Heritage Tourism*. Harlow: Prentice Hall.
- Tocqueville, A. de. (1835). *Democracy in America*. Harper & Row.
- Tocqueville, A. de. (2000). *Democracy in America* (trans. George Lawrence). New York: Anchor Books.
- Ubaedillah, Achmad. *Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Kencana, 2015
- Wijaya, H., & Pratama, F. (2023). "Implementasi Teori Tindakan Komunikatif dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia."
- Yayasan Festival Kota Lama Semarang. (2025). *Festival Kota Lama*. <https://festivalkotalama.com/>
- Yulianti, E. F. (2019, April 30). Meriahkan HUT ke-472 Kota Semarang, warga Kota Lama gelar event Kami Tetap Tangguh. *Tribun Jateng*. <https://jateng.tribunnews.com/2019/04/30/meriahkan-hut-ke-472-kota-semarang-warga-kota-lama-gelar-event-kami-tetap-tangguh>

LAMPIRAN

Dokumentasi Kegiatan Wawancara dengan Ibu Jessie



Dokumentasi Kegiatan Wawancara dengan Bapak Bharoto



Dokumentasi Kegiatan Wawancara dengan Ibu Isti



Dokumentasi Konferensi Pers Oleh Komunitas AMBO



Dokumentasi Aksi Bagi-Bagi Masker Oleh AMB



Dokumentasi AKTA Pendirian AMBO

Warga Kota Lama Semarang
Kd Kota Lama Semarang
Email : ambo@kotalamasemarang.com

AKTA

Tgl. : 05 AGUSTUS 2023
No. : 02.

SALINAN

AKTA PENDIRIAN
PEKUMPULAN WARGA
KOTA LAMA SEMARANG AMBO



STEFANUS YUWONO TEDJOSAPUTRO, ST,SH,MBA,MSIS,MKn,MH
NOTARIS
SK. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-01/AH.02.01.TAHUN 2011
Tanggal : 05 Januari 2011

KANTOR :
Jl. Mayjend. D.I. Panjaitan No. 22 Semarang 50135
Telp. (024) 3551353
e-mail : sytedjo@yahoo.com

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Lisna Anggraeni
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 19 Mei 2003
NIM : 2106016024
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Agama : Islam
Alamat : Jl. Kaligawe 5,6 , Kota Semarang
Email : lisnaa868@gmail.com
No HP : 089518631770

RIWAYAT PENDIDIKAN :

SD Negeri Genuksari 2012-2017

SMP Negeri 1 Sayung 2017-2019

SMA Islam Sultan Agung Semarang 3 2019-2021

RIWAYAT ORGANISASI :

Anggota Divisi I SEMA Fisip 2023